

**EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI**



A M A R

P0200203503

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI KECAMATAN SINJAI TENGAH
KABUPATEN SINJAI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai gelar Megister

**Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

Disusun dan diajukan oleh

A M A R

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

TESIS

EVALUASI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

A M A R

Nomor Pokok P0200203503

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 15 Agustus 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H.M Tahir Kasnawi, SU
Ketua

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc
Anggota

**Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah**

**Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin**

DR. IR. Roland A. Barkey

Prof.Dr.dr.Abdul Razak Thaha, M. Sc

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan
Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi
Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai

Nama Mahasiswa : A m a r

Nomor Pokok : P0200203503

Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H.M Tahir Kasnawi, SU
Ketua

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc
Anggota

Mengetahui,
Ketua Program Studi PPW

Dr. Ir. Roland A. Barkey

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan keAdirat Allah Subhana Wataala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Gagasan yang melatarbelakangi tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis atas pelaksanaan program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) di Kecamatan Sinjai Tengah. Untuk itu penulis bermaksud mengetahui dampak pelaksanaan program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, hanya karena bantuan, bimbingan dan arahan berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU, sebagai ketua komisi penasehat dan Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc, sebagai anggota komisis penasehat, yang dengan tulus menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam rangka penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Drs. H. A. R. Hafidz, MS, Bapak Prof. Dr. Ir. A. Rahman. Mappangaja, M. Sc dan Bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey, M. Sc, selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan arahan demi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Yulianto Sumalyo, DEA, mantan Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey, M.Sc, sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah serta seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti proses pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M, Nasir Nessa, M.S mantan Direktur Program Pascasarjana dan Bapak Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M. Sc, selaku Direktur beserta seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas bantuan dan dorongan yang diberikan
5. Rekan-rekan mahasiswa, khususnya program studi Perencanaan Pengembangan Wilayah (PPW) angkatan 2003 serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan, kebersamaan, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
6. Akhirnya, rasa terima kasih penulis tujukan kepada almarhum dan almarhumah Ayahanda A. Ibnuhajar dan A. Hasma, saudaraku tercinta dan istriku A. Kartini, SP serta anak-anakku A. Butsainah Tumadir, A. Yamna Yusria, A. Yumna Yusria, A. Muhammad Afla Aiman dan A. Fitria Fauzan, yang penuh pengertian, pengorbanan, keihlasan dan doa yang senantiasa mengiringi penulis dalam menepuh dan menyelesaikan studi.

7. Kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya semoga dapat memberikan ganjaran yang setimpal. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini bagi pengembangan pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Makassar, Agustus 2008

Amar

ABSTRAK

AMAR. Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai (dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi dan Dr. Ir. Didi Rukmana, M. Sc).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian antara rencana Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) dan hasil yang dicapai dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data menggunakan teknik dikriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan. Pendekatan ini menggunakan kedalaman interpretasi tabel-tabel frekwensi dengan menggunakan instrumen pengambilan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan focus group discussion. Populasi dari penelitian ini adalah kepala keluarga penerima manfaat dari hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 yang bermukim di enam desa di kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 200 KK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) memberikan dampak positif bagi masyarakat di enam desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan status perkembangan usaha, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pendidikan, aksesibilitas dan kesehatan.

ABSTRACT

AMAR. Evaluatio of Capacities Reinforcement Program Development Basic Facilities Rural to Socioeconomic Condition Society in District Sinjai Middle of regency Sinjai (Guided By Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi and Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc)

This study bent on to know Attainment between plan of capacities reinforcement program development basic facilities rural (PKP2D) and reached result and its influence to Socioeconomic Condition Society in District Sinjai Middle of regency Sinjai. Data collecting uses technique descriptive qualitative with comparability approach that is compare to socioeconomic condition society before and after the execution Capacities Reinforcement Program Development Basic Facilities Rural. This approach used deepnes of frequency tableses interpretation by using instrument of data intake pass by questioner, interview, observation and focus group discussion. Population from research this is the familiy head of benefit receiver from development result basic facilities program PKP2D budget year 2003 and 2004 that residence in six country sides in District Sinjai Middle 200 KK.

Research result indicated that execution of capacities reinforcement program development basic facilities rural (PKP2D) give positive impact for society in six countryside referred. This condition can be seen from improvement of effort growth status, job opportunity, rate of return, house ownership, education level, accebility and health.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat	6
II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Pengembangan Wilayah	7
B. Konsep Kawasan Pembangunan dan Strategi Pengembangannya	11

C. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	16
D. Indikator Ekonomi Sosial Pembangunan Wilayah	18
E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Strategi Pengembangannya	24
F. Pembangunan Wilayah Pedesaan	37
G. Penguatan Kelembangan Pengembangan Prasarana Perdesaan	44
H. Kerangka Fikir	50
III. METODE PENELITIAN	67
A. Lokasi Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	67
C. Populasi Sampel	68
D. Jenis dan Sumber Data	69
E. Metode Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data	70
G. Defenisi Operasional	72
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
B. Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan	96
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	119
A. Diskripsi Identitas Responden	119
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program PKP2D	124

C. Analisis Dampak Program Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah	130
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

nomor		halaman
1.	Analisis komparatif strategi dan kebijakan pembangunan regional	22
2.	Luas wilayah, jarak kota kabupaten & jumlah penduduk	79
3.	Luas wilayah dan penyebaran penduduk menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah	85
4.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio menurut desa di Kecamatan Sinjai Tengah.	86
5.	Jumlah rumah tangga /Kepala keluarga dan rata-rata jumlah anggota kelurahan tiap RT menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah.	87
6.	Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Sinjai Tengah.	88
7.	Penduduk menurut mata pencaharian dirinci di Kecamatan Sinjai Tengah.	89
8.	Ketersediaan prasarana jalan, jembatan dan irigasi di Kecamatan Sinjai Tengah.	91
9.	Ketersediaan prasarana dan tenaga jesehatan di Kecamatan Sinjai Tengah.	92
10.	Hasil pembangunan prasarana Program PKP2D Tahun anggaran 2003 & 2004 di Kecamatan Sinjai Tengah.	107
11.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Mattunreng Tellue.	110
12.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Kelurahan Samaenre.	111
13.	Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Saotengnga.	112

14. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Saotanre.	113
15. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Bonto.	114
16. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di desa Pattongko.	114
17. Keadaan responden menurut umur di Kecamatan Sinjai Tengah	120
18. Keadaan responden menurut pendidikan di Kecamatan Sinjai Tengah.	121
19. Keadaan responden menurut pekerjaan pokok di Kecamatan Sinjai Tengah	122
20. Keadaan responden menurut jumlah anggota keluarga di Kecamatan Sinjai Tengah.	123
21. Keadaan responden menurut tingkat pendapatan di Kecamatan Sinjai Tengah.	124
22. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap perencanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	127
23. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	128
24. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.	129
25. Perubahan Perkembangan usaha setelah program PKP2D.	131
26. Perubahan Kesempatan kerja setelah program PKP2D.	133
27. Perubahan Tingkat pendapatan setelah program PKP2D.	135
28. Perubahan Kondisi Perumahan setelah program PKP2D.	137
29. Perubahan Kemampuan meningkatkan pendidikan setelah program PKP2D	140
30. Perubahan tingkat aksesibilitas setelah program PKP2D.	142

31. Perubahan tingkat kesehatan setelah program PKP2D. 144
32. Hasil Analisis dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 145

DAFTAR GAMBAR

nomor	halaman
1. Kerangka Mekanisme Program PKP2D.	56
2. Kerangka Pikir	66
3. Penetapan Kawasan Prioritas Pemberdayaan Sosisal Ekonomi Masyarakat (KSPM)	100
4. Peta Kabupaten Sinjai	84
5. Peta Kecamatan Sinjai Tengah	97

DAFTAR LAMPIRAN

nomor	halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian	161
2. Nama dan Identitas Responden	172
3. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Analisis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Prasarana Program PKP2D Kec. Sinjai Tengah	176
4. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Kondisi Ekonomi dan Sosial di Kecamatan Sinjai Tengah	180
5. Foto Pelaksanaan Penelitian	186
6. Foto Pelaksanaan Prasarana Program PKP2D Kec. Sinjai Tengah	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar kawasan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah mencoba melakukan perubahan konsep pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional sejak repelita VI.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yakni, UU No, 26 tahun 2007 mengatur tentang, penataan ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dimana struktur ruang adalah pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki mempunyai hubungan fungsional, dan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan strategis atau andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan akan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap perkembangan ekonomi antar daerah .

Kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (prime mover), yang memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu wilayah, memiliki sector unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (hinterland),(Rorat, 1996:15).

Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui pemberdayaan sector/ subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah mengingat “ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variable ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan”. (Kuncoro, 2000:18).

Demikian pula undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberi kewenangan dan keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengembangkan wilayah untuk kesejahteraan rakyatnya. Berkaitan dengan undang-undang tersebut diatas maka pemerintah daerah memacu diri untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara bijaksana, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan pada rencana tata ruang yang ditetapkan sejalan dengan arahan tata ruang orde diatasnya (propinsi dan Nasional).

Kabupaten Sinjai memiliki wilayah yang luasnya sebesar 81.996 Ha, terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan memiliki visi dalam Restra 2003-2008” Terwujudnya Sinjai lebih maju dan terkemuka dengan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian lokal”, dimana Kecamatan Sinjai Tengah merupakan salah satu wilayahnya.

Kecamatan Sinjai Tengah memiliki topografi terdiri dari perbukitan sampai pegunungan, keadaan topografi demikian menyebabkan Sinjai Tengah memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti potensi peternakan, pertanian dan perkebunan. Namun disadari bahwa dengan kondisi wilayah seperti itu memberi keuntungan dilain sisi menimbulkan kendala tersendiri dalam pengembangannya mengingat infrastruktur pendukung berupa prasarana, sarana produksi dan transportasi masih belum memadai. Rendahnya sumberdaya manusia, minimnya permodalan petani dan masyarakat serta sering menurunnya semangat petani dalam mengelola bidang usahanya akibat selalu terkendala dari segi pengendalian hama, perolehan pupuk yang kadang langka pada saat dibutuhkan serta pemasaran pada saat produksi melimpah, harganya sangat murah .

Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi, peluang, ancaman serta kendala yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat petani maka pemerintah daerah mencoba mengatasi hal tersebut dengan mensinergikan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada serta mencoba mengatasi kendala melalui program Penguatan Kelembagaan Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan ketersediaan prasarana infrastruktur yang berperspektif

pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan dan dirumuskan bersama oleh seluruh stake holder (masyarakat, pemda, legislatif, LSM, Perguruan Tinggi, wartawan, kalangan swasta dll). Program ini diharapkan dapat menjadi pilihan tepat dan efektif dalam mengelola pembangunan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk memenuhi kemaslahatan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

Namun pelaksanaan program PKP2D tersebut terindikasi belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, hal ini terlihat dengan masih terdapatnya beberapa wilayah produksi pertanian dan perkebunan potensial, yang infrastruktur jalannya masih buruk, disamping itu permasalahan petani terhadap hama dan kualitas produksi masih dilakukan secara parsial oleh petani, begitupun masih terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat yang potensial menimbulkan bencana longsor yang berbahaya terhadap diri dan keluarganya, oleh karena itu perlu dievaluasi sejauhmana penerapan konsep itu dilakukan dan sejauhmana dukungan dan konsistensi masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka kami memilih topik :

**Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana
Perdesaan (PKP2D) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka, permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah ?.
2. Bagaimana pengaruh program PKP2D terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Sinjai Tengah ?.

C. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi sejauhmana konsep perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program terhadap hasil yang dicapai pada pelaksanaan program PKP2D.
2. Untuk menganalisis pengaruh Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Sinjai Tengah.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi diri dan fokus pada pembahasan mengenai evaluasi program PKP2D terhadap kondisi social ekonomi masyarakat yakni: perkembangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan, perumahan, pendidikan, aksebilitas dan derajat kesehatan masyarakat serta perencanaan program, pelaksanaan dan pemeliharaan

prasarana atas pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) di Kecamatan Sinjai Tengah.

Dalam penelitian ini akan dianalisis sejauh mana pengaruh program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah.

E. Manfaat.

1. Menemukenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan usaha-usaha sosial ekonomi masyarakat .
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang efektifif kepada pemda dan seluruh stake holder di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkaya ilmu terapan dalam penelitian bagi kalangan akademisi atau peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih detail terhadap pengembangan wilayah .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Umumnya para ahli sependapat bahwa evaluasi adalah upaya untuk mengukur manfaat dari sebuah program, atau untuk mengkaji keberhasilan sebuah program dalam memenuhi tujuannya serta mengukur efisiensi sebuah program dibandingkan dengan program lain. Evaluasi juga mempunyai pengertian sebuah usaha untuk memperkuat atau mengefektifkan sebuah program yang sedang berjalan.

Menurut Ali dan Sirait (1990; 30) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen untuk mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima secara universal.

Menurut Moekijat (2000; 16), evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Yunus (1999;180), pembagian wilayah kota terbagi menjadi tiga bagian yaitu : bagian paling dalam kota, bagian tengah dan bagian paling luar kota.

Miller (1978) melihat untuk tujuan yang lebih spesifik misalnya untuk kegiatan evaluasi pembangunan wilayah maka program evaluasi diartikan ".....the process of assessing a program's accomplishments, describing its methods, and certifying its strength and weaknesses."

Menurut definisi yang diutarakan diatas maka evaluasi meninjau pada hasil dari pengembangan program, selain juga meninjau pada proses bagaimana dan mengapa hasil yang dimaksud dapat terjadi. Tujuan umumnya adalah menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan baik pada saat berlangsungnya sebuah kegiatan atau pada saat berakhirnya sebuah kegiatan. Keputusan yang dihasilkan dari hasil evaluasi sebuah kegiatan antara lain, mengakhirinya, melanjutkan atau memperluas lingkup kegiatan tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan antara lain melakukan penanggulangan khusus untuk meningkatkan kualitas pekerjaan atau memberi penekanan khusus pada satu bagian kegiatan agar memberi pengaruh positif pada kegiatan lain yang berhubungan.

Lebih lanjut Aji dan sirait (1990 :30) mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan rencana kegiatan, dan rencana program hanya dapat dibuktikan dengan evaluasi. Dengan demikian evaluasi haruslah dikembangkan secara melembaga dan membudaya agar pelaksanaan kegiatan, program dan program pembangunan dapat lebih berhasil, bermanfaat dan berdaya guna.

Secara eksplisit pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap-tahap didalam siklus pengelolaan program, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori meliputi :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan didalam tahap perencanaan, dalam rangka mencoba memilih memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metoda-metoda yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda-beda menurut hakikat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, evaluasi adalah tindakan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Evaluasi disini berbeda dengan monitoring atau pengendalian, karena monitoring melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana dan rencana tersebut dianggap sudah tepat untuk dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Sebaiknya evaluasi melihat sejauh mana kegiatan/pelaksanaan program masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah atau apakah pencapaian hasil kegiatan tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang akan dihadapinya.

3. Evaluasi tahap purna pelaksanaan

Pada tahap purna pelaksanaan, evaluasi hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan, perbedaannya yang dinilai dan dianalisis bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana melainkan hasil pekerjaan dibandingkan dengan rencana, yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Sitorus (1985:47) kegiatan utama dalam evaluasi lahan menurut FAO (1976) adalah :

1. Konsultasi pendahuluan meliputi pekerjaan persiapan antara lain penetapan tujuan evaluasi secara jelas, jenis data yang digunakan, asumsi yang digunakan dalam evaluasi, daerah penelitian, serta intensitas dan skala survey.
2. Penjabaran (deskripsi) dari jenis penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan dengan segala persyaratan yang diperlukan.
3. Deskripsi satuan peta lahan (Land Mapping Unit) dan kemudian kualitas lahan (Land Qualities) berdasarkan pengetahuan tentang persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan pembatas-pembatasnya.
4. Membandingkan jenis penggunaan lahan dengan tipe-tipe lahan yang ada. Ini merupakan proses penting dalam evaluasi lahan, dimana data lahan, penggunaan lahan dan informasi-informasi ekonomi dan sosial digabungkan dan di analisis secara bersama-sama.

5. Hasil dari butir 4 adalah klasifikasi kesesuaian lahan.
6. Penyajian dan hasil evaluasi.

Kesimpulan dari pendapat tersebut diatas dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka evaluasi terhadap aktifitas program penguatan kapasitas pengembangan prasarana Perdesaan (PKP2D). yang dimaksudkan sebagai upaya membandingkan antara rencana yang ingin dicapai khususnya terkait dengan peningkatan kegiatan social ekonomi dan pengembangan wilayah dengan hasil yang dicapai.

B. Konsep Pengembangan Wilayah

Dalam studi pengembangan wilayah, secara alamiah terjadi penyebaran potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berbeda antar wilayah. Penyebaran ini disebabkan karena sitiap wilayah mempunyai karakteristkik yang berbeda-beda satu sama lain, yang berimplikasi pada perbedaan tingkat pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah dan menciptakan struktur wilayah baik fisik, ekonomi, tata ruang dan fasilitas produksi yang berpengaruh terhadap pola aliran modal, arus komoditi, arus tenaga kerja dan komunikasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan setiap wilayah mempunyai keragaman.

Wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam studi pengembangan wilayah, pertimbangan produktifitas dan efisisensi dalam melakukan aktifitas produksi, konsumsi dan distribusi merupakan indikator yang perlu diperhatikan dalam megoptimalkan kinerja suatu wilayah.

Menurut Newchon (1985;60), wilayah mempunyai sifat dan karakteristik yaitu :

(i) Wilayah nodal yaitu wilayah yang secara fungsional tergantung antara pusat dan hinterlandnya; (ii) wilayah administratif yaitu wilayah yang batasnya dibuat karena kepentingan politik, pemerintahan dan administrasi; (iii) wilayah homogen yaitu wilayah yang memiliki sifat dan ciri yang sama; (iv) wilayah perencanaan yaitu wilayah karena kebutuhan perencanaan dikelompokkan menjadi satu.

Menurut Chinitz dalam Adisasmita (1994) konsep wilayah mengandung tiga pengertian yaitu : wilayah homogen (homogeneous), adalah wilayah geografi yang dapat menjadi wilayah tunggal apabila wilayah tersebut mempunyai karakteristik ekonomi, sosial budaya, kondisi politik dan sumber daya yang sama; (ii) Wilayah nodal (nodal region) atau wilayah polarisasi (polarization region) adalah wilayah yang terdiri dari wilayah-wilayah yang heterogen seperti terkonsentrasinya kepadatan penduduk, pemusatan sarana dan prasarana yang cukup tinggi; (iii) wilayah perencanaan (planning region) adalah suatu wilayah pengembangan dimana program-program pembanguinan itu dilaksanakan.

Selanjutnya Hoover (dalam Glasson, 1990), mengemukakan bahwa wilayah homogen merupakan wilayah yang dibatasi berdasarkan keseragamannya, dimana keseragaman yang tercipta merupakan keragaman intern (internal uniformity). Sedangkan Allen dan Maclellan (dalam Sukirno, 1985), menyatakan bahwa batas daerah nodal ditentukan sejauhmana

pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hoover (dalam Glasson, 1990), menyatakan bahwa struktur dari daerah nodal dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat satu inti dan beberapa daerah peripheri melingkapi.

Menurut Moekijat (2000; 16), evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah dilakukan sebelumnya.

Dan Klaessen (dalam Glasson, 1990) mengemukakan bahwa wilayah perencanaan antara lain : (i) harus cukup besar dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi, (ii) harus mampu mensuplai industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang diperlukan, (iii) harus mempunyai struktur ekonomi yang homogen (iv) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point), (v) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan, (vi) mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalannya.

Pengertian wilayah juga sering diartikan sebagai suatu daerah administrasi dengan batas-batas tertentu. Sukirno (1985) mengemukakan bahwa pengertian wilayah administrasi (dalam pemerintahan) merupakan pengertian yang paling banyak digunakan, hal ini disebabkan oleh dua faktor yakni (i) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah, (b)

daerah yang batasnya berdasarkan atas satuan administrasi lebih mudah untuk dianalisa. Secara konseptual terdapat beberapa corak kewilayahan yang dapat digunakan sebagai alat operasional dalam memacu perkembangan suatu wilayah. Hal ini menjadi penting khususnya dalam menentukan karakter suatu wilayah yang akan dikembangkan sehingga didapatkan strategi pengembangan yang sebaiknya digunakan. Perbedaan karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadi daya tarik antara wilayah seperti arus manusia, arus modal, arus barang dan jasa. Proses tarik menarik ini berimplikasi pada terbentuknya wilayah-wilayah pusat dan wilayah pinggiran (center-periphery). Wilayah pusat merupakan wilayah yang dalam perkembangannya lebih banyak menyerap sumber daya yang ada disekelilingnya, sedangkan wilayah yang terisap sumberdayanya adalah daerah peniggiran. Menurut Fredman dan W. Alonso dalam Adisasmita (1994) mengklasifikasikan wilayah menjadi empat kategori yaitu : (i) metropolitan region, atau wilayah inti (core region), merupakan pusat pertumbuhan dengan kelengkapan fasilitas dan kegiatan yang sangat kompleks, (ii) Development axis, adalah wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi, (iii) frontier region adalah wilayah-wilayah perbatasan yang diarahkan untuk menjadi daerah yang belum terolah (virgin areas) dan Depressed regiop wilayah.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kemampuan perkembangan setiap wilayah, maka B. Okun dan R.W Richadson dalam Adisasmita (1994) membuat klasifikasi wilayah berdasarkan kriteria tersebut

menjadi : (i) low per capita income and stagnan regions (LS), adalah wilayah yang pendapatan perkapita rendah, (ii) high percapita income and stagnant regions (HS), adalah wilayah dengan pendapatan perkapita tinggi tetapi kurang berkembang, (iii) adalah wilayah dengan pendapatan perkapita rendah tetapi berkembang, dan (iv) High percapita income and growing regions (HG) adalah wilayah yang pendapatan perkapita tinggi dan berkembang.

Strategi pengembangan wilayah merupakan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan di daerah. Sehubungan dengan pembangunan daerah, maka Kadariah (1985), mengemukakan bahwa pengembangan regional biasanya karena kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan menghasilkan keuntungan kompetitif dari daerah lainnya. Keunggulan kompetitif dari suatu daerah menyebabkan terjadi dua proses dalam pengembangan suatu wilayah yaitu "backwash" dan "spread" effect. Backwash effect merupakan pengurasan wilayah terbelakang oleh wilayah yang maju, sedangkan spread effect adalah perkembangan wilayah belakang yang terdorong karena adanya hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakang. Menurut pengamatan Rondonelli dan Ruddle bahwa gejala yang terjadi di negara sedang berkembang adalah pola backwash effect selalu lebih besar dari spread effect maka diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah (Anonim, 1986:73).

Guna mendukung perkembangan suatu wilayah setidaknya ada tiga komponen utama pengembangan wilayah yang perlu diperhatikan, yaitu ; (i) sumberdaya penduduk, (ii) kegiatan ekonomi, dan (3) system transportasi (A. Karlqvist dalam Adisasmita, 1994). Ketergantungan antara ketiga komponen tersebut memainkan peranan yang fundamental dalam menata struktur suatu wilayah. Keterkaitan antara penduduk dan kegiatan ekonomi ditinjau dari segi produksi dan konsumsi menghasilkan lapangan kerja, upah buruh, tabungan masyarakat dll.

C. Konsep Pembangunan Kawasan dan Strategi Pengembangannya

Meskipun peranan tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan sangat penting sebagai faktor lokasional yang menentukan keberhasilan pembangunan kegiatan usaha, namun fungsi tertentu dan besaran tata ruang yang lebih luas telah mendapat perhatian yang diharapkan mampu menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan dalam berbagai sector.

Dalam pengembangan wilayah dilakukan perencanaan alokasi penggunaan tata ruang wilayah yang berfungsi memberikan arahan lokasi fungsi yang dominan dan non dominan menurut kawasan pengembangan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan tata ruang wilayah dalam hubungannya dengan pemanfaatan peningkatan produktifitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan.

Kawasan pengembangan dominan dirinci menurut bentuk pemanfaatannya yaitu :(Adisasmita, 2007).

1. Kawasan lindung (kawasan non budidaya), kawasan penyangga (kawasan budidaya terbatas), kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non pertanian.
2. Kawasan lindung dapat berfungsi hutan lindung, jalur pengamanan aliran sungai, pelindung mata air dan sebagainya. Kawasan penyangga dapat berfungsi hutan suaka alam, hutan wisata, hutan produksi terbatas, tanaman hutan.
3. Kawasan budidaya pertanian dapat berfungsi hutan produksi, tanaman tahunan, pertanian/ tanaman lahan kering, pertanian/ tanaman lahan basah.
4. Kawasan budidaya non pertanian dapat berfungsi pemukiman, industri, pertambangan, penggunaan khusus dan lain-lain.
5. Kawasan pengembangan non dominan dimana dapat berfungsi sebagai kawasan lindung (kawasan budidaya terbatas), kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non pertanian.

Selain dari konsep pengembangan yang dominan dan non dominan, dikenal pula istilah kawasan andalan dan kawasan strategis.

Beberapa ciri penting kawasan andalan dalam pengembangan wilayah meliputi (i) tingkat aglomerasi penduduk dan kegiatan ekonomi relatif tinggi (ii) tingkat ketersediaan infrastruktur relatif memadai (iii) memiliki sector

unggulan yang prospektif untuk dikembangkan (iv) memiliki sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi.

Sedangkan kawasan strategis memiliki ciri-ciri (i) Mempunyai kontribusi peningkatan ekspor non migas (ii) dampak peningkatan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas keamanan berkaitan dengan penyediaan lahan skala besar, seperti pemukiman penduduk, kawasan industri, pencetakan sawah dan menarik investasi (iii) mendorong pembangunan wilayah terbelakang, miskin, kritis dan terisolasi. (Kuncoro Mudrajad, 2008).

D. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan pengembangan strategis adalah kawasan pengembangan yang mempunyai sumber daya yang produktif untuk dikembangkan baik tingkat regional maupun nasional, aglomerasi regional, posisi strategis dan mempunyai implikasi terhadap pengembangan regional dan nasional. (Kuncoro Mudrajad, 2008).

Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografi yang terintegrasi dengan faktor terkait, dimana batasan sistem tersebut ditentukan oleh basis administrasi dan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi daerah itu. Kawasan pengembangan strategis juga meliputi area pertumbuhan dan perbatasan potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda sehingga dapat dikembangkan secara efektif.

1. Metode,

Dalam menentukan lokasi kawasan Pengembangan Strategis digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai referensi utama, termasuk tantangan pengembangan nasional, isu pengembangan (development), dan mekanisme pasar. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjelasan berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 47/1997 (dalam tahap revisi), merupakan acuan utama dalam menentukan Kawasan Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Strategis.
- b. Dengan memperhatikan tantangan pengembangan nasional, penentuan kawasan Pengembangan Strategis turut dimasukkan dalam tren globalisasi, kerjasama antar kawasan, implementasi otonomi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan berbagai macam kepentingan dalam pengolahan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan.
- c. Memperhatikan perbedaan tingkat pengembangan kawasan baik dalam pengaturan maupun pengembangan sumber daya alam tiap daerah.
- d. Mekanisme pasar turut menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis, dimana hal ini dapat merupakan instrument kebijakan dalam mengarahkan investasi daerah mendukung pengembangan kawasan.

2. Kriteria

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa faktor penting dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis adalah posisi

geografis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur dan keterkaitan inter-regional.

a. Lokasi Geografi.

Kriteria ini merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam lokasi pusat pasar domestic maupun internasional. Demikian halnya dengan lokasi sumber daya alam yang menghasilkan proses produksi lebih lanjut dan dapat meminimalkan biaya transportasi.

b. Sumber Daya Alam

Kriteria ini ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi Kawasan pengembangan strategis.

c. Infrastruktur Regional

Faktor ketiga ini penting untuk menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam kawasan yang mempunyai infrastruktur regional potensial yang mendukung sector produksi, pasar domestic dan internasional dan kawasan pedalaman.

d. Keterkaitan Antar-Regionanl

Faktor ini merupakan kriteria untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang memerlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. Trckle Down Effect (efek menetes ke bawah) dimungkinkan dapat terjadi.

3. Lokasi

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, lokasi Kawasan Pengembangan Strategis yaitu wilayah Kabupaten yang dibagi menurut kawasan sesuai karakteristik wilayah, potensi dan aksesibilitas terhadap pasar yang dituju.

4. Orientasi

Terdapat dua orientasi dalam menentukan lokasi Pengembangan Kawasan Strategis; Orientasi keluar (Ekspor) dan Orientasi ke dalam (perdagangan antar kawasan domestik).

Dalam menentukan lokasi tersebut, orientasi pasar global (seperti Uni Eropa, Apec, Timur Tengah, Afrika dan Afrika Selatan) turut dimasukkan dalam menentukan Pengembangan Kawasan Strategis.

5. Metode Cluster

Metode cluster menjadi gambaran utama dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis, dengan menentukan beberapa daerah prioritas berdasarkan RTRWN. Metode ini memerlukan kajian yang mendalam terutama dalam kaitannya dengan unit analisis yang tidak berdasarkan pada batas administrasi seperti batas provinsi atau kabupaten/kota. Cara ini tidak memperhitungkan pendekatan administrasi dan dipandang sebagai pendekatan fungsional dari daerah yang didesain.

6. Pengembangan SREC

Konsep Pengembangan Kawasan Strategis yang berdasarkan cluster daerah prioritas dapat dikembangkan secara ekonomi sebagai acuan dalam

pengembangan daerah kerja sama ekonomi sub-regional (Sub Regional Economic Cooperation/SREC). SREC telah dipromosikan sejak awal 1990-an melalui *skema segi tiga* pertumbuhan

Perbandingan antara SREC, KAPET, Kawasan Pengembangan Strategis, Zona industri, Zona Terikat, Zona Perdagangan Bebas dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel. 1 Analisis Komparatif Strategi & Kebijakan Pembangunan Regional (Kuncoro, M. 2008)

No	Karakteristik	Zona			KAPET	SREC	Kawasan Pengembangan Strategis
		Terkait	Industri	Perdagangan bebas			
1	Tujuan	ekspor	Pengembangan industri	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Pertumbuhan Ekonomi Regional	Kerjasama Regional & Internasional	Kesejahteraan Nasional, disparitas inter-regional, pembangunan berkelanjutan
2	Lingkup Regional	Lokal	lokal	Kota/pulau	Pemerintahan multi lokal	Negara anggota sub-regional	Multi propinsi dan daerah, orientasi ke dalam dan ke luar
3	Aktivitas Utama	Pengapalan Manufaktur	Maknufaktur	Multi sektor	Multi sektor	Multi sektor	Komoditi prioritas, industri berbasis teknologi, UKM
4	Dukungan Pemerintah Pusat	Fasilitas ekspor Tax holiday	Fasilitas perizinan	Infrastruktur dasar Fasilitas pajak	Dana operasional Fasilitas perizinan	Fasilitas pajak Fasilitas ekspor Fasilitas perizinan	Fiskal/moneter, investasi, perdagangan, transportasi, infrastruktur daerah

Sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu kabupaten, kawasan andalan memiliki faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi atas komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (technogical progress) (Todaro 2000:115).

Penciptaan peluang investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sector unggulan yang dimiliki oleh kawasan bersangkutan. Sektor/sub sector unggulan yang diukur dengan analisis location Quotient (LQ) memiliki kesamaan dengan sector ekonomi basis, dimana pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu sedangkan aktivitas lain (non basis) merupakan konsekwensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Soepono, 2000, 41-53; Hoover, 1971). Basis ekonomi dari sebuah komunitas terdiri dari aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja basis yang menjadi tumpuan perekonomian. Semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sector basis.

Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan andalan relevan dengan teori pusat pertumbuhan Perroux (1975) yang mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi diberbagai tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Dalam kaitannya dengan sector unggulan Perroux mengatakan bahwa industri unggulan (Lindustrie matriks) merupakan penggerak utama dalam

pembangunan daerah, dan adanya sector/ industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan pekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antardaerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perokonomian merupakan gabungan dari system industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari system industri yang relative aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relative pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah relative maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relative pasif (Arsyad, 1999;147-148).

E. Indikator Ekonomi dan Sosial Pembangunan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) diukur dengan kenaikan pendapatan daerah perkapita atau produk domestic regional bruto (PDRB) per kapita. daerah tersebut dapat merupakan propinsi atau kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu daerah, peningkatan ini meliputi kapasitas / volume produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat pula dinyatakan sebagai peningkatan sejumlah komoditas yang dihasilkan disuatu daerah (wilayah). Konsep ini menyangkut pengaruh yang luas misalnya dibidang perdagangan, yaitu dapat diperoleh suplay komoditas dalam jumlah yang lebih besar melalui pertukaran antar daerah yang menggunakan fasilitas transportasi, jasa perdagangan dan jasa pengangkutan (Adisamita, 2007).

Pembangunan ekonomi (economic development) adalah suatu konsep yang lebih luas, mencakup pula modernisasi lembaga yang bersifat ekonomi yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara produktif dan efisien sehingga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Kelembagaan adalah suatu sarana untuk bertindak dan berfikir yang merujuk pada organisasi masyarakat dan pada sikap orang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Kelembagaan dengan ekonomi produksi berkaitan dengan cara memadukan berbagai sumber daya untuk memproduksi barang-barang tertentu.

Modernisasi kelembagaan mengacu pada penyesuaian dengan cara baru tentang pelaksanaan dan pengorganisasian kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan lainnya secara lebih rasional yang sangat berbeda dengan cara tradisional atau sudah biasa diterapkan.

Pertumbuhan ekonomi modern merujuk pada pengalaman lalu yang dialami oleh negara maju yang memperlihatkan gambaran perkembangan sebagai berikut (Adisamita, 2007) : (i) kenaikan output perkapita, (ii) pertumbuhan jumlah penduduk, (iii) pola kemajuan teknologi yang mantap (iv) kenaikan cadangan modal netto yang mantap (v) terus berkembangnya upah nyata, (vi) tingkat perubahan struktur ekonomi yang tinggi, (vii) perubahan social dan berbagai sector non ekonomi lainnya.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan suatu daerah, salah satu diantaranya adalah konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross National Product (GNP) yang merupakan nilai seluruh produksi dalam suatu negara/wilayah dari seluruh sector kegiatan ekonomi.

Dalam pembangunan regional, perencanaan sub sistem dari ekonomi nasional adalah merupakan prasyarat. Suatu daerah (wilayah) dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan daerah (wilayah) lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komoditas. Dalam proses pembangunan ekonomi akan terjadi peningkatan dalam volume produksi, sumberdaya pembangunan, pendapatan perkapita, infrastruktur dan sosial, perbaikan sistem transportasi, penurunan biaya produksi dan sebagainya.

a. Indikator ekonomi

Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi wilayah dapat dikemukakan yaitu pendapatan regional perkapita, (kesenjangan /ketimpangan) pendapatan, perubahan struktur perekonomian melalui pendekatan sector, struktur industri, pertumbuhan kesempatan kerja dan tingkat penyebaran kemudahan.(Adisasmita, 2007)

1. Pendapatan regional perkapita.

Salah satu konsep paling penting dalam pembangunan ekonomi regional adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai seluruh produksi dari seluruh kegiatan sektoral dalam suatu daerah. PDRB dapat dihitung dengan pendekatan arus barang dan jasa penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan penyusutan diperoleh pendapatan regional. Selanjutnya pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah sama dengan pendapatan Regional per pakapita suatu daerah.

2. Kesenjangan Pendapatan

Perkembangan pola kesetimbangan negara-negara yang berkembang menuju permulaan pembangunannya sampai menjadi negara maju menunjukkan ketidakseimbangan yang tinggi untuk kemudian menjadi lebih kecil. Di negara-negara dengan pendapatan rendah terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar, dimana dalam masyarakat terdapat mereka yang sangat kaya di samping mereka yang sangat miskin.

3. Perubahan Struktur Perekonomian melalui pendekatan sektor

Berdasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang dimanfaatkan dalam pertanian, dan suatu peningkatan dalam industri manufaktur (sekunder) dan kemudian dalam industri-industri jasa (tersier).

Menurunnya sumbangan sektor pertanian dan meningkatnya sumbangan sektor industri mencerminkan perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang dan kokoh, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

4. Struktur Industri

Interprestasi pertumbuhan daerah dapat dikaitkan pula dengan struktur industrinya. Argumentasinya adalah kerangka dasar analisis pertumbuhan regional, lokasi industri dilihat dalam konteks yang komprehensif dan konsisten untuk memahami dan mengevaluasi pembangunan ekonomi sub-nasional. Asumsi yang digunakan adalah

pertumbuhan regional secara overall (volume kegiatan ekonomi) ditentukan oleh konstelasi kekuatan yang berbeda dari pada pendapatan per kapita (aspek kesejahteraan dari pertumbuhan); pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu proses evolusioner dimana sukses pembangunan masa depan dipengaruhi oleh pengambilan keputusan masa lalu dan sekarang, dan faktor-faktor kritis/penting dalam merubah pola pertumbuhan regional adalah pengambilan keputusan lokasi dan output dari perusahaan-perusahaan industri yang mempertimbangan persyaratan input dan pasar.

5. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah mendesak dalam rangka pembangunan Indonesia karena mencakup secara langsung usaha pencapaian Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas. Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mempengaruhi tingkat pengangguran.

6. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan, baik kebutuhan hidup sehari-hari (misalnya sandang, pangan, memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi, dan sebagainya), maupun kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong, suku cabang, listrik, air, dan jasa-jasa seperti angkutan, pemasaran, dan perbankan).

Poernomosidi Hadjisarosa (mantan Menteri PU, 1978-1983) berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu wilayah adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria pendapatan daerah (per kapita) sangat sukar untuk mencari kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain dari pada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, pendapatan tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya.

Dari segi metodologisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada konsep ekonomi (PDRB) dan menafsirkan pertumbuhan sesuatu daerah menurut dinamikanya (struktur industri). Indikator-indikator tersebut adalah komplementer.

b. Indikator Sosial

Untuk mengukur pengaruh sosial terhadap kegiatan pembangunan, diperlukan parameter tertentu berupa indikator untuk mengukur besaran pengaruh yang dapat dilakukan melalui metode pendekatan sebagai berikut : (Adisasmita, 2007).

1. Perkembangan Indikator Sosial

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan pada masa lalu telah menunjukkan keberhasilan yang positif di berbagai bidang (baik ekonomi maupun sosial). Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia (improving quality of life), sering disebut kesejahteraan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan diperlukan tolok ukur atau indicator yang tepat dan rinci.

Dalam bidang social, salah satu alternative ukuran pembangunan yang menjadi cakupan indicator meliputi 10 indikator (Indikator kesejahteraan Rakyat (1980-1981) : (i) Penduduk, (ii) keluarga berencana, (iii) Migrasi, (iv) Pendidikan, (v) Sosial budaya, (vi) Kesehatan, (vii) Gizi), (viii) Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, (ix) Kemanan dan ketertiban masyarakat dan (x) Lingkungan hidup dan perumahan.

2. Kegunaan Indikator

Salah satu kegunaan terpenting dari suatu indikator kesejahteraan rakyat adalah untuk membandingkan tingkat kesejahteraan beberapa kelompok masyarakat baik menurut golongan, daerah maupun waktu.

Hasil pengukuran ini haruslah merupakan hal yang sederhana, dan mudah diartikan, sehingga mereka segera dapat membaca keadaan kesejahteraan pada suatu daerah dan membuat evaluasi.

Faktor kesejahteraan rakyat suatu daerah (kabupaten/ kecamatan/ desa) dapat merupakan masukan bagi penentu kebijakan guna melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu indikator yang disusun haruslah memiliki keabsahan sebagai ukuran dan berasal dari data yang dapat dipercaya.

3. Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya potensi dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam menangani dan menurunkan permasalahan sosial, meningkatnya mutu pelayanan dan tersedianya kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial dan fasilitas umum.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

- i. Pemberdayaan, peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang pada masyarakat.
- ii. Kemitraan, kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal Sulawesi Selatan antara pihak yang bermitra dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- iii. Partisipasi, prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk peningkatan kesejahteraan sosial.
- iv. Desentralisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai karakteristik sosial budaya setempat dan pelaksanaannya dilakukan secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif, oleh karena itu diperlukan indikator sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan pembangunan. Secara umum indikator-indikator kunci pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi ;(1) indikator ekonomi, (ii) indikator sosial. Kedua indikator ini penting karena selain mampu menjelaskan kemajuan ekonomi secara luas (tingkat pendapatan, inflasi, investasi dan lain-lain), juga mampu menempatkan permasalahan sosial sebagai parameter dalam pembangunan seperti, akses terhadap kesehatan, pendidikan dan kemudahan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi, kesempatan kerja dan lain-lain.

Penempatan indikator sosial ekonomi dalam melihat proses pembangunan merupakan suatu koreksi, bahwa pembangunan mempunyai dimensi yang lebih penting dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Menurut Dudley Seers dalam Mudrajad.K (1997), menyatakan bahwa pembangunan setidaknya merupakan upaya untuk meniadakan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Sedang Todaro (1989) lebih menekankan terhadap pencapaian pembangunan yang membuat manusia lebih berharga, dengan memperhatikan 3 (tiga) nilai dasar pembangunan yaitu : (i) life sustenance, kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, (ii) self-esteem, kebutuhan untuk dihargai, (iii) freedom, kebutuhan kebebasan. Strategi ini mencoba untuk memasukkan "jaminan" agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mampu mendapat manfaat dari setiap program pembangunan. Menurut Mudrajad K. (1997) ada 4 (empat) paradigma pembangunan yang harus diperhatikan guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi suatu negara yaitu :

1. Strategi pertumbuhan dengan distribusi, yaitu mendistribusikan pertumbuhan secara adil dan merata pada setiap masyarakat seperti, investasi modal manusia, kesempatan kerja, perhatian pada petani dan lain-lain.
2. Strategi kebutuhan pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok mencakup kebutuhan minimum konsumsi (pangan, sandang, perumahan), dan jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air bersih dan fasilitas pendidikan).
3. Strategi pembangunan mandiri, yaitu menekankan pada usaha-usaha mandiri tanpa bantuan dengan pihak luar.
4. Strategi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menekankan bahwa masyarakat dan ekosistem disuatu wilayah harus berkembang bersama-sama menuju produktifitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi, baik segi sosial maupun ekologi.

Menurut Gaus (2001) peningkatan aspek sosial ekonomi memberikan gambaran terhadap tingkat kesejahteraan ataupun tingkat pendapatan masyarakat, jenis atau keragaman pencaharian yang ditekuni, dan upaya-upaya individu dan kelompok dalam meningkatkan kesejahterannya. Sejalan dengan hal tersebut Roucek dan Warren (1984), menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi seseorang dapat ditentukan lewat kegiatan ekonomi yang dilakukan, jumlah pendapatan yang diperoleh, jenis pendapatan yang diperoleh, jenis pekerjaan yang ditekuni, pekerjaan formal, pemilikan barang dan kepemilikan tanah.

Guna mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar bila tidak didukung oleh prasarana sosial ekonomi yang baik.

Setiap aspek kehidupan sosial ekonomi mempunyai prasarana tersendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Menurut Jayadinata J.T (1986), mengemukakan bahwa prasarana sosial ekonomi pada suatu wilayah dapat dibedakan menjadi :

1. Prasarana menurut bentuk

- a. Berbentuk ruang dan bangunan yang terbagi atas, (I) perlindungan yaitu rumah, (2) pelayanan umum yaitu prasarana kesehatan, pendidikan dan lain-lain, (iii) kebudayaan yaitu lapangan olah raga, tempat rekreasi dan lain-lain.
- b. Berbentuk jaringan yang terbagi atas (i) system pengangkutan, jaringan jalan, rute angkutan umum, dan lain-lain, (ii) utilitas umum (public utility) seperti jaringan listrik, jaringan air minum, (iii) system pengairan irigasi seperti, bendungan dan salurannya, jaringan selokan, (iv) jaringan komunikasi seperti, jaringan telepon, daya tangkap siaran tv dan lain-lain.

2. Prasarana menurut fungsi (peran), menunjukkan nilai ambang yang berarti jumlah minimal produk yang diperlukan untuk menunjang suatu fungsi prasarana sosial ekonomi agar dapat berjalan lancar. Misalnya suatu prasarana akan relative lebih tinggi fungsinya harus terletak pada

wilayah yang jangkauan pelayanannya lebih luas. Prasarana tersebut harus berfungsi untuk melancarkan perkembangan aktivitas sosial ekonomi. Menurut fungsinya prasarana dimaksud terbagi atas prasarana sosial dan prasarana ekonomi.

Selanjutnya Amien (1996), mengemukakan bahwa indikator sosial ekonomi adalah mengukur secara langsung maupun tidak langsung tingkat pemenuhan dasar manusia seperti ; keadaan perumahan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesempatan kerja dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum dan sumber-sumber informasi.

Menurut Mudrajat Kuncoro (1997), indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi ; (i) indikator ekonomi, (ii) indikator sosial.

Variabel yang termasuk dalam indikator ekonomi adalah :

- a. GNP (Gross National Product) per kapita, adalah produk nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
- b. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi perhitungan seluruh kegiatan ekonomi yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara.
- c. GDP perkapita dengan Purchasing Power Parity, adalah suatu alat konversi untuk menentukan jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa di pasar domestic yang sama dengan daya beli suatu dollar di AS.

Sedangkan yang termasuk variable sosial adalah :

- a. Indeks Mutu Hidup Physical Quality Life Index (PQLI) alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian dan tingkat melek huruf.
- b. Human Development Indeks (HDI) merupakan suatu upaya dari UNDP (United Nation Development Program) untuk melihat status pembangunan sosial ekonomi pada suatu negara secara sistematis dan komprehensif. Penyusunan ranking Human Development Indeks suatu Negara berdasarkan atas tiga tujuan atau produk pembangunan, yaitu, (i) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, (ii) pengetahuan yang diukur dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (iii) penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi local.

Bertitik tolak dari beberapa pendapat tentang fenomena sosial ekonomi sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan, tergambar bahwa variabel-variabel sosial ekonomi dalam pembangunan mempunyai dimensi yang sangat luas. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti berusaha mengadopsi beberapa variable yang diasumsikan mempunyai korelasi dengan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang berada di lokasi penelitian adalah :

1. Pengaruh sosial yang terdiri dari; (i) pendidikan dengan variable jenjang pendidikan yang ditamatkan, pandangan responden terhadap pentingnya pendidikan, (ii) derajat kesehatan dengan variable frekwensi gangguan

kesehatan, tempat pengobatan yang dikunjungi dan (iii) kondisi pemukiman dengan variable keadaan perumahan, ketersediaan air bersih.

2. Pengaruh ekonomi yang terdiri dari : (i) peningkatan pendapatan masyarakat dengan variable konversi jumlah konsumsi beras pertahun, (ii) peningkatan jumlah jenis usaha dengan variable jumlah jenis usaha, dan (iii) peningkatan jumlah investasi dengan variable keinginan untuk menabung, peningkatan luas lahan dan penambahan peralatan produksi.

F. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Strategi Pengembangannya

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Goulet (1971), paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jatidiri (self esteem), serta kebebasan (freedom) Todaro 2000.

Ketiga komponen tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kecukupan, menyangkut semua yang merupakan kebutuhan dasar (basic needs), yaitu segala sesuatu jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu diantara kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka memunculkan kondisi keterbelakangan absolut.

- b. Jatidiri, yaitu adanya dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk lebih maju. Untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa pantas dan layak melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu, atau hal-hal lain yang menyangkut pencarian jatidiri seseorang. Oleh Goulet (1971), dikatakan bahwa pembangunan itu harus diabsahkan sebagai suatu tujuan karena merupakan kunci untuk meraih sesuatu yang sangat penting, dan hal itu bukan kekayaan melainkan jatidiri.
- c. Kebebasan atau kemerdekaan disini diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini. Memiliki kebebasan berarti untuk selamanya mampu berpikir jernih untuk menilai segala sesuatu atas dasar pikiran sehat, keyakinan dan hati nurani sendiri. Konsep kebebasan manusia juga meliputi kebasan berpolitik, privasi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik dan persamaan kesempatan.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan paling tidak harus didasari pada tiga nilai inti, yakni : Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang dan papan, kesehatan, keamanan; jatidiri yaitu kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya; dan kebebasan yaitu kemampuan untuk memilih atau bebas dari sikap menghamba. Ketiga nilai inti keberhasilan pembangunan ini tidak lain merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dengan berbagai upaya untuk mencapai suatu komunitas masyarakat dalam suatu wilayah.

Menurut Amien (1996), tingkat perkembangan unit wilayah dapat diketahui dengan menggunakan beberapa indikator sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti : keadaan perumahan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesempatan kerja dan aksesibilitas ke fasilitas pelayanan umum dan sumber-sumber informasi. Pada dasarnya ada tiga sasaran pembangunan wilayah yaitu : sasaran pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan ekonomi mutlak diperlukan karena selain merupakan sasaran umum pada setiap pendekatan perencanaan pembangunan, juga merupakan syarat bagi keberhasilan pencapaian kedua sasaran pembangunan lainnya. Tanpa keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi sulit dicapai keberhasilan pembangunan sosial, demikian pula kegagalan dalam pembangunan ekonomi sering menjadi pemicu bagi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya dikatakan bahwa keberhasilan setiap program pembangunan perlu dikaji seberapa jauh program tersebut memberikan kontribusi dan mendorong laju pembangunan ekonomi dan sosial wilayah. Pembangunan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kuantitas indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, seperti PDRB, pendapatan perkapita dan sebagainya, disisi lain adanya pergeseran struktural yang mengarah pada tercapinya kondisi kehidupan ekonomi yang berkeadilan sosial. Pembangunan di bidang sosial diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan dua parameter; yaitu (i) kualitas hidup yang diukur dengan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kesempatan untuk menikmati fasilitas sosial ekonomi yang ada, (ii) kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam proses pembangunan dan mengolah sumberdaya alam, dengan parameter seperti kemudahan memperoleh informasi atau hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan perangkat produksi untuk mencapai tujuan dan standar kebutuhan dasar. (Amien, 1996)

2. Strategi Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah

Tukiyat (2002), mendefenisikan pengembangan ekonomi wilayah adalah suatu usaha mengembangkan dan meningkatkan hubungan interdependensi dan interaksi antara sistem ekonomi, sistem masyarakat/sosial, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang akan diambil haruslah bersandar pada potensi, kondisi, struktur dan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Adapun strategi yang digunakan dapat ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu strategi dari sisi permintaan, strategi sisi penawaran dan strategi pengembangan area pelayanan.

a. Strategi sisi Permintaan (Demand side strategi)

Sisi permintaan merupakan suatu strategi pengembangan ekonomi wilayah dengan berorientasi pada permintaan lokal atas barang dan jasa.

Meningkatnya permintaan akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat, dan selanjutnya mendorong pertumbuhan sektor industri barang dan jasa. Pertumbuhan industri barang dan jasa akan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga pada gilirannya proses multiplier effect ini akan mendorong pertumbuhan wilayah. Penerapan strategi sisi permintaan dapat ditempuh dalam beberapa tahap yaitu :

- i. Tahap sub - sub sistem, strategi pada tahap ini, pemerintah perlu mensubsidi kebutuhan dasar masyarakat setempat yang belum mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari hasil pengelolaan sumberdaya alamnya.
- ii. Tahap subsistem, pada kondisi ini strategi yang ditempuh adalah bagaimana mengupayakan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik dengan menggunakan sumber daya lokal melalui subsidi untuk mendorong dinamika perekonomian yang lebih kondusif.
- iii. Tahap surplus pasar (markettable surplus), pada tahap ini pengelolaan sumberdaya lokal bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tetapi sudah ada surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Adanya akses pasar akan memacu masarakat untuk membeli barang sekunder dan tersier. Strategi yang ditempuh pada kondisi ini adalah pengembangan industri berbasis bahan baku hasil pertanian.

- iv. Tahap industri pertanian. Perkembangan Industri pertanian akan dapat menaikkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani akan mendorong pertumbuhan permintaan lokal terhadap barang dan jasa. Strategi yang ditempuh pada tahap ini adalah pengembangan industri non pertanian.
- v. Tahap perkembangan industri non pertanian, dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa non pertanian, maka keragaman produk akan semakin kompleks dan semakin baik kualitasnya. Strategi pengembangan wilayah yang ditempuh pada tahap ini adalah pengembangan industri pengolahan (manufaktur).
- vi. Tahap industrialisasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan barang tersier dalam suatu wilayah, maka perkembangan sektor industri akan mengarah ke skala usaha yang lebih besar.
- vii. Tahap berkembangnya sektor jasa. Dalam tahap ini, masyarakat sudah mempunyai informasi yang merata. Dengan adanya perkembangan perekonomian yang sudah maju, maka pola-pola kehidupan masyarakat semakin kompleks. Dalam kondisi ini peranan jasa sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus informasi. Strategi yang ditempuh adalah pengembangan jaringan sistem informasi.

Pola pengembangan wilayah melalui strategi sisi permintaan pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya memerlukan transformasi teknologi, struktur kelembagaan dan perubahan pola pikir masyarakat secara dinamis. Strategi

sisi permintaan yang mengandalkan kekuatan pasar dan produk lokal, pada dasarnya merupakan suatu strategi pengembangan yang relatif stabil karena faktor-faktor eksternal pada umumnya tidak berpengaruh secara signifikan.

b. Strategi sisi penawaran (Supply side strategi)

Strategi sisi penawaran merupakan strategi pengembangan wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan penawaran komoditas tertentu yang diproses dari sumberdaya lokal. Dengan adanya kegiatan ekspor ke luar wilayah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan lokal yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

c. Strategi pengembangan area pelayanan.

Kedua strategi diatas pada dasarnya bersandar pada pengembangan sumber daya alam. Secara konseptual, bagi wilayah-wilayah miskin akan sumberdaya alam, penerapan kedua strategi tersebut akan mengalami kesulitan dan menimbulkan masalah dalam pengembangannya. Karena itu strategi lain yang bisa ditempuh suatu wilayah yang miskin sumberdaya alamnya, yakni strategi pengembangan area pelayanan. Dalam strategi ini diperlukan adanya subsidi pemerintah untuk meningkatkan location rent. Misalnya dengan dibangunnya prasarana dan sarana ekonomi, dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah itu terhadap pusat-pusat pertumbuhan atau ke fasilitas pelayanan lainnya.

Menurut Tikson (2003), makna penting dari pembangunan, baik level makro (nasional), maupun mikro (community/group), yang terjadi pada semua aspek dan level kehidupan masyarakat adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress) yaitu dapat diidentifikasi melalui adanya peningkatan dalam rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi dan efisiensi, pertumbuhan (growth) yang identik dengan kemajuan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari kenaikan produktifitas yang berkelanjutan dan diikuti diversifikasi/ diferensiasi (divercification/differentiation) yang ditandai dengan adanya keanekaragaman kegiatan perekonomian atau produk yang dihasilkan dalam suatu komunitas masyarakat.

G. Pembangunan Wilayah Pedesaan

Menurut Singh (1996), pembangunan wilayah pedesaan diartikan sebagai pembangunan pada seluruh kawasan pedesaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui suatu proses pengembangan sumberdaya alam dan manusia, teknologi, fasilitas dan lembaga organisasi yang ada di pedesaan, serta kebijaksanaan dan program pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan pedesaan juga diartikan, segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan strategi yang memungkinkan sekelompok tertentu orang miskin di pedesaan memperoleh kebutuhan hidup

bagi diri dan keluarganya atau lebih dari yang mereka butuhkan. Hal ini menyangkut pula bagaimana membantu kaum miskin untuk dapat mencari kemungkinan tambahan nafkah di daerah pedesaan (Chamber, 1988 dalam Halik, 1998).

Selanjutnya dijelaskan bahwa sasaran dari pembangunan pedesaan tersebut adalah :

- a. Ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas distribusi faktor-faktor pendukung kelangsungan hidup, seperti : makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan rasa aman.
- b. Ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan termasuk kemampuan atau daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, budaya dan kemanusiaan.
- c. Memperluas ruang lingkup pilihan-pilihan sosial dan ekonomi setiap individu dengan membebaskan mereka dari ketergantungan dan ketertekanan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pedesaan, dibutuhkan strategi pembangunan pedesaan dengan fokus diarahkan untuk menciptakan disain untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah pedesaan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan seoptimal mungkin sumberdaya lokal yang ada, hal ini diawali dari kemauan si miskin itu sendiri untuk melakukan perubahan, dengan kata lain , bahwa kunci untuk mengatasi rakyat dari kemiskinan

berada pada kekuatan rakyat itu sendiri, maka ini tidak lain berarti bahwa dengan upaya yang mengutamakan atau memberdayakan masyarakat (Latief dan Suratingsih, 1994).

Pembangunan pedesaan seharusnya lebih diarahkan pada pembangunan sektor pertanian, sebab sektor inilah yang mendominasi kegiatan perekonomian rakyat di pedesaan; (Johnson (1985). Disarankan untuk mengaplikasikan program pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk :

- a. Mengurangi atau menghilangkan kekurangan bahan pangan di berbagai pelosok pedesaan yang selama ini terus meningkat.
- b. Mengurangi ketiadaan lapangan kerja di pedesaan.
- c. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka diusulkan suatu strategi pembangunan pedesaan terpadu dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- (i). Harus mengarah pada kelompok target yaitu kaum miskin di pedesaan. (ii) Program pembangunan pedesaan terpadu diterapkan pada aspek pertumbuhan dan distribusi produksi nasional dengan mempertimbangkan faktor wilayah, yaitu memilih lokasi yang tepat, (iii) Pembangunan pedesaan harus mengutamakan kemandirian, artinya harus mengandalkan kemampuan sendiri.

Khairuddin (2000), melihat adanya perbedaan kondisi antar desa ditinjau dari aspek geografis, sosial budaya, perekonomian dan tingkat kemajuan, kondisi demikian akan mempengaruhi akselerasi perubahan kondisi yang terdapat di desa tersebut. Dengan demikian dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa perlu diadakan pendekatan yang proporsional, sehingga benar-benar sesuai dan efektif.

Beberapa alternatif pendekatan yang sering digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah ; pendekatan komprehensif, pendekatan integral, pendekatan organis, pendekatan selektif, pendekatan pertumbuhan, pendekatan ekologi, pendekatan regional dan pendekatan partisipatif.

Beberapa model pendekatan pembangunan masyarakat yang relevan dengan kondisi alam dan sosial budaya di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai antara lain :

a. Pendekatan organis

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan sumber-sumber potensial yang terdapat di wilayah bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pokok masyarakat.

b. Pendekatan regional (wilayah)

Pentingnya pendekatan regional adalah untuk menghindari terjadinya pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan terhadap daerah sekitar, dimana pembangunan itu dilaksanakan. Pengaruh tersebut dapat berupa aspek fisik, misalnya :pembangunan pabrik di hulu sungai dengan

membuang limbah ke sungai yang dapat menimbulkan pencemaran pada beberapa desa disekitarnya maupun daerah hilir yang menjadi daerah aliran sungai itu, sehingga harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan pengelola pabrik. Dengan pendekatan regional, daerah-daerah yang dilalui oleh aliran sungai tersebut harus masuk ke dalam suatu perencanaan pembangunan regionalnya dan tidak hanya memperhitungkan wilayah administrasinya saja.

Demikian halnya dengan aspek sosial budaya, dalam pembangunan fasilitas prasarana suatu daerah jelas akan memiliki pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yang dengan cepat mengubah sikap dan tata hubungan masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang menggunakan pendekatan regional, tidak hanya memikirkan perkembangan dan perubahan yang mungkin terjadi pada pusat pembangunan saja, tetapi juga melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada daerah sekitarnya, baik sebelum dan selama keberdaan serta selesainya program tersebut, sehingga perlu dimasukkan sebagai bagian dari perencanaanya.

c. Pendekatan partisipatif.

Dalam Pendekatan ini diasumsikan bahwa penduduk pedesaan adalah subyek pembangunan, sebagai sumberdaya potensial yang perlu dilibatkan dalam pembangunan. Menurut Conyers (1992), pendekatan partisipatif didasarkan pada pertimbangan :

- i. Untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat agar proses pembangunan

memiliki kemungkinan keberhasilan yang semakin besar karena faktor ketidakpastian dapat dikurangi.

- ii. Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini bukan sekedar memberikan kesan bahwa mereka diperhatikan, tetapi lebih pada membangun rasa memiliki dan mereka bagian dari suatu kebersamaan.
- iii. Merupakan suatu hak demokrasi dengan adanya keberagaman dalam komunitas masyarakat.

Pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan motivasi dari dalam diri masyarakat setempat, serta perubahan sikap mental masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan langsung. Pendekatan ini lebih mengutamakan inner construction dan jiwa manusia, maka peranan sosiopsikologis akan sangat dominan. Dengan keberhasilan pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa selanjutnya telah dapat "membentuk" dirinya sendiri dan bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan pembangunan yang ada di desanya.

Perkembangan sistem perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan dapat dilihat dari keberlanjutan usaha-usaha masyarakat yang sudah ada. Sementara itu bagi kebanyakan masyarakat pedesaan yang masih berada pada kondisi kehidupan yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (basic need), akan sangat mempengaruhi tingkat perkembangan usahanya. Kondisi ini membuat usaha masyarakat yang ada menjadi sulit berkembang, karena hasil yang diperoleh masih digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. sebagaimana Tukiyat (2002), dalam strategi sisi permintaan, kondisi masyarakat masih berada pada tahap sub-sub sistem atau sub sistem. Kondisi demikian juga berimplikasi pada rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

H. Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D)

Dalam rangka otonomi daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Pembangunan Prasarana dan sarana dasar skala pedesaan, antara lain melalui program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), atau sebelumnya dikenal program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sejak fase I – III Ta. 1995/1996 s/d TA. 2003, telah memberikan hasil-hasil yang signifikan pada peningkatan akses dari dan ke desa-desa tertinggal serta terisolasi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan kerja di pedesaan, peningkatan keterampilan masyarakat dan terjadinya pemupukan modal di pedesaan. Namun demikian selama pelaksanaan tersebut masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan, antara lain : (i) Minimnya kapasitas pemerintah kabupaten dalam memberikan masukan terhadap substansi Renstra Kecamatan; (ii) Kurangnya

komitmen pemerintah kabupaten terhadap programming atau cenderung "project oriented"; (iii) Rendahnya kapasitas instansi; (iv). Kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran P2D dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten pada umumnya; (v). Tidak adanya kerangka perencanaan wilayah kabupaten yang sifatnya operasional dan terpadu; (vi). Kurangnya keterlibatan legislatif; (vii). Minimnya ketersediaan data bagi perencanaan, dan (viii) Lemahnya dukungan/ komitmen penyediaan anggaran.

Bertolak dari pengalaman tersebut diatas, maka manajemen PKP2D melakukan upaya penyempurnaan program dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten untuk memperkuat kapasitasnya dalam mengelola pembangunan berperspektif *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*.

Misi umum Project PKP2D adalah menemu kenali model fasilitasi, dukungan dan asistensi dari pusat yang sesuai atau yang diperlukan daerah dalam penyelenggaraan P2D fase mendatang khususnya dan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat secara umum. Sedangkan misi khusus adalah membangun lembaga dan kelembagaan perencanaan prasarana atau sarana perdesaan secara partisipatif dan terpadu dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

Cakupan wilayah program ini meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten dan seluruh desa/ kelurahan di setiap kecamatan.

1. Maksud dan Tujuan pelaksanaan project PKP2D.

Project PKP2D dimaksudkan sebagai fasilitasi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal melalui forum-forum yang terpadu.

Tujuan pelaksanaan project PKP2D adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan penilaian atas kebutuhan pengembangan kapasitas dalam lingkup kabupaten dari aspek sistem, kelembagaan, dan personil terkait dengan peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- b. Menyusun tindakan yang layak untuk merespon kebutuhan yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.
- c. Menyusun data base manajemen informasi dan sistem pemantauan pada kawasan pengembangan terpilih untuk mengefektifkan pengawasan dan administrasi fungsi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan prasarana.
- d. Melatih aparat daerah untuk dapat menerapkan metode perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, pengelolaan teknis dan administratif kegiatan di wilayahnya, sesuai dengan misi yang ditetapkan.
- e. Mengembangkan suatu model aplikasi pengembangan kapasitas kelembagaan, yang bila terbukti bermanfaat dapat diterapkan pada kecamatan/ kabupaten lain di seluruh Indonesia.

2. Keluaran Pelaksanaan Program PKP2D

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan program PKP2D adalah :

- a. Perumusan misi kabupaten terkait dengan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dalam aspek sosial ekonominya.
- b. Menyusun prioritas sektor dan kawasan yang akan dikembangkan dan menetapkan kawasan strategis yang akan dipilih dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.
- c. Menetapkan rumusan program tahunan dalam kawasan terpilih, yang terintegrasi dan sinkron dalam pelaksanaannya.
- d. Menyusun Memo Program Koordinatif (MPK) yang berisi tatalaksana program antar instansi dalam kawasan tersebut.
- e. Terjadinya proses pembelajaran serta meningkatnya peran serta dan pengalaman baik masyarakat maupun aparat dalam pembangunan, khususnya pembangunan prasarana sosial ekonomi pedesaan yang dicerminkan dengan meningkatnya kemampuan kelembagaan.

3. Gambaran Umum Mekanisme Pelaksanaan Projec PKP2D

Lingkup Project PKP2D memiliki spektrum yang lebih luas, selain berorientasi pada tingkat masyarakat, pemerintah desa serta pemerintah kecamatan, level kabupaten berada dalam posisi fasilitasi atau pembinaan. Perluasan spektrum layanan dimaksud adalah berkaitan dengan : (i) . Adanya pergeseran unit atau skala perencanaan dari lingkup kecamatan di P2D ke skala kabupaten dalam PKP2D, (ii) perluasan komponen stake holder

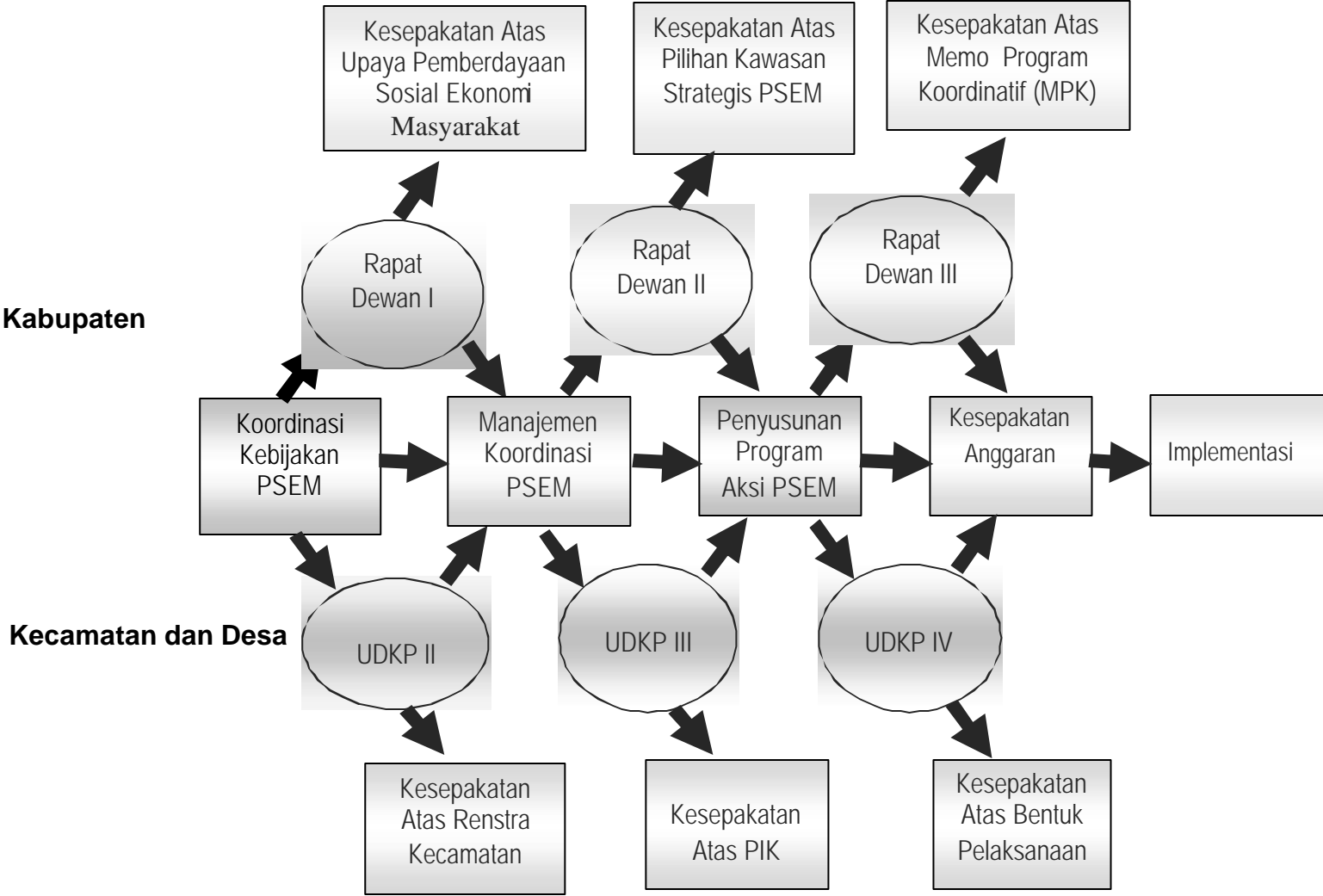
yang melekat (built-in) didalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan yang termasuk di dalam kategori pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, khususnya unsur legislatif dan potensial stake holder lainnya seperti kelompok akademis, lembaga pemberdayaan usaha mikro, lembaga riset/ perguruan tinggi, unsur media massa, dan investor daerah; dan (iii) tambahan produk atau dokumen yang dihasilkan atau disebut Memo Program Koordinatif (MPK) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam skala komprehensif kabupaten, sebagai tambahan atas Renstra Kecamatan dan Program Investasi Kecamatan (PIK).

Titik perhatian program PKP2D ini tetap kepada aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin perdesaan di wilayah kabupaten. Lokasi pelaksanaan program PKP2D berada di tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai satuan wilayah perencanaan, sedangkan pembangunan prasarananya berada dalam lingkup desa, kecamatan dan kabupaten, prasarana di wilayah desa sumber pembiayaannya dari dana JBIC yang merupakan usulan kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme program, sedang di kecamatan dan kabupaten yang menjadi prasarana pendukung dan sinergitas antar program yang menjadi usulan pemerintah kabupaten dan kecamatan melalui program dinas/sector dan hasil rakorbang dibiayai dari dana JBIC dan APBD pada lokasi kecamatan baru, sedang Kecamatan Sinjai Tengah merupakan lokasi lama (P2D) sumber dananya dari APBD sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh lembaga PSEM yang terdiri dari dinas/sector & DPRD pada Rapat Dewan III.

Secara garis besar struktur mekanisme kegiatan program PKP2D terdiri dari 2 bagian kerja yaitu : (i) Mekanisme partisipatif di tingkat desa dan kecamatan dan (ii) Mekanisme koordinatif di tingkat kabupaten.

Adapun kerangka mekanisme kegiatan program PKP2D dapat digambarkan dalam skema seperti berikut :

KERANGKA MEKANISME PROGRAM PKP2D



Gambar 1. Kerangka mekanisme program PKP2D

Mekanisme Partisipatif di Tingkat Desa dan Kecamatan

Program PKP2D di tingkat kecamatan dan desa didahului dengan (i) Sosialisasi, (ii) Penyusunan Renstra Kecamatan, (iii) Penyusunan Program Investasi Kecamatan (PIK) kemudian Kesepakatan Bentuk Pelaksanaan (KSO atau Penunjukan Langsung) .

1. Tujuan

a. Tujuan Umum, yaitu mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan.

b. Tujuan khusus yaitu :

Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola pembangunan, (ii) menciptakan lapangan kerja, (iii) memperkuat kemampuan aparat dalam memfasilitasi masyarakat dan mengelola pembangunan, (iv) menyediakan prasarana transportasi pedesaan, (v) menyediakan prasarana kesehatan dan (vi) menyediakan prasarana ekonomi produktif khususnya dalam bidang pertanian.

2. Hasil yang diharapkan

a. Tersusunnya rencana strategis (Renstra) Kecamatan selama 3 tahun dan program Investasi Kecamatan (PIK) tahunan untuk pembangunan prasarana yang mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

- b. Tersedianya prasarana yang meliputi 3 (tiga) kategori : Prasarana transportasi, Prasarana penunjang produksi dan Prasarana Air bersih dan Sanitasi.
- c. Terjadinya proses pembelajaran serta meningkatnya peran serta dan pengalaman baik masyarakat maupun aparat dalam pembangunan khususnya pembangunan prasarana sosial ekonomi pedesaan yang dicerminkan dengan meningkatnya kemampuan kelembagaan.
- d. Menciptakan lapangan kerja baik tetap maupun temporer.

3. Ruang Lingkup Program.

Ruang lingkup dan jenis kegiatan program meliputi :

- a. Kategori I : Prasarana transportasi, yaitu : jalan tanah, jalan sirtu/telford, jalan woter bound Macadam, jalan rabat beton dan perlengkapannya yaitu jembatan, gorong-gorong, saluran pembuang, halte, tembok penahan ; tambatan perahu.
- b. Kategori II : Prasarana penunjang produksi, yaitu : Jaringan irigasi meliputi : bangunan pengambil, saluran pembawa, saluran pembuang, bangunan air, jalan inspeksi, tanggul pengaman, pintu air dan embung.
- c. Kategori III : Prasarana air bersih dan kesehatan, yaitu : sumur gali/ sumur pompa tangan, penangkap mata air, penampung air hujan, pengolahan air permukaan, instalasi pengolahan air sederhana, hidran umum dan MCK.

4. Pendekatan, Prinsip Pengelolaan dan Pola pelaksanaan.

- a. Pendekatan Program PKP2D merupakan program pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, pengintegrasian pembangunan wilayah terpadu dengan penempatan kecamatan sebagai sentral. Pendekatan program sesuai azas, Dari, oleh dan Untuk masyarakat (DOUM)
- b. Keberpihakan kepada kaum miskin, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil, diutamakan kepada penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- d. Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
- e. Keswadayaan, yaitu kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- f. Keterpaduan pembangunan, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan pembangunan yang lain.

5. Prinsip pengelolaan.

Prinsip dalam pengelolaan program PKP2D yaitu :

- a. Acceptable, semua proses pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah, sehingga memperoleh dukungan semua lapisan masyarakat.
- b. Transparant, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat
- c. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat
- d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

6. Pola Pelaksanaan.

Sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada suatu daerah, dimana pada satu pihak, masyarakat telah cukup mampu dan dipihak lain masyarakat belum mampu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan prasarana, maka pelaksanaan program PKP2D dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

- a. Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana yang dilakukan masyarakat melalui wadah Organisasi masyarakat Setempat (OMS) bekerjasama dengan kontraktor.

- b. Pelaksanaan Langsung (PL), yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui wadah OMS.

7. Tahap dan periode pelaksanaan

Tahap dan periode pelaksanaan program PKP2D ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun anggaran dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Persiapan Awal (T-1/TA. 2003) adalah tahap perencanaan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pada tahun anggaran 2003. Pada tahap ini terdiri dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kecamatan yang merupakan penentuan strategi dan prioritas pembangunan wilayah kecamatan, penyusunan program investasi Kecamatan (PIK) yang merupakan penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana tahunan, serta penyusunan desain teknis dan RAB prasarana yang akan dibangun pada tahun pertama (T/TA. 2004).
- b. Tahun I (T/TA. 2004) adalah tahap pelaksanaan pembangunan prasarana tahun pertama yang desain teknis dan RABnya telah dibuat pada tahun sebelumnya (T-1/TA.2003)
- c. Ada beberapa kegiatan penting yang merupakan bagian dari tahap pelaksanaan tersebut diatas, yaitu :
 - o Pada tahap perencanaan (T-1) Ta.2003, dilaksanakan diskusi UDKP yang merupakan forum kesepakatan antar pelaksana program PKP2D atas hasil kegiatan, yakni :

- Pada tahap perencanaan (T-1) Ta.2003, dilaksanakan diskusi UDKP yang merupakan forum kesepakatan antar pelaksana program PKP2D atas hasil kegiatan, yakni :
- UDKP-1, Sosialisasi dan Kesepakatan Kerja
- UDKP-2, Kesepakatan atas Renstra Kecamatan
- UDKP-3, Kesepakatan atas Program Investasi Kecamatan (PIK)
- UDKP-4, Kesepakatan atas bentuk pelaksanaan tahun berikutnya (KSO atau Penunjukan langsung).
- Pada pelaksanaan fisik setiap tahunnya, diakhiri dengan : Serah terima program dari pemerintah kepada masyarakat setempat, Pemanfaatan, melalui pengorganisian, pengoperasian dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana oleh masyarakat desa setempat
- Studi Evaluasi. pelaksanaan program PKP2D akan dilakukan studi secara mendalam oleh Lembaga Perguruan tinggi setempat atau LSM

Mekanisme Koordinatif di Tingkat Kabupaten

Mekanisme proses kegiatan program PKP2D dilakukan dengan menerapkan pola penanganan bertingkat yang saling terkait dan disesuaikan dengan variasi kondisi dan kebutuhan yang dihadapi. Pada intinya pengelolaan project PKP2D dilakukan dengan menerapkan manajemen fleksibel melalui adanya pembagian tingkatan dalam aspek pengelolaan kegiatan dengan aspek subyek yang dikelolanya.

Sedangkan prinsip pelaksanaan yang dijalankan harus tetap mengikuti paradigma pembangunan yang saat ini dianut, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan kesinambungan.

Secara garis besar mekanisme kegiatan PKP2D yang dikembangkan dapat diuraikan berdasarkan tahapan pokok kegiatannya sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi kebijakan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM)

Kegiatan pada tahap ini diawali dengan lokakarya PSEM kabupaten yang diharapkan dapat diperoleh suatu komitmen bersama untuk merealisasikan upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten. Pada tahap ini juga dilakukan perumusan visi misi kabupaten, baik secara umum maupun khusus, terkait Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM). Sasaran utama pada tahap ini diharapkan dapat dicapai **Kesepakatan Upaya PSEM** dalam **Rapat Dewan-I** di kabupaten. Selanjutnya seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penyusunan Daftar Prioritas Program Sektor dan Kawasan Pengembangan PSEM dengan masukan” arahan Kebijakan Pengembangan Lintas Daerah dan Sektor” dari kegiatan Propinsi.

Hal terpenting dalam tahapan ini adalah sasaran upaya PSEM yang dihasilkan adalah merupakan masukan utama untuk ”Kajian Profil Kecamatan” pada proses penyusunan Renstra Kecamatan.

b. Tahap Manajemen Koordinasi PSEM

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan perumusan Misi PSEM Kabupaten dalam jangka Menengah (MJM-PM). Integrasi kawasan strategis dan jenis sektor PSEM, Fungsi dan peran kabupaten dalam kerangka

propinsi, profil eksisting kabupaten, Analisis potensi dan kendala kawasan strategis PSEM (KSPM), serta profil KSPM terpilih. Sasaran utama kegiatan pada tahap ini diharapkan dapat dicapai ***Kesepakatan atas Pilihan KSPM*** dalam ***Rapat Dewan-II*** di kabupaten juga adalah menerima masukan dari hasil Renstra Kecamatan.

c. Tahap Penyusunan Program Aksi PSEM

Pada tahap ini, diawali dengan kegiatan penjabaran kegiatan tahunan KSPM, dukungan alokasi tahunan program daerah, kaitan usulan kegiatan P2D, serta rumusan usulan kegiatan tahunan dan tahun pertama KSPM. Sasaran utama pada tahapan ini diharapkan dapat dicapai ***kesepakatan atas MPK*** pada ***Rapat Dewan – III***. Pada rapat tersebut diharapkan dapat dihasilkan 2 keluaran yaitu : (i) pemahaman yang baik dan komprehensif atas visi, misi PSEM dan program Aksi Tahunan PSEM, (ii) Komitmen Dewan terhadap program aksi tahunan pertama berikut implikasi alokasi volume dan nilai pembiayaannya.

I. Kerangka Fikir

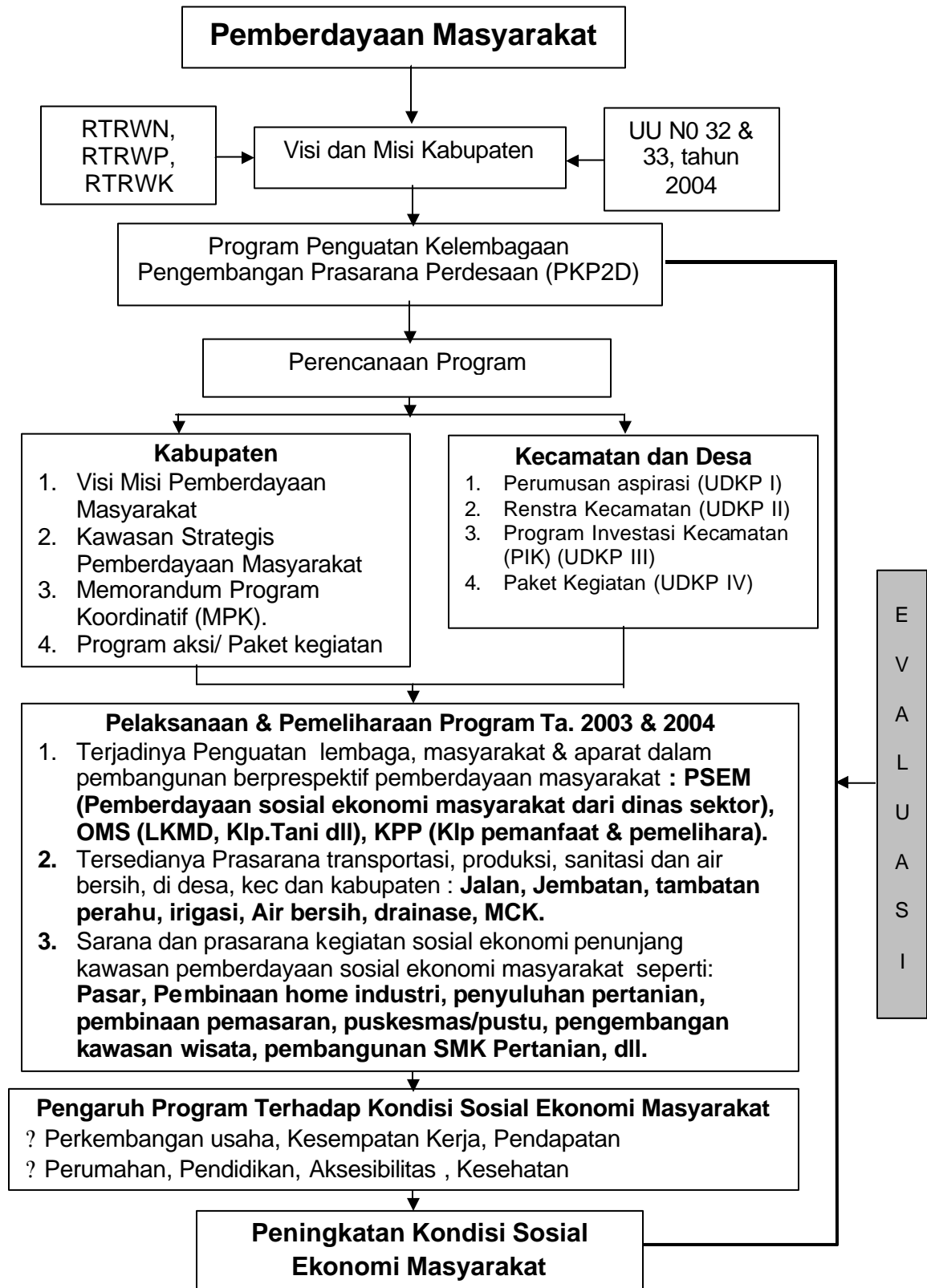
Secara umum hakekat pembangunan adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial dan budaya, secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan menunjang secara nasional, serta manusia pada umumnya, yang berkeadilan, demokratis, serta berwawasan lingkungan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum

dapat diimplementasikan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penerapan strategi pembangunan di negara berkembang selalu mengabaikan masalah pemerataan. Pemerintah cenderung untuk memburu tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya tanpa pernah menganalisa bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kesenjangan pendapatan, pengeksploitasian sumber daya alam dan lain-lain.

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di daerah dan pedesaan adalah bantuan program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan ketersediaan prasarana infrastruktur yang berperspektif pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan dan dirumuskan bersama oleh seluruh stake holder (masyarakat, pemda, legislatif, LSM, Perguruan Tinggi, wartawan, kalangan swasta dll).

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dengan lokasi penelitian pada 6 (enam) desa diantara 11 (desa) yang ada di kecamatan Sinjai Tengah. Pembatasan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tenaga, waktu dan biaya sedang pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan keterwakilan terhadap desa yang memiliki karakter wilayah dan masyarakat, budaya lokal, bidang usaha masyarakat, potensi SDA, SDM, dan topografi yang hampir sama, sehingga diharapkan tetap dapat memberi informasi secara komprehensif mengenai Evaluasi Program PKP2D terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah.

B. Jenis Penelitian

Melihat permasalahan dan tujuan penelitian maka Jenis penelitian ini termasuk deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, obyektif, cermat dan akurat mengenai fenomena tertentu berupa fakta, keadaan, sifat suatu individu atau kelompok masyarakat dan lembaga sosial dan ekonomi secara mendasar tentang sebuah akibat terhadap suatu fenomena, dengan menganalisa hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan pengumpulan dan pengamatan, yang dalam pelaksanaannya melalui survey dengan menggunakan kuesioner/ angket atau wawancara langsung sebagai pengumpulan data dan informasi (Singarimbun dan Effendi, 1989).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai yang berdomisili di Kelurahan Samaenre, Desa Saotanre, Desa Saotengnga, Desa Bonto, Desa Pattongko dan Desa Mattunreng Tellue dengan jumlah penduduk 13.809 jiwa yang terdiri atas 3.520 Kepala keluarga

2. Sampel

Dari 6 Desa/ Kelurahan (yaitu Kel. Samaenre, Desa Saotanre, Desa Saotengnga, Desa Bonto, Desa Pattongko dan Desa Mattunreng Tellue) di Kecamatan Sinjai Tengah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, maka yang dijadikan subyek sampel penelitian adalah Kepala Keluarga (KK) di masing-masing desa/kelurahan tersebut.

Menurut Arikunto (2002), apabila jumlah populasi lebih dari 100, maka besarnya populasi dapat diambil antara 10-15 % atau lebih, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, luas wilayah dan tingkat resiko dan pertimbangan waktu dan tingkat kualitas/akurasi data maka jumlah sample dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 200 orang Kepala keluarga.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang dibedakan menurut sumbernya :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan aspek kehidupan sosial ekonomi melalui daftar pertanyaan terstruktur dan wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh lembaga maupun instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara observasi ke lokasi penelitian. Teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara, teknik ini merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui cara berkomunikasi secara langsung (tatap muka) dengan subyek penelitian (sumbernya). Sasaran yang hendak dicapai dengan teknik ini adalah untuk menjaring informasi secara langsung dengan masyarakat maupun stake holder dan pihak terkait lainnya.
2. Kuesioner (angket), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat maupun stake holder dan lembaga terkait lainnya. Kuesioner ini berisi pertanyaan tentang identitas responden dan variabel penelitian untuk mencari informasi yang lengkap dari permasalahan yang dibahas. Sasaran yang diharapkan adalah

menghasilkan jawaban responden yang terstruktur untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut untuk membuktikan hipotesis penelitian.

3. Observasi, Teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, dengan melihat dan mencermati langsung terhadap kondisi fisik sosial ekonomi dan aktifitas masyarakat secara seksama kepada obyek yang diteliti.
4. Teknik dokumentasi, Teknik ini digunakan untuk memperoleh sejumlah data melalui dokumen tertulis tentang hal-hal yang relevan yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penulisan ini.
5. Sasaran yang hendak dicapai adalah menghasilkan data tentang karakteristik responden yang diteliti.

F. Analisis Data

Pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka data dan informasi yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah melalui prosedur sebagai berikut :

Pengolahan secara manual dengan melakukan : Editing atau memeriksa data penelitian untuk menemukan adanya kesalahan atau kekuranglengkapan data yang diisi oleh responden. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian dibuat dalam tabulasi menurut keperluan dan kepentingan analisis yang berisi gambaran terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program PKP2D berdasarkan tujuan

program dengan hasil yang dicapai dengan analisis kualitatif, yaitu memberi interpretasi terhadap tabel-tabel frekwensi kemudian memberikan penafsiran terhadap hasil analisis tersebut.

2. Komparative dua sampel yang berkorelasi yaitu merupakan perbandingan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program. Pengujiannya dilakukan dengan Test Mc Nemar dengan rancangan penelitian berbentuk "bifore - after" dengan data berbentuk nominal/ diskrit (Sugiyona, 2003). Untuk menguji signifikansi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, data perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperoleh disusun ke dalam tabel segi empat ABCD sebagai berikut :

Tabel Bifore - after dari MC Nemar :

Kondisi sebelum program/program	Kondisi sesudah program/program	
	-	+
+	A	B
-	C	D

Tanda (+) dan (-) sekedar digunakan untuk menandai jawaban yang berbeda. Kasus yang menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dalam sel A dan D. Seorang responden dicatat dalam sel A jika berubah dari (+) ke kurang (-) dan dicatat pad sel D jika ia berubah dari (-) ke (+). Jika tidak terjadi perubahan yang diobservasi yang berbentuk (+) dia dicatat di sel B, dan dicatat di sel C bila tidak terjadi perubahan yang diobservasi berbentuk (-). Dengan demikian A adalah jumlah yang mengalami perubahan dari (+) menjadi (-), dan D adalah jumlah yang

mengalami perubahan dari (-) menjadi (+), sedang C dan B adalah jumlah yang tidak berubah.

Test Mc Nemar berdistribusi Chi kuadrat (X^2), karena itu untuk pengujian hipotesis digunakan rumus Chi kuadrat, dalam hal ini dengan koreksi kontinuitas (Yates, 1934), sehingga rumusnya menjadi :

$$X^2 = \frac{(IA-DI - 1)^2}{A + D} \quad \text{dengan dk} = 1 \dots\dots\dots(3.1)$$

Selanjutnya pengujian dilakukan untuk masing-masing indikator dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. yakni: perkembangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan, perumahan, pendidikan, aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian terhadap variabel yang diteliti, berikut ini dikemukakan pengertian dan indikator dari variabel-variabel tersebut :

- ? **Evaluasi** adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengukur dan menilai secara obyektif hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.
- ? **Penguatan kapasitas** adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat dan stake holder baik secara individu maupun lembaga dalam mengelola pembangunan berperspektif pemberdayaan masyarakat.
 - a. Meningkat, jika masyarakat, aparat dan stake holder baik secara secara individu maupun lembaga meningkat kemampuannya dan

dapat mengelola pembangunan berperspektif pemberdayaan masyarakat secara benar dan mandiri.

- b. Tidak meningkat, jika jika masyarakat, aparat dan stake holder baik secara secara individu maupun lembaga belum mampu mengelola pembangunan berperspektif pemberdayaan masyarakat secara benar dan mandiri.
 - c. **Sosial ekonomi masyarakat** adalah perubahan kondisi kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh keadaan perumahan, pendapatan, pendidikan ,aksesibilitas , kesehatan, perkembangan usaha, kesempatan kerja dan pendapatan sebelum dan setelah selainya program.
 - a. Meningkat, jika kondisi kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh keadaan perumahan, pendapatan, pendidikan ,aksesibilitas , kesehatan, perkembangan usaha, kesempatan kerja dan pendapatan setelah selainya program menjadi lebih baik.
 - b. Tidak meningkat, jika kondisi kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh keadaan perumahan, pendapatan, pendidikan ,aksesibilitas , kesehatan, perkembangan usaha, kesempatan kerja dan pendapatan setelah selainya program sama saja atau bahkan menurun..
- ? **Persepsi masyarakat** yaitu pandangan atau tanggapan responden berkaitan dengan pelaksanaan program PKP2D.
1. Setuju
 2. Kurang setuju
 3. Tidak setuju
- ? **Kondisi perumahan.** adalah kondisi fisik bangunan rumah tempat tinggal responden (baik rumah panggung maupun rumah batu) , sebelum dan sesudah program; dengan kategori :
- a. Baik, jika rumah permanent dan memiliki MCK serta ruang yang cukup

- b. Buruk, jika rumah non permanent/darurat dan tidak memiliki MCK serta ruang yang cukup
- ? **Pendidikan**, adalah jenjang pendidikan formal yang pernah dicapai oleh responden, maupun anggota keluarganya dengan kategori :
- a. Tinggi, jika memperoleh pendidikan lebih tinggi atau sama dengan SLTA/ sederajat
 - b. Sedang, jika memperoleh pendidikan lebih tinggi atau sama dengan SLTP/ sederajat
 - c. Rendah, jika memperoleh pendidikan lebih rendah SD atau sama dengan SD/ sederajat.
- ? **Akseibilitas** adalah tanggapan masyarakat atas kenyamanan berkendara dan kemudahan dalam mendapatkan sarana transportasi dalam melakukan suatu perjalanan keluar dan didalam wilayahnya atau untuk mengangkut hasil dan memasarkan hasil produksi.
- a. Baik, jika masyarakat mudah mendapatkan sarana transportasi untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi dan bepergian ke luar maupun dalam wilayahnya.
 - b. Kurang, jika masyarakat sulit dalam mendapatkan sarana transportasi untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi dan bepergian ke luar dan didalam wilayahnya.
- ? **Derajat kesehatan** adalah kondisi kesehatan responden dan anggota keluarganya, dengan kategori :
- a. Baik, jarang/ jika tidak mengalami sakit = 2 x /thn
 - b. Buruk, jika sering sakit > 2 x /thn
- ? **Tingkat perkembangan usaha**, adalah kondisi yang menyatakan total volume usaha responden baik yang ada hubungannya dengan

pembangunan prasarana maupun penguatan masyarakat akibat pendampingan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh aparat maupun konsultan terhadap pekerjaan pokok maupun sampingan sebelum dan sesudah program, baik sumber penghasilan pokok maupun usaha sampingan berupa lahan usaha (ha), jumlah modal usaha (dalam rupiah). Dalam hal ini, total volume usaha dikonversikan ke dalam nilai rupiah dengan kategori :

- a. Besar, jika volume usaha = Rp. 30 juta.
- b. Kecil, jika < 30 juta.

? **Kesempatan kerja**, adalah peluang kerja yang tersedia yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat secara tetap maupun tidak tetap selama berlangsungnya pelaksanaan pembangunan prasarana oleh program atau pengaruh keberadaan prasarana sehingga menunjang peningkatan usaha sosial ekonomi masyarakat, baik usaha pokok maupun usaha sampingan, sebelum dan sesudah program; dengan kategori .:

- a. Ada, jika terbuka lapangan kerja baik secara tetap maupun tidak tetap.
- b. Tidak ada, jika tidak terbuka lapangan kerja baik tetap maupun tidak tetap.

? **Tingkat pendapatan**, adalah total penerimaan atau penghasilan keluarga yang diperoleh responden baik suami/istri atau anak yang belum berkeluarga yang diperoleh dari pekerjaan pokok atau sampingan dalam sebulan, sebelum dan sesudah adanya program, dengan kategori :

- b. Tinggi, jika > Rp. 900.000,-/bln (UMR Kab. Sinjai).
- c. Rendah, jika total = 900.000,-/bln (UMP Kab. Sinjai)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Sinjai dalam Tata Ruang Sulawesi Selatan

Kabupaten kota dalam menyusun rencana tata ruang wilayahnya hendaknya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan Nasional agar substansi strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Propinsi dan Nasional .

Strategi penataan ruang wilayah propinsi memusatkan perhatian pada upaya peningkatan laju pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi dengan tetap memperhatikan upaya pemerataan antar wilayah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan potensi dan kendala pembangunan yang dihadapi dengan berorientasi pada pola pembangunan yang berwawasan lingkungan yang menjamin terciptanya proses pembangunan berkelanjutan.

Upaya pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi dititik beratkan pada beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan struktur PDRB Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan menciptakan dan memperkuat daya saing dari komoditas (barang atau jasa) yang dihasilkan oleh setiap kawasan.

Strategi pengembangan dan pembangunan wilayah propinsi Sulawesi Selatan dalam garis-garis Besar Haluan Daerah (GBHD) adalah penerapan sistem wilayah (regionalisasi) pembangunan berdasarkan keterkaitan budaya antar wilayah kabupaten, kesamaan potensi dan permasalahan kabupaten dan letak geografis kabupaten.

Dalam RTRW Propinsi, kabupaten Sinjai masuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) bagian timur merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan komoditas agro industri, pertanian lahan basah, jasa peternakan, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, pemukiman, industri rumah tangga dan perdagangan.

Berdasarkan misi kawasan yang di embannya maka kabupaten Sinjai harus lebih didorong agar kebijakan pembangunan yang dilaksanakan menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai sektor andalan yang diharapkan dapat lebih memperluas lapangan kerja yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sinjai.

Pada sektor tanaman pangan, kabupaten Sinjai memiliki komoditas kacang tanah, ubi jalar dan jagung. Sedangkan di sektor perikanan produksi perikanan darat khususnya air payau dan perikanan laut sebagai sektor andalan. Pada sektor pariwisata kabupaten Sinjai memiliki potensi yang beraneka ragam seperti wisata budaya (adat Karampuang), lingkungan/ekologi (hutan mangrove dan hutan pinus), sejarah (Benteng Balangnipa, Taman Batupake Gojeng) wisata agro (kebun rambutan, durian

montong), penelitian (hutan mangrove) dan pendidikan (benteng Balangnipa dan Taman Batupake Gojeng) dan rekreasi alam seperti permandian air panas, air terjun, hamparan sawah dan taman laut di pulau sembilan. Selain itu kabupaten sinjai juga memiliki potensi perkebunan yang cukup handal seperti kakao, cengkeh, lada, vanili, tembakau, dan kopi.

Potensi sektor ekonomi primer ini merupakan aset bagi pembangunan ekonomi kabupaten sinjai kedepan jika dikelola dan dikembangkan secara optimal dan bijaksana dalam kerangka pembangunan wilayah secara berkelanjutan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

2. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 27 Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan, dengan jarak kurang lebih 223 km dari Kota Makassar. dengan luas 819,97 Km², terbagi atas 9 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 80 buah.

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5° 19' 30" sampai 5° 36' 47 " Lintang Selatan dan antara 119° 48' 30" sampai 120° 20' 00" BujurTimur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Secara morfologi kabupaten Sinjai terletak pada bagian timur Gunung Lompobattang terdiri lebih dari 55,5 % medan yang berbukit, bergelombang sampai bergunung. Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur, dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai bulan Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April.

Secara ekonomi, daerah ini dihubungkan dengan jalur perhubungan darat ke Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi melalui tiga jalur ke arah selatan melalui Kabupaten Bulukumba dan ke arah Barat melalui Kabupaten Gowa dan Kab Maros, sedangkan melalui laut daerah ini mempunyai posisi penting bagi suplai untuk beberapa daerah di Propinsi Sulawesi tenggara,

Tabel 2. Luas Wilayah, Jarak Ke Kota Kabupaten dan Jumlah Penduduk (BPS, Sinjai dalam Angka, 2007)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sinjai Barat	135,53	43	22.928
2	Sinjai Borong	66,97	43	16.918
3	Sinjai Selatan	131,99	27	35.846
4	Tellu Limpoe	147,30	38	31.681
5	Sinjai Timur	71,88	4	28.485
6	Sinjai Tengah	129,70	12	24.630
7	Sinjai Utara	29,57	0	38.011
8	Bulupoddo	99,47	18	16.032
9	Pulau Sembilan	7,55	13	7.689
Kabupaten Sinjai		819,96		222.220

a. Hirarki Kecamatan dalam Kabupaten

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Sinjai meliputi 9 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 80 wilayah desa/kelurahan dengan luas wilayah 819,96 Km² dengan nama kecamatan sebagai berikut : Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Utara, Kec Bulupoddo, dan Kec. Pulau-Pulau IX.

Peran dan kedudukan kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Sinjai dalam hirarki wilayah-wilayah pembangunan adalah :

1. Kecamatan Sinjai Barat, berpotensi untuk pengembangan peternakan sapi perah, perkebunan dan kehutanan, pertanian, perikanan darat dan wisata alam.
2. Kecamatan Borong, berpotensi untuk pengembangan peternakan sapi potong, perkebunan, wisata alam, dan perikanan darat.
3. Kecamatan Sinjai Selatan, berpotensi untuk pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman pangan serta pengembangan kawasan buah-buahan.
4. Kecamatan Tellu Limpoe, berpotensi untuk pengembangan Perkebunan, pengembangan sapi potong dan kambing, serta kawasan buah-buahan.
5. Kecamatan Sinjai Timur, berpotensi untuk pengembangan perikanan laut, perkebunan, wisata alam, dan kawasan pengembangan palawija.
6. Kecamatan Sinjai Tengah, berpotensi untuk pengembangan kehutanan khususnya hutan pinus, pengembangan kawasan buah-buahan, peternakan ayam buras.

7. Kecamatan Sinjai Utara, berpotensi untuk pengembangan sentra industri dan jasa, kawasan pengembangan palawija, perikanan dan wisata.
8. Kecamatan Bulupoddo, berpotensi untuk pengembangan perkebunan, pertanian, peternakan kambing, kawasan pengembangan palawija, kehutanan khususnya pohon pinus dan wisata budaya..
9. Kecamatan Pulau-Pulau IX, berpotensi untuk pengembangan perikanan laut dan wisata bahari.

Untuk lebih jelasnya, potensi pengembangan dari setiap kecamatan tersebut diatas dapat dilihat pada label -tabel berikut ini :

Kondisi Eksisting Sosial Ekonomi Masyarakat

- Keunggulan Sosial Ekonomi Masyarakat Sinjai adalah :
 - a. Jumlah penduduk yang cukup besar
 - b. Beberapa jenis komoditas, merupakan komoditas bernilai ekspor
 - c. Potensi sumber daya laut dan pengelolaan 4 mil wilayah laut diserahkan pada pemerintah daerah
 - d. Tersedianya pelabuhan pelayaran rakyat
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana sosial
 - f. Obyek wisata bahari dan lainnya
 - g. Jumlah kewirausahaan (perdagangan) yang relatif tinggi
- **Kelemahan Sosial Ekonomi Masyarakat Sinjai adalah :**
 - a. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan relatif masih rendah yang berakibat lemahnya posisi kontrol dari masyarakat.

- b. Pemahaman tentang paradigma baru pemerintahan dan gerakan reformasi masih sangat bervariasi, baik dari sisi masyarakat maupun pihak pemerintah.
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal informasi pembangunan dibandingkan informasi hiburan yang disiarkan melalui media elektronik
- d. Terjadinya pergeseran perilaku masyarakat dengan kurang mengapresiasi pelestarian budaya lokal/tradisional dan berorientasi pada budaya barat
- e. Dukungan sistem kelembagaan masyarakat masih sangat rendah dalam menopang dan menunjang ekonomi kerakyatan.

b. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Eksisting

Visi dan Misi Kabupaten

Visi dan Misi Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tertuang pada Renstra (2001-2004) dan Propeda (2001-2005) yaitu :

- Visi kabupaten Sinjai

" Meningkatkan harkat hidup masyarakat yang maju dan berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan masyarakat sulawesi selatan "

- Misi Kabupaten Sinjai

1. Membina dan mengembangkan kehidupan agraris
2. Meraih keunggulan dengan berbasis pada pertanian rakyat
3. Mewujudkan masyarakat tani yang mandiri
4. Meningkatkan dukungan fasilitas pemerintah daerah yang otonom

c. Penetapan Ikrar PSEM serta Visi dan Misi PSEM Kabupaten :

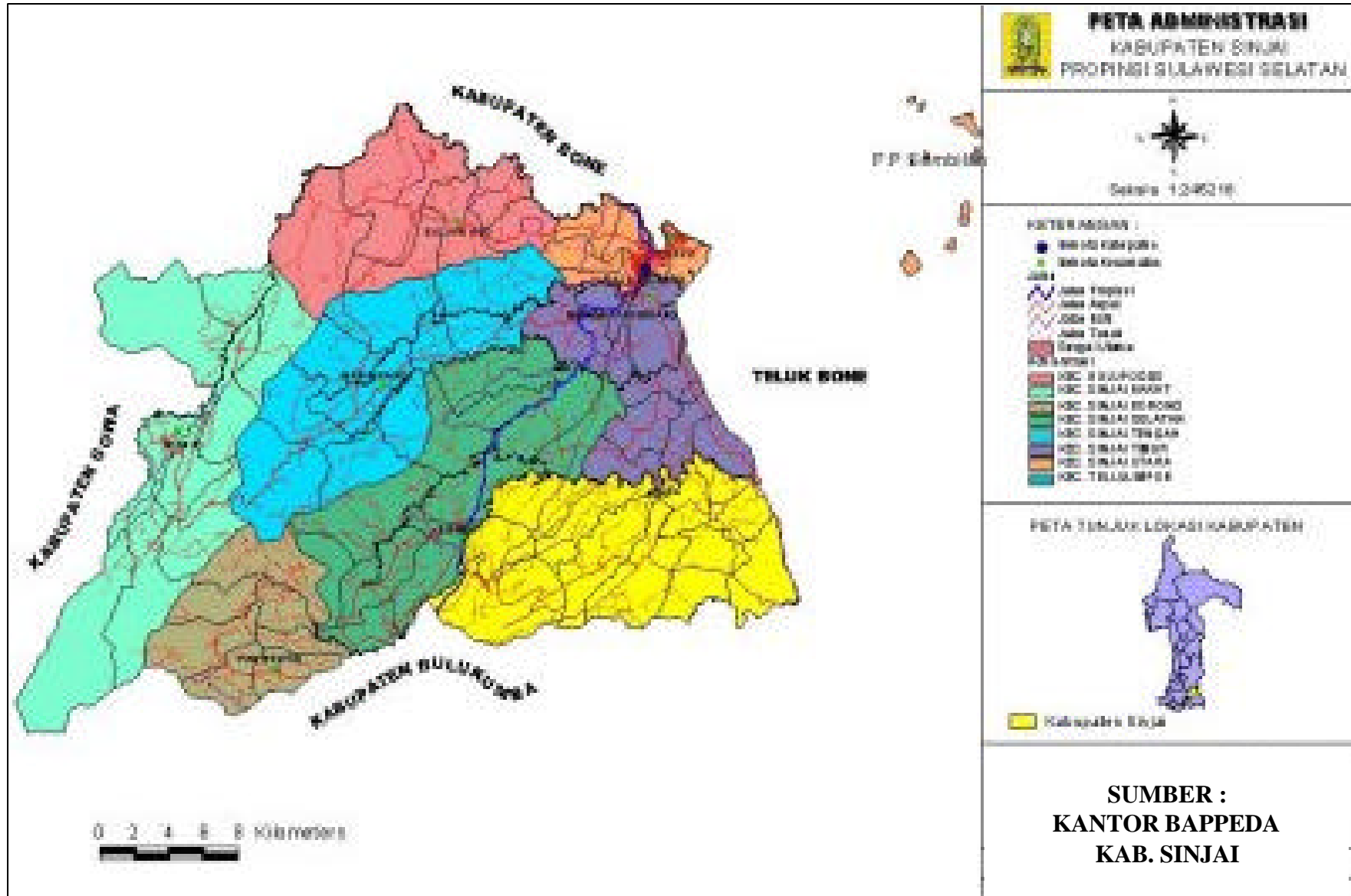
Ikrar PSEM dirumuskan, sebagai berikut :

1. Mengembangkan sosial ekonomi masyarakat berbasis pertanian melalui perencanaan partisipatif dan transparan yang didukung oleh pelayanan yang profesional
2. Meningkatkan kemampuan dan kelembagaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meraih keuntungan melalui pengembangan potensi lokal
3. Meningkatkan koordinasi dan transparansi melalui kerja sama informal untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis

VISI PSEM KABUPATEN SINJAI : Unggul dan mandiri berbasis potensi lokal

MISI PSEM KABUPATEN SINJAI :

1. Membina dan mengembangkan kehidupan agraris
2. Meraih keunggulan dengan berbasis pada pertanian rakyat
3. Mewujudkan masyarakat tani yang mandiri
4. Meningkatkan koordinasi dalam kerjasama informal menuju pencapaian transparansi atas dukungan fasilitas pemerintah daerah yang otonom
5. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang didukung pelayanan yang profesional
6. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan pemukiman yang berwawasan lingkungan
7. Memberdayakan dan mengembangkan sosial kerakyatan dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.



3. Gambaran Singkat Kecamatan Sinjai Tengah

Kecamatan Sinjai Tengah yang ibukotanya di kelurahan Samaenre, memiliki wilayah yang strategis karena letaknya pada bagian tengah wilayah kabupaten sehingga menjadi sentral atau dekat dengan seluruh kecamatan lainnya yang secara ekonomi dan sosial sangat menguntungkan. Sinjai Tengah memiliki wilayah cukup luas sebesar 129,70 km², merupakan wilayah ke 4 terbesar dari wilayah kabupaten Sinjai atau ± 16 % dari luas wilayah kab. Sinjai, terdiri dari 11 desa/ kelurahan. Desa dengan wilayah administrasi terluas adalah desa Saohiring yaitu 16,30 km² (atau 12,57 % dari luas wilayah kecamatan), sedangkan desa dengan luas wilayah paling kecil adalah desa Kanrung yaitu 6,18 km² (4,76 %). Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada desa Pattongko (3.413 jiwa), sedangkan desa dengan penduduk paling sedikit adalah desa Bonto (1.372 jiwa). Kepadatan penduduk rata-rata kecamatan adalah 206 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi di desa Kanrung 460 jiwa/km², Sedangkan kepadatan terendah di desa Saotanre 114 jiwa/km². Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemeritaan penduduk di kecamatan Sinjai Tengah sangat bervariasi dan sebagaimana fenomena wilayah pada umumnya, makin jauh dari pusat kota dan pemerintahan, tingkat kepadatan makin rendah. (Tabel 3)

Tabel 3. Nama, luas wilayah dan penyebaran penduduk menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah (BPS, Sinjai Tengah Dalam Angka 2007)

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase luas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Kompong	14,23	10,97	2,095	147
2	Gantarang	14,20	10,95	1.664	117
3	Saotanre	13,85	10,68	1.581	114
4	Baru	10,54	8,13	1.704	162
5	Saotengnga	11,45	8,83	2.705	236
6	Pattongko	13.85	10,68	3.413	246
7	Bonto	7,44	5,74	1.372	184
8	Saohiring	16,30	12,57	2.513	154
9	Kanrung	6,18	4,76	2.845	460
10	Samaenre	8,67	6.68	2.132	246
11	Mattunreng 3e	12,99	10,02	2.606	201
Jumlah		129,70	100,00	24.630	206

Secara geografis, Kecamatan Sinjai Tengah terletak pada bagian tengah kabupaten Sinjai dengan batas-batas wilayah yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Bulupoddo;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Timur
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Selatan

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Barat dan Kecamatan Sinjai Borong

Rata-rata sex ratio kecamatan sebesar 98 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan, sex rasio tertinggi terdapat di desa Bonto yaitu 118, dan terendah di desa Saotengnga sebesar 83. Total jumlah kepala keluarga di Kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 6.144 dan kepadatan rata-rata penduduk per kepala keluarga tingkat kecamatan adalah 4 orang/KK. Kepadatan tertinggi terdapat di desa Gantarang yaitu 5 orang/KK. Dari data pada tabel 4 dan 5 menunjukkan perbandingan laju populasi antara penduduk laki-laki dan perempuan berimbang dan tingkat jumlah anggota keluarga termasuk kelompok sedang. (Tabel 4 dan Tabel 5).

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio menurut desa di kecamatan Sinjai Tengah (BPS, Sinjai Tengah dalam angka , 2007)

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	Sex Ratio
1	Kompong	1.059	1.036	2,095	108
2	Gantarang	860	804	1.664	107
3	Saotanre	772	809	1.581	95
4	Baru	825	879	1.704	94
5	Saotengnga	1.307	1.398	2.705	93
6	Pattongko	1.667	1.746	3.413	95
7	Bonto	742	630	1.372	118
8	Saohiring	1.248	1.265	2.513	99
9	Kanrung	1.403	1.442	2.845	97

10	Samaenre	1.056	1.076	2.132	98
11	Mattunreng Tellue	1.225	1.381	2.606	89
Jumlah		12.194	12.436	24.630	98

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga/ Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga untuk Tiap Rumah Tangga menurut desa di Kecamatan Sinjai Tengah (BPS Sinjai Tengah dalam angka, 2007)

No	Desa	Rumah Tangga	Kepala Keluarga	Anggota kel/KK	Penduduk
1	Kompang	489	493	4	2,095
2	Gantarang	309	330	5	1.664
3	Saotanre	373	393	4	1.581
4	Baru	429	462	4	1.704
5	Saotengnga	639	655	4	2.705
6	Pattongko	797	880	4	3.413
7	Bonto	341	363	4	1.372
8	Saohiring	572	600	4	2.513
9	Kanrung	697	739	4	2.845
10	Samaenre	524	563	4	2.132
11	Mattunreng Tellue	588	666	4	2.606
Jumlah		5.738	6.144	4	24.630

1. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sinjai Tengah

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah secara umum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang digambarkan sebagai berikut :

1. Komposisi Umur dan Angkatan Kerja

Jumlah usia kerja produktif (penduduk berumur antara 15 – 64 tahun) yang berjumlah 15.493 jiwa atau sebesar 63 % dari seluruh jumlah penduduk dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian yaitu sebesar 89 %. Besarnya jumlah usia produktif memberikan gambaran bahwa potensi pengembangan sumber daya manusia bila didukung dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang baik akan memberikan sumbangan yang berarti bagi percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah, seperti terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Penduduk menurut kelompok Umur di Kecamatan Sinjai Tengah (BPS ,Sinjai Tengah dalam angka, 2007)

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00 - 04	1.473	1.250	2.723
2	05 - 09	1.229	1.126	2.355
3	10 - 14	1.394	1.356	2.750
4	15 - 19	1.262	1.267	2.529
5	20 - 24	1.129	1.210	2.339
6	25 - 29	1.127	1.166	2.293
7	30 – 34	859	899	1.758
8	35 – 39	757	776	1.523
9	40 – 44	655	730	1.385
10	45 – 49	526	580	1.106
11	50 - 54	461	542	1.003
12	55 – 59	418	469	887

13	60 – 64	298	362	660
14	65 =	576	733	1.309
Jumlah		12.164	12.466	24.630

2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Sinjai Tengah sumber kehidupan mereka dominan masih mengandalkan pada sektor pertanian dan peternakan yakni diantara 11.276 masyarakat yang bekerja sebanyak 7.802 kepala keluarga (79 %) masih bekerja pada sektor pertanian diikuti oleh sektor peternakan sebanyak 2.193 (19,45 %). Sedang di sektor jasa hanya 86 orang (0,76 %), sedang pegawai negeri maupun swasta 369 (3,27 %) dan dari 369 pegawai tersebut, 326 diantaranya adalah pegawai negeri, ini berarti bahwa masyarakat Sinjai Tengah tingkat pendidikannya belum begitu baik dengan keterampilan yang masih rendah, hal ini terindikasi dengan masih rendahnya sektor jasa yang baru mencapai 0,76 %, demikian pula dari jumlah pegawai lebih 90 % merupakan pegawai negeri dan hanya 10 % sebagai swasta.

Tabel 7. Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Sinjai Tengah (BPS, Sinjai Tengah Dalam Angka 2007)

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian tanaman pangan	3.640	32,28
2	Perkebunan	4.162	36,91
3	Peternakan	2.193	19,45
4	Perdagangan	413	3,66
5	Industri	307	2,72

6	Pertambangan	14	0,12
7	Jasa angkutan	92	0,82
8	Pegawai (PNS/Swasta)	369	3,27
9	Jasa lain	86	0,76
Jumlah		11.276	100,00

3. Sarana dan Prasarana

Menurut Jayadinata J.T , Setiap aspek kehidupan sosial ekonomi mempunyai prasarana tersendiri, yang merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Guna mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi, prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar bila tidak didukung oleh prasarana sosial ekonomi yang baik.

a. Prasarana Transportasi dan Produksi

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu wilayah maka peran infrastruktur sangat penting, semakin baik prasarana transportasi maka waktu tempuh dan volume hasil produksi yang dapat diangkut akan lebih besar sehingga biaya angkut akan lebih kecil, demikian pula berkurangnya waktu tempuh memungkinkan seseorang dapat melakukan suatu kegiatan produktif lainnya pada satuan waktu yang sama sebelum kondisi jalan itu masih buruk. Hal yang sama pada prasarana produksi seperti irigasi desa, yaitu dengan dibangunnya irigasi maka suatu lahan yang sebelumnya hanya dapat digarap sekali setahun, maka memungkinkan bisa digarap 2 sampai 3 kali dalam setahun yang tentunya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Dari data yang ada

menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana transportasi dan produksi menunjukkan trend yang baik dimana rata-rata diatas 70 % kondisinya baik, kecuali jalan tanah perlu perhatian khusus dalam memeliharanya dan dilakukan secara partisipatif dari masyarakat. Dari seluruh prasarana yang ada masyarakat perlu menjaga dan memeliharanya agar pemanfaatannya dapat dinikmati secara berkelanjutan untuk menunjang kelancaran usaha sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 8. Ketersediaan Prasarana Jalan, Jembatan dan irigasi di Kecamatan Sinjai Tengah (Bappeda ,Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan, 2007)

NO	Desa	Terbangun	Kondisi(%)		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jembatan	15 buah (199,50) m	96	4	-
2	Jalan Aspal	136,58 km	83	9	8
3	Jalan Perkerasan	37,75 km	77	19	4
4	Jalan Tanah	16 km	48	15	37
5	Irigasi	2 ,4 km	89	6	5

b. Kesehatan dan Air Bersih

Pembangunan kesehatan dilakukan dengan memberikan prioritas pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pencegahan penyakit. Upaya perbaikan dan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana kesehatan seperti rumaha sakit, puskesmas, posyandu dll, sedang pencegahan dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan fakotr-

faktor yang berpengaruh yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Upaya mengantisipasi dan menanggulangnya dilakukan oleh petugas kesehatan maupun masyarakat yang sudah mengerti tentang pentingnya kesehatan.

Dari data yang ada menunjukkan bahwa rumah sakit belum ada di kecamatan Sinjai tengah dan hanya ada 2 puskesmas. Dari data tersebut menunjukkan setiap puskesmas/pustu rata-rata melayani penduduk sebesar 2.214 jiwa, dan setiap dokter /para medis melayani sebanyak 902 orang, mengingat derajat kesehatan masyarakat selama ini masih tergolong baik sehingga dengan kondisi prasarana dan tenaga medis yang ada masih dianggap mampu memberikan pelayanan yang baik.

Tabel 9. Ketersediaan Prasarana dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sinjai Tengah (BPS ,Sinjai Tengah dalam Angka, 2007)

No	Desa	Penduduk (jiwa)	Rumah sakit/ pustu/ Puskesmas	Polindes/ Posyandu	Dokter	Para medis
1	Kompany	2,095	1	2	-	2
2	Gantarang	1.664	1	2	-	1
3	Saotanre	1.581	1	3	-	1
4	Baru	1.704	1	4	-	1
5	Saotengnga	2.705	1	4	2	7
6	Pattongko	3.413	1	4	-	2
7	Bonto	1.372	1	4	-	1
8	Saohiring	2.513	1	4	-	1
9	Kanrung	2.845	1	6	-	1
10	Samaenre	2.132	1	6	2	5

11	Mattunreng Tellue	2.606	1	6	-	1
	Jumlah	24.630	11	37	4	23

2. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Dari 11 desa yang menjadi wilayah Kecamatan Sinjai Tengah 6 desa diantaranya merupakan lokasi penelitian yaitu : Desa Mattunreng Tellue, Kelurahan Samaenre, Desa Saotengnga, Desa Bonto, Desa Saotanre dan Desa Pattongko. Adapun kondisi lokasi dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut :

a. Desa Mattunreng Tellue

Desa Mattunreng Tellue merupakan desa yang berjarak 18 km dari kota Sinjai (ibukota kabupaten) dan 5 km dari ibukota kecamatan Sinjai Tengah. Kondisi jalan yang menghubungkan desa ini dengan kota kabupaten maupun kecamatan sudah beraspal. Jumlah penduduknya sebanyak 2.606 jiwa dengan luas wilayah 12,99 km². Mata pencaharian masyarakat dominan petani dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga tingkat pendapatannya juga tergolong rendah. Kendala utama penyebab keterbelakangan ini disebabkan minimnya prasarana transportasi dan kondisinya umumnya masih jalan tanah, bahkan desa ini sebelum adanya program PKP2D termasuk kategori desa tertinggal.

b. Kelurahan Samaenre

Kelurahan Samaenre merupakan ibukota kecamatan yang berpusat di Lappadata. Jarak kota ini ke ibukota kabupaten sejauh 13 km yang

dihubungkan jalan aspal dengan kondisi baik. Jalur jalan ini merupakan jalan propinsi yang menghubungkan kota kabupaten dengan kota propinsi pada arah barat melalui kabupaten Gowa. Sebagai pusat pemerintahan kecamatan Sinjai Tengah, Kelurahan Samaenre berpenduduk 2.132 jiwa dengan luas wilayah 8,67 km². Masyarakat di kelurahan ini umumnya masih berpendidikan SD atau lebih rendah dan bekerja disektor pertanian.

c. Desa Saotengnga

Desa Saotengnga terletak pada bagian Barat kota kecamatan Sinjai Tengah yang berjarak 11 km dari kota kecamatan dan 24 km dari ibukota kabupaten. Desa ini berpenduduk 2.705 jiwa yang merupakan penduduk terbesar ke 2 di kecamatan Sinjai Tengah dengan luas wilayah sebesar 11,45 km². Mata pencaharian penduduk masih dominan pada sektor pertanian dengan tingkat pendidikan masih tergolong rendah. Dari hasil wawancara masyarakat menunjukkan bahwa umumnya kebutuhan masyarakat yang dirasakan adalah prasarana dan sarana penunjang baik prasarana transportasi maupun prasarana produksi, selain itu permasalahan yang dihadapi petani adalah menurunnya hasil panen seperti pada komoditi padi dan kakao akibat hama, harga vanili jauh menurun dari tahun 2000 s/d 2004 yang sempat mencapai diatas satu juta perkilogram kering, sekarang ini hanya puluhan ribu saja membuat petani meniggalkan komoditi ini karena disamping harganya yang sangat jatuh, sistem penangannyapun tergolong rumit.

d. Desa Saotanre

Desa Saotanre terletak pada bagian barat Timur kecamatan Sinjai Tengah berjarak 14 km dari kota kecamatan dengan jalan beraspal, dan berjarak 27 km dari pusat kota kabupaten. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 1.581 jiwa dengan luas wilayah 13,85 km². Seperti halnya desa lainnya, mata pencaharian penduduk dominan di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hambatan utama yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan sosial ekonominya adalah sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi dan produksi.

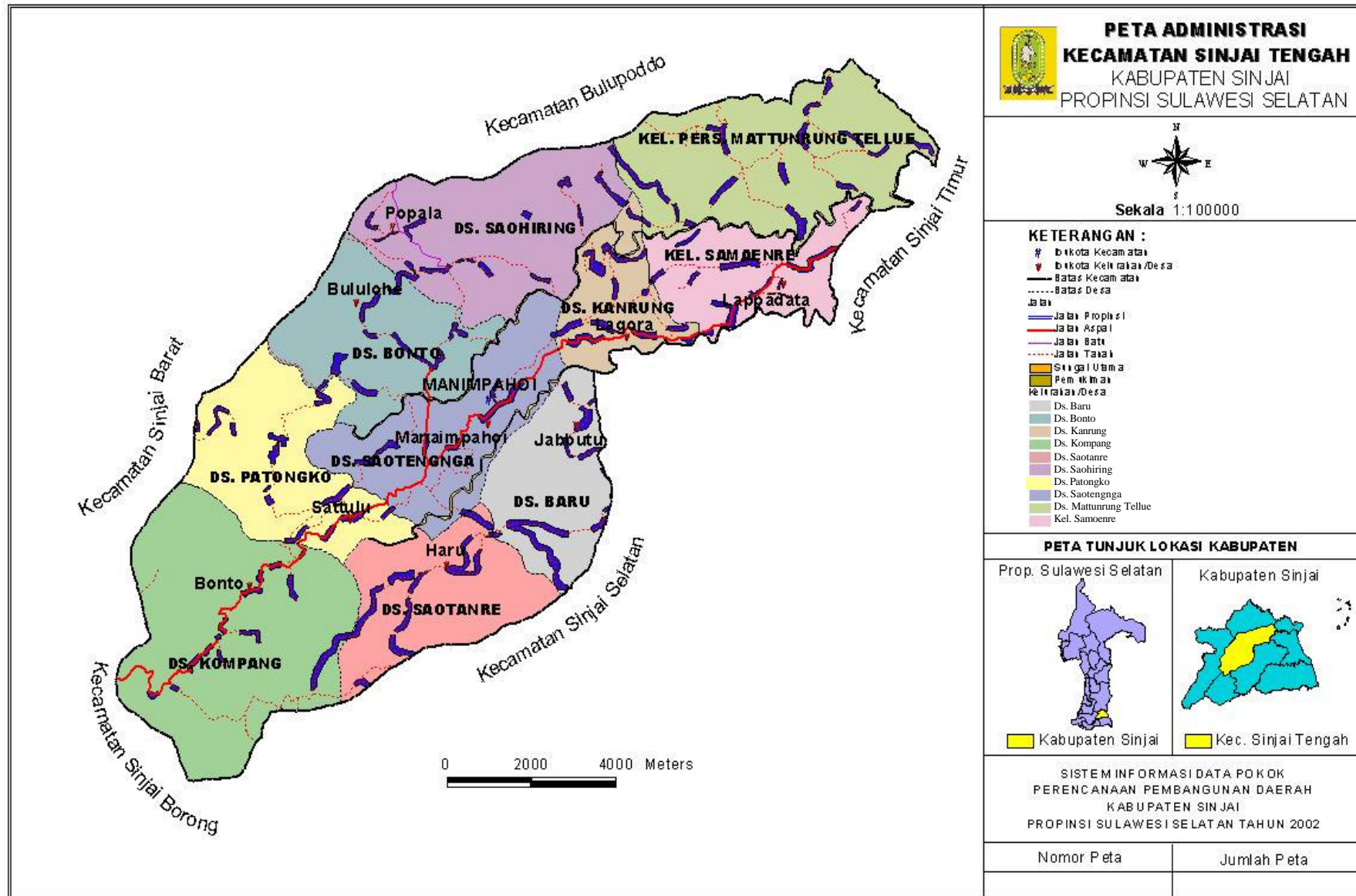
e. Desa Bonto

Desa Bonto terletak pada bagian barat kecamatan Sinjai Tengah berjarak 13 km dari kota kecamatan dengan jalan beraspal hot mix sepanjang 10 km dan 1 km sisanya berupa jalan aspal penetrasi, jarak dari pusat kota kabupaten 26 km, Sebagian besar jalan ke desa ini merupakan lanjutan dari jalur jalan menuju desa Saotengnga. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 1.372 jiwa dengan luas wilayah 7,44 km². Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan bekerja disektor pertanian. Desa ini sebelum adanya program PKP2D juga termasuk kategori desa tertinggal.

f. Desa Pattongko

Desa Pattongko merupakan desa yang terletak pada bagian barat kecamatan Sinjai Tengah berjarak 15 km dari kota kecamatan dengan jalan beraspal yang merupakan jalan propinsi dan merupakan lanjutan dari desa Saotengnga, desa ini berjarak 28 km dari pusat kota kabupaten. Jumlah penduduknya sebanyak 3.413 jiwa yang merupakan penduduk desa terbesar di kecamatan Sinjai Tengah dengan luas wilayah 13,85 km². Penduduk desa

ini dominan bekerja disektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kendala utama yang dirasakan masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha sosial ekonominya adalah ketersediaan prasarana dan sarana produksi, penurunan hasil produksi akibat hama pada komoditi kakao dan harga bagi komoditi vanili.



B. Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan di Kecamatan Sinjai Tengah

Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) di Kabupaten Sinjai yang berlokasi di kecamatan Sinjai Tengah pada tahun anggaran 2003 dan 2004, terdiri dari tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana. Perencanaan outpunya berupa Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan Program Investasi Kecamatan (PIK) di tingkat kecamatan, sedang di tingkat kabupaten berupa Memorandum Program Koordinatif (MPK). Penyusunan Renstra dan PIK dimaksudkan sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam program pembangunan di desa sebagai kebutuhan masyarakat yang telah diintegrasikan dengan program sektoral di kabupaten dan kecamatan, sedang Program Koordinatif dimaksudkan sebagai pendukung optimalisasi kawasan strategis yang telah dipilih dan ditetapkan dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang mengacu pada visi dan misi yang telah disepakati pada rapat Dewan I. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan di desa dan kecamatan seluruhnya dilakukan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh aparat dan konsultan sebagaimana azas yang dianut yaitu DOUM (Dari, Oleh dan untuk masyarakat). Sedang perencanaan di kabupaten dilakukan oleh lembaga Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM) yang pembentukannya difasilitasi oleh tim koordinasi kabupaten dan konsultan. Adapun anggota kepengurusan dari PSEM adalah wakil dari masing-masing

dinas/sektor dan unsur lain seperti unsur akademisi, pers, dan DPRD II). Lokasi pelaksanaan kegiatan dari MPK ini bisa di desa, kecamatan maupun kabupaten yang berorientasi untuk pengembangan secara internal di wilayah kabupaten dan antar wilayah kabupaten serta membuka peluang pihak luar untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas dasar saling menguntungkan

Kegiatan ini sumber pendanaannya dari bantuan Japan Bank Internatonal Cooperation (JBIC) dan APBD. Dari JBIC membiayai untuk prasarana dasar yang terdiri dari 3 kategori yaitu : (i) Transportasi (jalan perkerasan, jembatan, tambatan perahu), (ii) Penunjang produksi (irigasi desa) (iii) Air bersih dan kesehatan (sumur gali, perpipaan penampung air hujan dan sebagainya dan MCK serta drainase), Sedang dana APBD digunakan untuk keperluan pembiayaan yang lebih besar dari ke tiga kategori tersebut dan program penunjang lainnya dalam rangka peningkatan sosial ekonomi masyarakat.

Jumlah alokasi dana dari JBIC tiap kecamatan Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) pertahun perkecamatan, sedang jumlah dana APBD tidak terbatas dan disesuaikan kemampuan kabupaten. Yang terpenting dari penyertaan dana APBD adalah kebijakan dan dukungan komitmen akan visi, misi tujuan dan sasaran Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat (PSEM) sesuai hasil rumusan dan kesepakatan bersama.

1. Perencanaan

Mekanisme Koordinatif di Tingkat Kabupaten

Mekanisme proses kegiatan program PKP2D dilakukan dengan menerapkan pola penanganan bertingkat yang saling terkait dan disesuaikan dengan variasi kondisi dan kebutuhan yang dihadapi dengan menerapkan manajemen fleksibel melalui pembagian tingkatan dalam aspek pengelolaan kegiatan dengan subyek yang dikelolanya.

Sedangkan prinsip pelaksanaan yang dijalankan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan kesinambungan.

Secara garis besar mekanisme kegiatan program diuraikan berdasarkan tahapan pokok kegiatannya sebagai berikut :

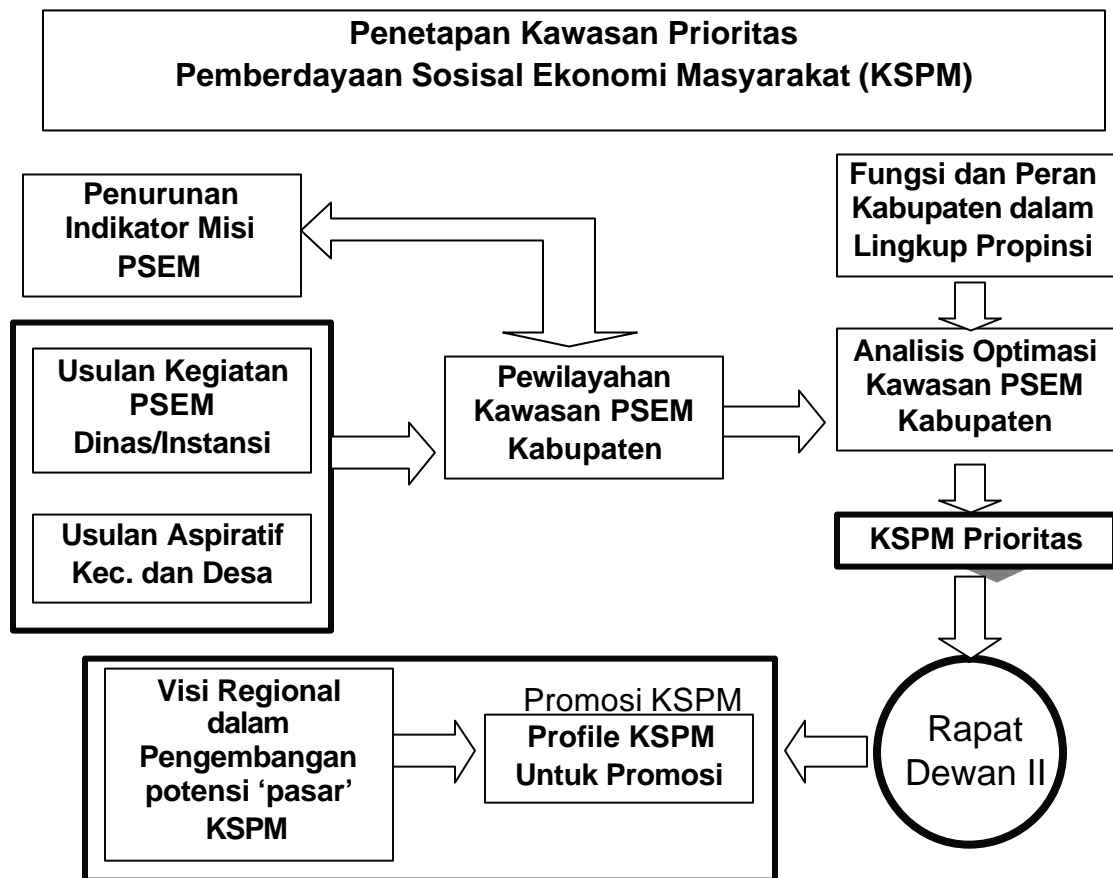
a. Tahap Formulasi kebijakan PSEM

Kegiatan diawali dengan lokakarya PSEM kabupaten yang bertujuan untuk memperoleh suatu komitmen bersama untuk merealisasikan upaya pemberdayaan masyarakat di kabupaten sekaligus perumusan visi misi kabupaten, baik secara umum maupun khusus, terkait Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM). Sasaran utama kegiatan ini adalah tercapainya **Kesepakatan Upaya PSEM** dalam **Rapat Dewan-I** di kabupaten. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penyusunan Daftar Prioritas Program Sektor dan Kawasan Pengembangan PSEM dengan masukan” arahan Kebijakan Pengembangan Lintas Daerah dan Sektor” dari kegiatan Propinsi.

Hal terpenting dalam tahapan ini adalah sasaran upaya PSEM yang dihasilkan adalah merupakan masukan utama untuk "Kajian Profil Kecamatan" pada proses penyusunan Renstra Kecamatan.

b. Tahap Manajemen Koordinasi PSEM

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan perumusan Misi PSEM kabupaten dalam jangka Menengah (MJM-PM). Integrasi kawasan strategis dan jenis sektor PSEM, Fungsi dan peran kabupaten dalam kerangka propinsi, profil eksisting kabupaten, Analisis potensi dan kendala kawasan strategis PSEM (KSPM), serta profil KSPM terpilih. Sasaran utama kegiatan pada tahap ini diharapkan dapat dicapai ***Kesepakatan atas Pilihan KSPM*** dalam ***Rapat Dewan-II*** di kabupaten juga adalah menerima masukan dari hasil Renstra Kecamatan. Skema pelaksanaan sebagai berikut :



Gambar 3. Penetapan Kawasan Prioritas Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (KSPM)

c. Tahap Penyusunan Program Aksi PSEM

Pada tahap ini, diawali dengan kegiatan penjabaran kegiatan tahunan KSPM, dukungan alokasi tahunan program daerah, kaitan usulan kegiatan Kecamatan dan desa, serta rumusan usulan kegiatan tahunan dan tahun pertama KSPM. Sasaran utama pada tahapan ini diharapkan dapat dicapai **kesepakatan atas MPK** pada **Rapat Dewan – III**. Pada rapat tersebut diharapkan dapat dihasilkan 2 keluaran yaitu : (i) pemahaman yang baik dan

komprehensif atas visi, misi PSEM dan program Aksi Tahunan PSEM, (ii) Komitmen Dewan terhadap program aksi tahunan pertama berikut implikasi alokasi volume dan nilai pembiayaannya.

Mekanisme Partisipatif di Tingkat Kecamatan dan Desa

Tingkat Kecamatan.

a. Pembentukan pokja kecamatan

Karena program PKP2D ini adalah lanjutan dari program P2D, maka pokja kecamatan tidak dibentuk lagi hanya dilakukan evaluasi kinerja terhadap personil yang kurang aktif dan dinilai kinerja kurang dilakukan penggantian.

b. Sosialisasi Program PKP2D (UDKP-1)

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di kecamatan dalam forum UDKP-1. Dalam sosialisasi ini konsepsi dan pendekatan untuk pertamakalinya dilakukan kepada masyarakat. Dalam pertemuan UDKP-1 tersebut dibahas tentang pemahaman atas Program PKP2D serta kesepakatan rencana pelaksanaan kerja terkait mekanismenya.

c. Penyusunan potensi wilayah kecamatan

Karena dalam program P2D telah dilakukan penyusunan potensi sebagai bahan masukan terhadap kebijakan dalam penyusunan renstra, maka pada kegiatan ini sisa dilakukan evaluasi efektifitas renstra terhadap realisasi kegiatan yang terdapat dalam renstra tersebut.

d. Pembentukan Kelompok Diskusi Sektor (KDS).

Sebagaimana penyusunan potensi kecamatan, pembentukan KDS tidak dilakukan lagi hanya dilakukan penguatan terhadap kelompok yang sudah ada berupa pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi KDS dalam penyusunan usulan kegiatan dan penajaman pemahaman sistem analisis swot. Pertimbangan dalam pembentukan KDS adalah : i) jenis kegiatan sektor yang dipandang dominan dalam wilayah kecamatan, ii) Jenis kegiatan sektor yang mempunyai potensi unggulan untuk berkembang, iii) Jenis kegiatan yang mencakup kepentingan kelompok wanita dan kelompok minor lainnya, iv) Jenis kegiatan yang menonjol dari suatu desa seperti : kelompok pemilik lahan berdasarkan luasnya, kelompok petani beririgasi teknis, dll, sehingga keluarannya mencerminkan indikasi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat .

e. Pembahasan dan kesepakatan RENSTRA Kecamatan (UDKP-2)

Pokja Kecamatan bersama TTL menyusun daftar "long-list" usulan kegiatan kecamatan, yang kemudian dianalisis dengan metode skoring prioritas sehingga muncul indikasi usulan kegiatan dalam bentuk " Short-List". Setelah Dokumen RENSTRA Kecamatan tersebut selesai dibuat, selanjutnya dalam forum rapat UDKP-2. Renstra tersebut dibahas untuk mendapat tanggapan dan masukan untuk dilakukan perbaikan sebelum disepakati sebagai dokumen Renstra. Pelaksanaan kesepakatan Renstra

dihadiri oleh wakil pokja kabupaten, pokja kecamatan, KDS, desa dan anggota masyarakat yang terkait.

f. Pembahasan dan Kesepakatan Program Investasi Kecamatan (PIK pada UDKP-3)

Pokja Kecamatan bersama TTL melakukan proses penyusunan Program Investasi Prasarana Kecamatan (PIK) dengan cara membantu menganalisis manfaat, biaya serta dampak setiap usulan kegiatan terhadap perkembangan pengembangan kecamatan serta analisa kelayakan dan sinkronisasinya dengan program-program lain dalam wilayah kecamatan. Dalam dokumen PIK ini diuraikan mengenai : rincian investasi tahunan (3 tahunan) dan usulan kegiatan tahun pertama.

Kemudian dalam rapat UDKP=3, dokumen PIK ini dibahas untuk disepakati bersama oleh aparat dan masyarakat.

g. Konfirmasi Kemampuan OMS

Atas dasar analisis kemampuan OMS, pokja kecamatan melakukan konfirmasi atas hasil analisis kemampuan OMS tersebut. Hasil koordinasi ini dijadikan masukan dalam penyusunan Desain Teknis dan RAB terkait penetapan porsi KSO atau Penunjukan langsung.

h. Pembahasan dan kesepakatan Bentuk Pelaksanaan Kegiatan (UDKP-4)

Dalam rangka pelaksanaan fisik, perlu ditentukan bentuk pelaksanaan yaitu Kerjasama Operasional (KSO) antara rekanan/kontraktor dengan OMS atau Penunjukan Langsung (PL) dengan catatan pekerjaan yang

dapat dilakukan Penunjukan langsung adalah nilai paket = 50 juta sesuai Kepress 80, Untuk pemilahan kegiatan ini KMT-Kab dibantu TTL.

Penentuan bentuk pelaksanaan masing-masing paket tersebut dibahas dan disepakati dalam forum UDKP-4 yang dihadiri camat, konsultan, OMS, Pokja Kecamatan, wakil masyarakat dan pihak lain yang dianggap perlu.

- i. Program PKP2D di tingkat kecamatan dan desa didahului dengan (i) Sosialisasi, (ii) Penyusunan Renstra Kecamatan, (iii) Penyusunan Program Investasi Kecamatan (PIK) kemudian Kesepakatan Bentuk Pelaksanaan (KSO atau Penunjukan Langsung) .

Tingkat Desa

a. Penilaian Awal Kebutuhan Desa

Pokja Kecamatan bersama TTL melakukan penilaian awal kebutuhan desa yang akan menjadi masukan dalam penentuan jenis hampan. Hasil dari kegiatan ini antara lain : i Ringkasan situasi kondisi dan awal kebutuhan masyarakat pada desa-desa yang tercakup dalam wilayah kecamatan. ii) Potensi pengembangan desa, iii) Kondisi lembaga masyarakat yang ada, iv) Gambaran Tokoh masyarakat dan kebutuhan calon fasilitator desa (FD).

b. Peview dan Pelatihan Fasilitator Desa

Review Fasilitator Desa (FD), dilakukan oleh Pokja Kecamatan dan Fasilitator Kecamatan atas dasar usulan masyarakat. Kriteria FD : usia antara 25-45 tahun, minimal pendidikan SD, Pengalaman berorganisasi

dalam masyarakat, simpatik dan cukup mempunyai pengaruh dalam masyarakat, penduduk desa setempat dan bukan PNS.

Di tiap kecamatan maksimal 10 FD dan diusahakan agar kelompok ini ada wanitanya, kelompok ini dilatih oleh TTL dan Pokja Kecamatan

c. Analisis Kebutuhan Prasarana dan Perumusan Usulan Desa

Analisis kebutuhan prasarana dilakukan untuk menyusun suatu usulan dan prioritas kegiatan yang didasarkan atas aspirasi kebutuhan masyarakat lokal. Setelah aspirasi kebutuhan tersebut dikaji di dalam KDS kemudian dirumuskan usulan kegiatan desa sebagai masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan.

d. Sosialisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan

Kepala desa, OMS, FD, anggota KDS dan tokoh masyarakat menyebarluaskan gagasan dan isi mengenai RENSTRA ini kepada anggota masyarakat lainnya dalam pertemuan-pertemuan resmi atau tidak resmi dalam lingkungan desanya .

e. Pembahasan Dampak Usulan Kegiatan

Setelah diperoleh hasil analisis kelayakan usulan kegiatan, maka seluruh wakil KDS bersama FD membahas dampak usulan kegiatan terkait dengan prioritas kebutuhan desa/KDS. Pokja kecamatan bersama TTL membantu proses ini, sehingga aspirasi masyarakat desa dapat terwakili dalam kegiatan pembahasan dampak usulan kegiatan ini.

f. Sosialisasi Program Investasi (PIK) Kecamatan

Kepala Desa, OMS, KDS, FD, Tokoh masyarakat yang telah mengikuti forum UDKP-3 ini menyampaikan informasi mengenai PIK kepada anggota masyarakat lainnya dalam kesempatan pertemuan baik resmi atau tidak resmi, atau dapat juga melalui lembaran-lembaran informasi yang ditempel di papan pengumuman balai desa dan lokasi lain yang mudah dicapai atau dilihat masyarakat desa.

g. Investigasi Teknis dan Kemampuan Organisasi masyarakat Setempat (OMS)

Setelah kesepakatan PIK dilakukan investigasi teknis usulan kegiatan untuk Tahun Pertama. Investigasi Teknis ini meliputi kegiatan survey perencanaan teknis, identifikasi potensi SDA dan SDM dalam desa terkait sehubungan dengan pelaksanaan usulan kegiatannya.

Selanjutnya Pokja kecamatan bersama TTL melakukan analisis kemampuan OMS baik dari segi teknis, manajerial maupun finansial.

h. Sosialisasi Bentuk Pelaksanaan Kegiatan

Kesepakatan bentuk pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan dalam forum UDKP-4, disebarkan oleh kepala Desa, FD, OMS, tokoh masyarakat kepada seluruh warga.

2. Pelaksanaan

Jumlah alokasi dana pelaksanaan program PKP2D di tiap kecamatan yang disediakan program dari sumber dana JBIC sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah). Kecamatan Sinjai Tengah

pada tahun anggaran 2003 menerima dana sebesar Rp. 1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) bersumber dari dana Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan dapat menjangkau 10 desa, sedang pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari dana APBD berupa dukungan terhadap program Pemberdayaan sosial Ekonomi Masyarakat (PSEM) dan hanya mampu menjangkau 5 desa.

Pelaksanaan program PKP2D dilakukan dengan 2 (dua) pola yaitu : Pola KSO untuk paket yang besarnya diatas 50 juta (Kepres 80, tahun 2002) sedang paket 50 juta ke bawah dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Selain pertimbangan Kepres saat itu, dianggap masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan diantaranya, kemampuan finansial, teknis, pengalaman dalam mengelola proyek dan keterbatasan peralatan, maka pada keadaan ini masyarakat dibantu oleh pihak lain sebagai pendamping yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) oleh badan usaha/perusahaan pemenang lelang di tingkat kabupaten sebagaimana proyek pada umumnya.

Adapun lokasi proyek program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di kecamatan Sinjai Tengah, digambarkan seperti pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil pembangunan prasarana program PKP2D Ta. 2003 & 2004 di Kecamatan sinjai Tengah Pelaksanaan Program PKP2D Tahun anggaran 2003 & 2004

Jenis Prasarana	Lokasi Desa/Kel	Vol.	Biaya (Rp x1.000)	Pelaksana	Tahun
1	2	3	4	6	7
Jemb. kayu	Samaenre	33 m	121.812	CV. Usaha baru KSO LKMD	2003
Jalan telford	Saohiring	1.150 m	74.154	CV. Putra Bungsu	2003
Jalan telford	Baru	1.650 m	113.314	CV. R' Perkasa KSO LKMD	2003
Jalan telford	Kanrung	1.290 m	85.309	CV.Putra M.hoi KSO LKMD	2003
Jembatan Beton	Saotanre	15 m	132.162	CV.Fitra Bahari KSO Klp.Tani	2003
Jalan telford	Mattunreng Tellue	1.250 m	90.928	CV.Sinar Bulupoddo	2003
Jalan telford	M. Tellue	830 m	49.816	LKMD	2003
Jalan telford	M. Tellue	760 m	49.821	Kr. Taruna	2003
Jalan telford	M. Tellue	830 m	49.763	PKK	2003
Jalan telford	Samaenre	900 m	49.967	LKMD	2003
Jalan telford	Kanrung	860 m	49.750	Klp. Tani	2003
Jalan telford	Kanrung	850 m	49.164	PKK	2003
Air bersih PP	Baru	1.500 m	39.926	R. Masjid	2003
Jemb. beton	Baru	6 m	49.588	Klp.Tani	2003
Jalan telford	Saotengnga	780 m	49.917	UPS.A.berisi	2003
Jalan telford	Saotengnga	830 m	49.979	KUD M.hoi	2003
Jalan telford	Saotengnga	790 m	49.514	LSM forkmas	2003
Air bersih PP	Bonto	2.000 m	49.483	LKMD	2003
Jalan telford	Saohiring	830 m	49.982	K.Tani orong	2003
Jalan telford	Saohiring	880 m	49.932	KT. Marannu	2003
Jalan telford	Saohiring	850 m	49.909	LKMD	2003
Jemb. kayu	Pattongko	10 m	45.343	K.Taruna	2003
Irigasi	Kompang	280 m	49.938	K.Taruna	2003
Irigasi	Kompang	280 m	49.995	K.Tani	2003
Sub Total 2			1.499.446		2003
Jalan telford	Mattunreng	750 m	49.963	LKMD	2004
Jalan telford	Samaenre	780 m	49.950	LKMD	2004
Jalan Sirtu	Saotanre	900 m	49.925	LKMD	2004
Irigasi	Bonto	300 m	49.930	LKMD	2004
Jalan telford	Pattongko	800 m	49.950	LKMD	2004
Sub Total 2			249.718		2004
Total			1.749.184	2003 & 2004	

Desa Mattunreng Tellue

Pelaksanaan program PKP2D di dusun Batulappa desa Mattunreng Tellue telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2003, dan 2004 terdiri dari 5 paket pekerjaan berupa jalan perkerasan, yaitu 4 paket pekerjaan jalan pada tahun 2003 dan 1 paket jalan pada tahun 2004.

Pembangunan prasarana jalan pada tahun anggaran 2003 merupakan poros jalan sepanjang 3,67 km sampai batas desa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 240.328.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah). Jalan ini menghubungkan antar wilayah kecamatan (kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Bulupoddo). Ke empat paket pekerjaan jalan pada tahun anggaran 2003 tersebut sebenarnya berada pada jalur yang sama dan bersambung, dimana model seperti ini biasanya pembangunan fisiknya dilakukan oleh satu perusahaan. Namun program PKP2D mengemban misi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, maka pihak pengelola menyiasati dengan membagi dalam beberapa paket dengan pertimbangan agar masyarakat dan OMS lebih banyak bisa terlibat untuk memperoleh pendapatan maupun pembelajaran, baik pelaksanaan langsung oleh OMS maupun OMS ber KSO dengan perusahaan yang ditetapkan (diatas 50 juta harus dikontraktualkan menurut Kepress 80, 2002) melalui proses tender pengadaan barang dan jasa di tingkat kabupaten.

Jalan ini sebelumnya sangat sempit dan kondisinya sangat buruk sehingga hanya bisa dilalui oleh kuda dan pejalan kaki, sehingga produksi

petani dari hasil sawah dan perkebunan yang melewati jalan tersebut jika dikonversi kedalam waktu tempuh dan daya angkut memakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dan biayanya menjadi mahal, bahkan akibat proses pengangkutan yang lambat sering menyebabkan kerusakan pada hasil produksi tersebut sehingga harga jualnya menjadi murah, keadaan seperti ini biasanya terjadi pada musim hujan. Demikian pula hubungan sosial antara masyarakat setempat dengan keluarganya pada desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo yang jaraknya hanya ± 7 km jarang dilakukan karena jalannya sulit dan hanya dilakukan dengan jalan kaki, dan jika melewati jalan lain yang kondisinya lebih baik jaraknya bisa mencapai 29 km atau lebih dari 4 kali lipat. Dengan dibangunnya jalan tersebut melalui program PKP2D maka kendaraan roda dua dan roda empat sudah bisa digunakan sehingga biaya angkut maupun waktu tempuh menjadi lebih murah dan singkat, demikian pula kegiatan masyarakat setempat ke pusat desa dan kecamatan menjadi lebih lancar.

Nilai paket pekerjaan jalan sepanjang 750 m pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 49.963.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh OMS. Paket ini juga merupakan poros antar kecamatan yang menghubungkan kecamatan Sinjai Tengah - Sinjai Timur. Kondisi awal jalan ini juga buruk dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan telah dibangunnya jalan itu kendaraan roda dua dan roda empat bisa lewat sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat jadi meningkat. Adapun

kegiatan yang dilaksanakan oleh program PKP2D pada tahun 2003, 2004 seluruhnya merupakan perkerasan jalan telford sepanjang 4.42 km dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 290.291.000 dan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Desa Mattunreng Tellue

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rpx1.000)	Pelaksana	Tahun
1. Jalan telford	Batulappa	830 m	49.816	LKMD	2003
2. Jalan telford	Batulappa	760 m	49.821	K. Taruna	2003
3. Jalan telford	Batulappa	830 m	49.763	PKK	2003
4. Jalan telford	Batulappa	1,25 km	90.928	K.Tani KSO CV. Sinar Bulupoddo	2003
Jumlah			240.328		
5. Jalan telford	Topisi	750 m	49.963	LKMD	2004
Jumlah			49.963		

Kelurahan Samaenre

Pembangunan prasarana jembatan sepanjang 33 m di sungai kobae dengan biaya Rp. 121.812.000 yang dilaksanakan dengan sistem KSO oleh OMS bersama CV. Usaha Baru yang dilaksanakan pada tahun 2003. Jembatan ini menghubungkan Kec. Sinjai Tengah dan Sinjai Selatan yang merupakan jalur ekonomi bagi banyak keluarga di sinjai tengah dan jalur pendidikan dan akses ke pasar bagi masyarakat desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan. Sebelum jembatan ini dibangun masyarakat kedua wilayah

sering mengalami kesulitan pada saat banjir terutama bagi petani dan pelajar yang tiap hari melewati sungai ini.

Dengan terbangunnya jembatan oleh program PKP2D memberi kemudahan bagi masyarakat kedua wilayah tersebut, demikian pula pembangunan jalan sepanjang 900 m di Lappadata yang dilaksanakan oleh OMS adalah jalan produksi bagi petani dan memudahkannya mengangkut hasil produksi mereka kerumah dan ke pasar jauh berbeda sebelum program ini dilaksanakan.

Sedangkan pada tahun anggaran 2004 adalah pekerjaan jalan sepanjang 970 m dilaksanakan secara langsung oleh OMS. Paket ini merupakan jalan menuju jalur jembatan kobae pada pelaksanaan Ta. 2003. Sebelum program, jalan ini berupa jalan tanah dan kondisinya buruk sehingga kendaraan roda empat sulit masuk terutama pada musim hujan. Dengan terbangunnya jalan ini memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat seperti halnya fungsi jembatan yang terbangun pada Ta. 2003. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh program PKP2D pada tahun 2003, 2004 disajikan sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Kel. Samaenre

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rpx1.000)	Pelaksana	Tahun
1. Jembatan kayu	Kobae	33 m	121.812	CV.Usaha Baru KSO K.Taruna	2003
3, Jalan sirtu	Lappa data	900 m	49.967	LKMD	2003
2. Jalan Telford	Lonra	970 m	49.950	LKMD	2004
Jumlah			221.729		

Desa Saotengnga

Pelaksanaan fisik berupa jalan oleh program PKP2D di desa ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2003 yang terbagi dalam 3 paket dan seluruhnya dilaksanakan oleh OMS. Ketiga paket jalan tersebut merupakan jalan produksi. Dengan terbangunnya jalan tersebut permasalahan transportasi hasil produksi dan kemudahan kegiatan social lainnya menjadi lebih baik. Pada tahun 2004 desa ini tidak memperoleh bantuan fisik, hal ini disebabkan karena desa ini sudah tergolong lebih maju dari desa lainnya , termasuk dari ketersediaan prasarana dasar sehingga berdasarkan penyusunan skala prioritas dalam Program Investasi Kecamatan (PIK) desa ini berada pada urutan bawah khususnya dari daftar usulan 2 (dua) tahun pertama. Adapun realisasi pelaksanaan program pada tahun anggaran 2003 seperti pada tabel berikut :

Tabel 13. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 di Desa Saotengnga

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rpx1000)	Pelaksana	Tahun
1.Jalan Telford	Talise	780 m	49.917	UPS AB	2003
2. Jalan sirtu	Bacikoro	830 m	49.979	KUD	2003
3. Jalan Telford	Tanete	790 m	49.514	Forkomas	2003
Jumlah			148.976		

Desa Saotanre

Jenis prasarana yang telah terbangun di desa Saotanre oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003/2004 adalah pekerjaan jembatan beton di S. Tadi panjang 10 m dengan biaya Rp. 132.162.000,- yang dibangun pada Ta. 2004 dan jalan sirtu di Lappa Arenne sepanjang 900 m dengan biaya Rp, 49.925.000, kedua paket ini berada pada ruas yang sama. Sebelum kedua prasarana ini dibangun di dusun ini, kondisinya terisolasi karena jalannya berupa jalan tanah yang sangat licin terutama pada musim hujan dan hanya dapat dilewati pejalan kaki sehingga beberapa hasil produksi petani seperti ubi dan pisang hanya dikonsumsi sendiri, sebab bila akan dijual biaya angkutnya lebih besar dari nilai jualnya. Ruas jalan ini menghubungkan antar kecamatan yaitu kecamatan Sinjai Tengah (Saotanre) dengan Kecamatan Sinjai Selatan (Desa Talle), selain itu juga merupakan jalur ekonomi dan sosial karena merupakan jalan ke areal sawah dan perkebunan bagi beberapa masyarakat desa di kecamatan Sinjai Tengah dan Sinjai selatan. Dengan dibangunnya jalan dan jembatan tersebut membuat dusun tersebut terbuka dan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya menjadi lebih baik. Adapun prasarana yang terbangun melalui program PKP2D Ta. 2003 dan 2004 sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Desa Saotanre

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rpx1.000)	Pelaksana	Tahun
1. Jembatan beton	S.Tadi	10 m	132.162.	CV.Fitrah, KSO klp tani	2003
2. Jalan sirtu	L. Arenne	900 m	49.925	LKMD	2004
Jumlah			182.087		

Desa Bonto

Prasarana yang telah terbagun melalui program PKP2D di desa Bonto pada tahun anggran 2003 & 2004 terdiri dari Air bersih (perpipaan grafitasi) sepanjang 2.000 m yang dilaksanakan oleh OMS dengan nilai Rp. 49.483.000 dibangun pada Ta. 2003 dan melayani \pm 200 KK di dusun Kessi dan Jira. Sedang irigasi desa di dusun Balebbere sepanjang 300 m yang dibangun pada TA. 2004.

Dengan terbangunnya air bersih kesehatan masyarakat meningkat karena bersumber dari mata air pegunungan, disamping itu masyarakat yang sebelumnya cenderung membuang hajat di sembarang tempat dengan alasan sulitnya air untuk menggelontor wc sekarang ini tidak dirasakan lagi, demikian pula sebelum sebelum program PKP2D umumnya masyarakat mandi hanya dilakukan 1 x sehari karena sumber air jauh dari rumah mereka dan berada pada daerah yang rendah, akhirnya dapat dilakukan lebih dari sekali dalam sehari.

Demikian pula sawah yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat berupa sawah tadah hujan, sebelum adanya program PKP2D hanya dapat diolah sekali setahun dan hasilnya pun tidak optimal. Dengan dibangunnya saluran irigasi sepanjang 300 m dan dapat menjangkau sawah \pm 2 ha pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh OMS, maka sawah dapat diolah menjadi 2 x setahun dan antaranya ditanami jagung. Hal ini menyebabkan volume produksi meningkat sehingga kesejahteraan petani pun lebih meningkat. Jenis dan lokasi serta biaya pelaksanaannya seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 15. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Desa Bonto

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rp x 1.000)	Pelaksana	Tahun
1. Air bersih	Bonto	2 km	49.483	LKMD	2003
2. Irigasi desa	Balebbere	300 m	49.930	LKMD	2004
Jumlah			95.293		

Desa Pattongko

Prasarana yang telah dibangun di Desa Pattongko oleh program PKP2D adalah jembatan kayu di dusun Tapillasa dengan panjang 6 meter yang dilaksanakan oleh OMS dengan biaya Rp. 45.343.000, oleh masyarakat setempat berdasarkan hasil rembuk warga dirubah menjadi jembatan beton dengan kesepakatan biaya pelaksanaan dilakukan secara swadaya. Hal ini

dilakukan dengan pertimbangan karena jalan tersebut merupakan jalan poros desa sehingga harus diperhitungkan dapat dilalui oleh mobil angkut 6 roda yang dapat mengangkut hasil bumi, disamping itu jika jembatan kayu biaya pemeliharaannya akan lebih mahal. Lokasi ini sebelumnya berupa jembatan bambu sehingga kendaraan roda dua pun sulit melewatinya, Dengan terbangunnya jalan tersebut maka kendaraan roda maupun roda empat sudah dapat melewatinya sehingga sangat membantu setempat.

Sedang prasarana yang dibangun pada Ta. 2004 di dusun Karoppa adalah jalan dengan kondisi awal yang sangat buruk sehingga daerah tersebut yang merupakan daerah produksi potensial berupa coklat hanya dapat diangkut dengan kuda sehingga biaya angkutnya menjadi mahal. Dengan terbangunnya jalan tersebut oleh program PKP2D maka kendaraan roda empat sudah dapat masuk untuk mengangkut hasil produksi masyarakat menuju ke pasar . Dengan demikian biaya angkut dan waktu tempuh menjadi lebih kecil, disamping itu selisih waktu dari keadaan sebelumnya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan lainnya. Pelaksanaan pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh OMS.

Prasarana fisik yang dibangun melalui program PKP2D pada Ta. 2003 dan Ta. 2004 seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 16. Hasil pelaksanaan prasarana program PKP2D tahun anggaran 2003 dan 2004 di Desa Pattongko

Jenis Pekerjaan	Lokasi	Vol, sat	Biaya (Rpx1.000)	Pelaksana	Tahun
1. Jembatan	Tapillasa	6 m	45.343	K. Taruna	2003
2. Jalan Telford	Karoppa	800 m	49.950	LKMD	2004
Jumlah			94.293		

3. Pemeliharaan

Agar prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan perlu upaya pelestarian dengan melakukan pemeliharaan bersama. Melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang telah dibentuk di setiap desa sebelum berakhirnya masa pelaksanaan fisik, setiap prasarana yang telah dibangun dilakukan pemeliharaan, dimana pengurusnya adalah masyarakat penerima manfaat. Sebelum KPP ini bekerja, Tim pengelola program lebih dahulu melakukan pelatihan tentang tata cara penaggulangan jika prasarana tersebut mengalami kerusakan dan perlunya dilakukan pemeliharaan rutin agar kerusakan bisa diperkecil. Untuk menggugah dan memunculkan semangat pemeliharaan masyarakat, oleh tim pengelola diperlihatkan kilas balik kondisi social ekonomi masyarakat pada daerah tersebut melalui foto visualisasi, disamping itu masyarakat diarahkan memikirkan kilas balik antara keadaan sebelum dan sesudah program itu ada terhadap apa yang dirasakannya.

Dengan menyadari manfaat dari prasarana tersebut akan mendorong masyarakat untuk melakukan pelestarian prasarana maupun system yang dilakukan oleh program PKP2D

Prinsip utama dari pelaksanaan program adalah adanya keberlanjutan (*Sustainability*) dari usaha-usaha masyarakat yang telah ada dan dengan pendampingan dan penguatan yang telah dilakukan maka masyarakat secara individu maupun lembaga tumbuh rasa kepercayaan diri untuk dapat melakukannya secara mandiri.

Gambaran upaya pelestarian masyarakat terhadap program PKP2D, terutama dari segi optimalisasi pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

Desa Mattunreng Tellue. .Kondisi prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 adalah jalan perkerasan. Saat ini kondisinya semakin baik karena sudah menjadi jalan aspal, karena jalan tersebut selain sebagai jalan produksi, juga merupakan jalan poros antar kecamatan (Kecamatan Sinjai Tengah - Kecamatan Bulupoddo). Sedang pada pelaksanaan Ta. 2004 paket jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Sinjai Tengah - Sinjai Timur, kondisinya masih jalan perkerasan dan oleh masyarakat setempat tetap dilakukan pemeliharaan walau sifatnya tidak rutin dan dilakukan secara swadaya. Dengan masuknya program PKP2D di desa ini secara lambat laun memberi peningkatan wawasan maupun peningkatan kegiatan usaha sosial ekonomi masyarakatnya

Kelurahan Samaenre. Kondisi prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 yaitu jembatan kayu 33 m ,

namun hanyut pada kejadian banjir bandang 20 Juni 2006 dan sudah dilakukan penggantian berupa jembatan beton. Sedangkan pada pelaksanaan Ta. 2004 adalah jalan perkerasan pada poros jembatan yang dibangun pada Ta. 2003 dan merupakan jalur antara kecamatan. Jembatan / jalan ini menghubungkan antara kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Selatan (Kel. Samaenre – Desa Bulukamase). Jembatan ini selain berfungsi sebagai jalur produksi juga merupakan jalau ke pasar dan ke sekolah bagi masyarakat Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan. Melalui program PKP2D ini masyarakat kedua wilayah tersebut merasa tertolong karena tidak terhalang lagi banjir pada musim hujan, disamping itu hasil produksi petani sudah dapat diangkut menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sehingga secara keseluruhan biayanyapun menjadi lebih rendah.

Kondisi jalan ini sudah beraspal, namun masyarakat tetap memliharanya baik secara individu maupun bersama, karena menyadari akan manfaatnya.

Desa Saotengnga. Kondisi prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 yaitu jalan perkerasan pada 3 ruas yaitu yang menghubungkan antar desa yakni dengan desa saotanre dan desa Saohiring, Ruas yang lain merupakan jalan produksi. Ke tiga ruas jalan tersebut merupakan jalan perkerasan dan kondisinya masih baik karena masyarakat tetap melakukan pemeliharaan secara swadaya.

Desa Saotanre. Kondisi prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 yaitu jembatan beton 10 m dan pada kejadian banjir besar akhir Mei 2008 mengalami kerusakan dan hingga saat ini belum dilakukan upaya perbaikan. Sedang pelaksanaan pelaksanaan tahun anggaran 2004 adalah jalan perkerasan satu ruas dengan lokasi jembatan pada tahun 2003. Ruas jalan /jembatan ini menghubungkan antara kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Selatan (Desa Saotanre – Desa Talle). Kondisi jalan ini masih tetap jalan perkerasan dan juga mengalami longsor pada beberapa titik. Hingga pelaksanaan penelitian jalan ini belum dilakukan perbaikan. Daerah ini kondisinya terisolir sebelum pelaksanaan program PKP2D, dimana beberapa hasil produksi petani seperti pisang dan ubi kayu tidak bisa bernilai uang karena biaya angkut lebih mahal dari harganya sehingga masyarakat hanya mengkomsumsinya sendiri. Dengan telah terbangunnya prasarana ini hasil produksi petani sudah dapat dijual ke pasar karena kendaraan roda dua maupun roda empat sudah bisa digunakan, demikian pula gabah petani sudah dapat diangkut dalam jumlah yang besar sehingga kerusakan gabah yang selama ini sering dialami petani karena lamanya tertinggal di sawah sudah dapat diatasi.

Desa Bonto. Prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 yaitu Air bersih sepanjang 2 km yang hanya bisa melayani 2 dusun ± 200 KK. Pada masyarakat yang tidak terjangkau di dusun Balebbere memaksakan diri dengan memilih pipa yang kualitasnya kurang baik akibatnya pada tahun ke 2 setelah pelaksanaan sudah banyak mengalami kerusakan walaupun awalnya dilakukan pemeliharaan namun

akhirnya mereka biaya kewalahan pemeliharaan sudah, sehingga kegiatan pemeliharaan mengalami hambatan. Sedang irigasi desa (pelaksanaan 2004) masih berfungsi dan tetap dilakukan pemeliharaan oleh masyarakat pemakai.

. **Desa Pattongko.** Kondisi prasarana yang telah dibangun oleh program PKP2D pada tahun anggaran 2003 yaitu jembatan kayu panjang 6 m oleh masyarakat dijadikan jembatan beton dan kekurangan biayanya dilakukan secara swadaya dengan pertimbangan jika jembatan beton biaya pemeliharaan akan lebih murah apalagi jembatan tersebut merupakan jalur produksi, sementara pelaksanaan Ta. 2004 adalah jalan yang menghubungkan antar desa yaitu desa saotanre-Pattongko dan merupakan jalan produksi dimana ketiganya masih tetap merupakan jalan perkerasan dan jarang dilakukan pemeliharaan sehingga kondisinya kurang baik. Keadaan demikian akan berimplikasi pada terhambatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pemanfaat dari jalan tersebut.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Identitas Responden

Responden yang merupakan sumber utama data primer di dalam penelitian ini perlu diketahui identitasnya, sebab banyak informasi penunjang yang dapat diperoleh dan dijadikan pertimbangan dalam analisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Beberapa ciri sosial dan ekonomi yang dapat dipakai untuk mendiskripsikan identitas responden adalah umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan pokok, jumlah tanggungan keluarga, dan jumlah pendapatan keluarga.

1. Umur Responden

Salah satu aspek yang cukup mempengaruhi perkembangan psikologis adalah umur, sebab semakin bertambah umur seseorang semakin matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, umumnya dengan bertambahnya umur dalam memasuki usia produktif akan mempunyai kemampuan fisik yang lebih kuat dan responsif terhadap penerimaan dan penerapan inovasi baru.

Kelompok umur yang paling banyak adalah antara 41-64 tahun yaitu sebanyak 48 %, kemudian diikuti kelompok umur 25 - 40 tahun sebanyak 47,5 %, sedangkan yang paling sedikit adalah berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 2 %. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat

responden umumnya didominasi kelompok umur produktif yaitu masyarakat yang berumur antara 25 – 64 tahun sebesar 95,50 %, hal ini menunjukkan bahwa potensi berusaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sangat memungkinkan.(Tabel 17).

Tabel 17. Keadaan responden menurut umur (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Kelompok Umur (Thn)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	≤ 24	5	2,50
2	25 – 40	95	47,50
3	41 – 64	96	48,00
4	= 65	4	2,00
Jumlah		200	100,00

2. Tingkat pendidikan responden

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya aspek intelektualitas dan produktifitas kerja. Dalam penelitian ini pendidikan responden yang dimaksudkan adalah pendidikan formal yang pernah diperoleh oleh responden.

Tingkat pendidikan responden pada lokasi penelitian sudah tergolong baik dibanding wilayah pedesaan pada umumnya. Dari 200 responden, hanya 73 responden (36,50 %) tidak sekolah hingga tamat sekolah dasar, yang tergolong berpendidikan SMP sampai SMA/Perguruan Tinggi sebanyak 126 responden (63,5 %). Hal ini menunjukkan bahwa potensi keberhasilan dalam

mengembangkan kegiatan social ekonomi masyarakat memungkinkan bisa lebih baik lagi, apalagi profesi pada umumnya adalah petani yang saat ini masih bisa menyesuaikan dengan tingkat pendidikan SMP , sehingga kemandirian berusaha bisa ditumbuhkan melalui pendampingan dan bimbingan intensif. Hasil olah data seperti tersaji pada (Tabel 18).

Tabel 18. Keadaan responden menurut pendidikan (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah / Tidak tamat SD	21	10,50
2	Sekolah Dasar	52	26,00
3	SLTP	46	23,00
4	SLTA/PT	81	40,50
Jumlah		200	100,00

3. Jenis pekerjaan pokok responden

Pekerjaan pokok atau mata pencaharian utama dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Melalui pekerjaannya seseorang dapat diketahui strata sosial ataupun tingkat kesejahteraannya.

Sebagaimana umumnya masyarakat pedesaan, pekerjaan pokok dominan adalah petani baik sebagai petani dalam bidang pertanian maupun perkebunan. Dari data responden di lokasi penelitian menunjukkan sebanyak 150 KK (75 %) adalah petani. Sementara itu pekerjaan sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta menempati urutan kedua sebanyak 29 KK (14,5 %) khususnya terdapat di desa Saotengnga, sedangkan yang terkecil adalah

pedagang atau pekerjaan lainnya sebanyak 21 KK atau sebesar 10,50 % terdapat di desa Pattongko dan desa Bonto. Dari data tersebut menunjukkan bahwa lapangan kerja masyarakat Sinjai Tengah masih dominan berusaha di sektor pertanian, sehingga dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya pemerintah harus lebih konsentrasi untuk mengembangkan sektor pertanian disamping sektor-sektor lain yang dilakukan secara sinergis dan saling mendukung. (Tabel 19).

Tabel 19. Keadaan responden menurut pekerjaan pokok (Hasil Olah Data Primer, 2008)

No.	Pekerjaan Pokok	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Petani	150	75,00
2	Pegawai	29	14,50
3	Pedagang dan lainnya	21	10,50
Jumlah		200	100,00

4. Jumlah anggota keluarga responden

Jumlah anggota keluarga menggambarkan beban keluarga yang harus ditanggung atau dinafkahi oleh kepala keluarga, sekaligus dapat menunjukkan potensi tenaga kerja dalam keluarga tersebut. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, semakin banyak pula kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, utamanya kebutuhan sandang dan pangan.

Kelompok masyarakat dengan jumlah anggota keluarga antara 3 - 5 orang merupakan kelompok terbanyak yaitu mencapai 130 KK atau 65 % menyusul kelompok dengan jumlah anggota keluarga lebih dari < 3 orang

sebanyak 41 KK atau 20,5 % sedangkan jumlah anggota keluarga 5 < sebanyak 29 KK atau sebesar 14,50 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umumnya keluarga-keluarga di kecamatan Sinjai Tengah adalah keluarga dengan ukuran sedang dengan jumlah anggota keluarga antara 3 - 5 orang.

Tabel 20. Keadaan responden menurut jumlah anggota keluarga di kecamatan Sinjai Tengah (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Jumlah Anggota Keluarga (org)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	< 3	41	20,50
2	3 – 5	130	65,00
3	> 5	29	14,50
Jumlah		200	100,00

5. Tingkat pendapatan keluarga responden

Jumlah pendapatan keluarga dapat memberikan gambaran tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari terutama kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). Semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin tinggi pula kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya. Keadaan responden menurut tingkat pendapatan keluarga di kecamatan Sinjai Tengah yang dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu tinggi (> Rp 900.000/bulan), sedang (Rp 500.000 - Rp 900.000/bulan), rendah (< Rp 500.000/bulan).

Bahwa kebanyakan masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah penghasilan keluarga per bulan tergolong tinggi sebanyak 114 responden

atau sekitar 65 %, kemudian sebanyak 63 responden atau 32 % berpenghasilan sedang, sedang sisanya 23 responden atau 12 % tergolong berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan pekerjaan pokok yang dominan yaitu petani coklat, cengkeh, merica, sawah dan vanili yang memiliki lahan garapan berupa ladang campuran yang berkisar antara 0.5 - 1.5 ha dengan produktivitas yang cukup tinggi, hanya sekarang ini mengalami penurunan produksi dan kualitas akibat gangguan hama khususnya coklat, sedang vanili mengalami penurunan harga yang sangat drastis. (Tabel 21).

Tabel 21. Keadaan responden menurut tingkat pendapatan keluarga di kecamatan Sinjai Tengah (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Pendapatan (Rp/bln)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	> 900.000	114	65,00
2	> 500.000 – 900.000	63	32,00
3	< 500.000	23	12,00
Jumlah		100	100,00

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program PKP2D

Penilaian berhasil tidaknya suatu program selain ditentukan oleh tim pengelola program itu berdasarkan pencapaian rencana dengan hasil yang dicapai, juga oleh pihak luar yang dinilai independen agar hasilnya lebih obyektif. Selain itu masyarakat sebagai salah satu stake holder yang memiliki posisi penting, berhak untuk memberikan penilaian terhadap semua

program yang diterima karena mereka selaku penerima manfaat dan langsung merasakannya.

Dalam penelitian ini selain data dari gambaran kondisi riil lapangan terhadap hasil yang dicapai oleh program, juga berdasarkan penilaian masyarakat terhadap pencapaian program berdasarkan pedoman pelaksanaannya.

Obyek penelitian dilakukan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana yang tersaji sebagai berikut :

1. Analisis Terhadap Perencanaan Program

Berdasarkan data hasil kuesioner dan wawancara terhadap responden terhadap perencanaan yang dilakukan oleh program PKP2D menunjukkan bahwa dari 200 responden, sebanyak 184 kepala keluarga memberikan penilaian baik atau sebesar 92 %, 13 kepala keluarga atau sebesar 6,5 % menganggap kurang dan 3 responden (1,5 %) menganggap buruk.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perencanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah sangat baik yaitu mencapai diatas 90 %, hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengusulan kegiatan program dilakukan secara terbuka dan melibatkan segenap lapisan masyarakat sampai tingkat RT dan hasilnya mencerminkan adanya keberpihakan terhadap kaum miskin dalam rangka optimalisasi peningkatan usaha kegiatan social ekonomi masyarakat. Yang menyatakan kurang sampai buruk hanya 8 % , ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan metode dan sistem

perencanaan yang dilakukan oleh program PKP2D yaitu perencanaan dilakukan di tingkat desa dan kecamatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah, sedang di tingkat kabupaten perencanaan dilakukan guna mendukung dan mensinergikan seluruh kegiatan antar sektor, program pemerintah propinsi dan pusat serta pihak swasta guna mengoptimalkan kegiatan usaha social ekonomi masyarakat.

Hasil penilaian terhadap perencanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah tersaji seperti pada table 22 berikut :

Tabel 22. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat/ Kepala keluarga terhadap perencanaan program PKP2D di kecamatan Sinjai Tengah (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Perencanaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Baik	184	92,00
2	Kurang baik	13	6,50
3	Buruk	3	1,50
Jumlah		200	100,00

2. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program

Data hasil kuesioner dan wawancara kepada responden terhadap pelaksanaan program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah, dari 200 responden, sebanyak 146 responden (73 %) memberikan penilaian baik , 33 responden (16,5 %) memberikan penilaian kurang , dan 21 responden (10,5 %) menilai buruk,.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan proyek

PKP2D secara umum dinilai baik (diatas 70 %), hal itu dapat dilihat dari kurangnya masalah yang timbul pada saat pelaksanaan dan hasil pelaksanaan prasarana yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas cukup baik bahkan sebagai salah satu bentuk kesukaan masyarakat terhadap program ini adalah adanya nilai keswadayaan dalam bentuk tenaga maupun volume pekerjaan pada hampir setiap paket pekerjaan, terutama yang dilaksanakan oleh OMS secara penuh (penunjukan langsung). Selain itu manfaat prasarana yang terbangun menjadi solusi permasalahan masyarakat yang dirasakan selama ini.

Sedang yang menyatakan kurang baik bahkan buruk sebesar 27 % Umumnya responden yang menganggap buruk menilai bahwa yang banyak dilibatkan berkerja pada saat pembangunan prasarana hanya kroni-kroni dari OMS selaku pelaksanan kegiatan. Selain itu keberadaan beberapa OMS dianggap tidak jelas sistem perekrutan anggotanya dan kurang memprioritaskan kelompok kurang mampu dan hanya berorientasi proyek. Sebagian responden menilai bahwa pelaksanaan KSO kurang memihak kepada masyarakat dan keberadaan kontraktor yang diharapkan dapat memberikan bimbingan dan membantu OMS tidak mampu meraka lakukan. Pada sistem KSO dimana dalam konsepnya OMS adalah pelaku dan pengendali kegiatan, ternyata dilapangan berlaku sebaliknya, karena kontraktor merasa merekalah yang harus mengatur karena secara hukum mereka yang melakukan kontrak dengan owner, sehingga jika terdapat hal yang harus dpertanggungjawabkan merekalah secara hukum yang harus

memperatnggungjawabkannya. Dengan demikian pada posisi ini OMS tidak memiliki posisi tawar, sehingga kontraktorlah yang mengendalikan masyarakat. Hasil olahan data seperti terlampir dalam tabel 23.

Tabel 23. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat/ Kepala keluarga terhadap pelaksanaan program PKP2D di kecamatan Sinjai Tengah (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Pelaksanaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Baik	116	73,00
2	Kurang baik	33	16,50
3	Buruk	21	10,50
Jumlah		200	100,00

3. Analisis terhadap Pemeliharaan Prasarana

Data hasil kuesioner maupun wawancara kepada responden dan hasil obesrvasi lapangan terhadap pemeliharaan program PKP2D adalah sebanyak 75 responden (38 %) menyatakan baik, 59 responden (30 %) menyatakan kurang baik dan sisanya sebanyak 66 responden (32 %) menyatakan buruk. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan yang termasuk kategori baik hanya 38 %, ini disebabkan karena sifat gotong royong di masyarakat sudah semakin menurun, disamping itu kelompok KPP yang dibentuk oleh masyarakat sudah tidak jelas lagi keberadaannya. Sebagian masyarakat sekarang ini memang tidak punya kepedulian lagi walaupun mereka turut memanfaatkannya, hal ini

terjadi akibat beban ekonomi yang semakin berat ditambah lagi lunturnya sifat kegotong royongan dimasyarakat oleh pengaruh globalisasi. Kecenderungan ini didukung oleh data responden yang menunjukkan bahwa sebanyak 125 (63 %) menyatakan pemeliharaan kurang maupun tidak melakukannya sama sekali. Agar keadaan ini bisa diatasi maka hendaknya pihak pemerintah desa bersama KPP yang telah dibentuk mencoba menumbuhkan kembali semangat gotong rotong dan keswadayaan sehingga segala kebutuhan masyarakat umum tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah, seperti pada table 24 :

Tabel 24. Keadaan responden menurut persepsi masyarakat/ Kepala keluarga terhadap pemeliharaan prasarana program PKP2D di kecamatan Sinjai Tengah (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No.	Pemeliharaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Baik	75	38,00
2	Kurang baik	59	30,00
3	Buruk	66	33,00
Jumlah		200	100,00

C. Analisis Dampak Program Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah

1. Analisis dampak program terhadap Perkembangan usaha

Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana dampak program terhadap perkembangan usaha masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah.

Dalam hal ini adalah, semua jenis usaha yang dilakukan masyarakat untuk bisa menunjang pendapatan keluarga baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai usaha sampingan yang diakibatkan oleh pemberdayaan masyarakat, lembaga maupun individu yang ditimbulkan akibat pembangunan prasarana oleh program PKP2D, seperti prasarana transportasi maupun prasarana produksi termasuk aset usaha yang dikonversi ke dalam nilai uang (Rupiah).

Untuk keperluan analisis data, maka total aset usaha atau volume usaha masyarakat pada saat ini (sesudah program) dan sebelum ada program dibandingkan nilainya dengan mempertimbangkan nilai inflasi, jika hasil yang dicapai sebelum adanya program lebih rendah dari nilai yang dicapai saat ini maka dinyatakan mengalami perkembangan.

Dari data responden menunjukkan bahwa sebelum program sebanyak 80 responden (40 %) memiliki perkembangan usaha yang besar dan sisanya 120 responden (60 %) memiliki perkembangan usaha kecil. Setelah program (saat ini), jumlah responden yang memiliki volume usaha besar menjadi 140 orang (70 %), sedangkan sisanya 60 orang (30 %) memiliki volume usaha kecil. Dari 140 responden yang memiliki perkembangan usaha besar setelah program; 80 responden (40%) tetap memiliki volume usaha besar dan 60 responden (30%) mengalami peningkatan perkembangan usaha dari kecil menjadi besar,. sedangkan dari 60 responden yang perkembangan usahanya kecil tetap kecil; dan tidak ada yang mengalami penurunan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa

pembangunan prasarana transportasi tingkat aksesibilitas masyarakat untuk mengelola usahanya menjadi lebih lancar dan atas efisiensi waktu yang ada bisa melakukan kegiatan produktif lainnya, sedangkan dengan terbangunnya prasarana produksi akan meningkatkan produksi petani baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga usahanyapun lebih meningkat dan memberi pengaruh positif terhadap perkembangan usaha masyarakat, dan tidak ada penurunan usaha dari kondisi sebelumnya. Untuk keperluan pengujian, maka data perkembangan volume usaha masyarakat tersebut disusun ke dalam tabel 25 berikut :

Tabel 25. Perkembangan usaha setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Perkembangan usaha sebelum program	Perkembangan usaha setelah program	
	Besar	Kecil
Kecil 120	60	60
Besar 80	80	0
Jumlah	140	60

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|60 - 0| - 1)^2}{60 + 0}$$

$$= 58,017$$

Jadi harga X^2 hitung = 28,033, selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat tabel pada dk = 1 dan taraf kesalahan 5 % diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian adalah: bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi

Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perbedaan/perubahan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada Chi Kuadrat tabel ($58,017 > 3,481$), jadi terdapat perubahan signifikan sebelum dan setelah ada program. Ini berarti pembangunan prasarana/ infrastruktur pedesaan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap, peningkatan perkembangan usaha masyarakat.

2. Analisis dampak program terhadap kesempatan kerja

Dengan adanya pembangunan prasarana infrastruktur pedesaan oleh program PKP2D berupa prasarana transportasi, prasarana produksi, prasarana air bersih dan sanitasi, membuka kesempatan kerja kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu/berpenghasilan rendah dengan cara terlibat sebagai tenaga kerja pada saat pelaksanaan fisik, demikian pula pengaruh yang ditimbulkan setelah terbangunnya prasarana yaitu dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat misalnya tukang ojek, atau usaha produktif lainnya .

Kesempatan kerja yang dimaksudkan di sini adalah peluang kerja yang diperoleh responden baik saat pembangunan prasarana dilaksanakan maupun akibat lancarnya arus lalu lintas sehingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat maupun akibat pembangunan prasarana produksi/ irigasi desa yang menyebabkan peningkatan jumlah periode garapan dalam setahun dari setahun sekali menjadi minimal dua kali dalam setahun.

Dari jawaban responden diperoleh data bahwa sebelum program sebanyak 32 responden (16 %) memiliki kesempatan kerja sedangkan

sisanya sebanyak 168 responden (84 %) tidak memiliki kesempatan kerja. Setelah program, jumlah responden yang memiliki kesempatan kerja seperti ojek, dagang dan usaha lainnya menjadi 164 orang (82 %), sedangkan sisanya 36 responden (18 %) tidak memiliki kesempatan kerja. Dari 164 responden yang memiliki kesempatan kerja setelah program; 32 orang tetap memiliki kesempatan kerja dan 132 orang memiliki kesempatan kerja kecil menjadi besar. Dari 36 responden yang tidak memiliki kesempatan kerja setelah program; seluruhnya tetap tidak memiliki kesempatan kerja. Dari analisis data menunjukkan bahwa kepala keluarga yang memiliki lapangan kerja itu adalah yang ikut bekerja pada saat pembangunan prasarana maupun terbukanya lapangan kerja akibat lancarnya lalu lintas maupun bertambahnya luas areal garapan akibat adanya irigasi. Sedangkan yang tidak mendapatkan lapangan kerja adalah yang tidak ikut bekerja pada saat pembangunan prasarana, disamping pendidikannya rendah/ tidak tamat SD sehingga tidak memiliki etos kerja dan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada maupun yang berpendidikan diatas SD namun gengsi melakukan pekerjaan selain menunggu untuk jadi pegawai, baik negeri maupun swasta. Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan kesempatan kerja tersebut disusun ke dalam tabel ABCD yang dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Perubahan kesempatan kerja setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Kesempatan Kerja sebelum Program	Kesempatan Kerja setelah Program	
	Ada	Tidak Ada
Tidak ada 168	132	36
Ada 32	32	0
Jumlah	164	36

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|132 - 0| - 1)^2}{132 + 0}$$

$$= 130,008$$

X^2 hitung diperoleh = 130,008, selanjutnya dicari harga Chi kuadrat tabel pada dk = 1 dan taraf kesalahan 5 % dan diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian adalah: bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan yang signifikan. Dari hasil perhitungan di atas ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada Chi Kuadrat tabel ($130,008 > 3,841$). Jadi terdapat perubahan kesempatan kerja yang signifikan, dimana setelah adanya program PKP2D kesempatan kerja semakin bertambah. Hal ini diperkuat dengan banyaknya anggota masyarakat menjadi tukang ojek akibat jalan yang sudah baik, juga makin banyaknya masyarakat berusaha pada sektor jasa angkutan dan kegiatan ekonomi lainnya.

3. Analisis dampak program terhadap pendapatan keluarga

Salah satu sasaran utama yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D) ini adalah meningkatkan pendapatan penduduk miskin di kawasan pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan perbaikan serta pengembangan sistem usaha dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya bagaimana dampak terhadap pendapatan masyarakat setelah pelaksanaan program PKP2D akan dilakukan pengkajian .

Pendapatan keluarga yang dimaksud di sini adalah total penerimaan dalam bentuk rupiah yang diperoleh keluarga dari pekerjaan pokok maupun usaha sampingan selama satu bulan. Berkaitan dengan teknik analisis yang digunakan maka, pendapatan keluarga tersebut digolongkan dalam dua kategori yaitu kecil jika pendapatan masyarakat/ kepala keluarga lebih rendah dari Upah Minimum RegionaI (UMR) Kabupaten Sinjai , dan besar jika pendapatan masyarakat keluarga lebih sama atau lebih besar dari UMR kabupaten Sinjai . UMR Kabupaten Sinjai saat ini sebesar Rp 900.000/perbulan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program, sebanyak 130 responden (65 %) memiliki pendapatan keluarga yang masih rendah, sedangkan sisanya 70 responden (35 %) memiliki pendapatan keluarga yang sudah tergolong tinggi. Setelah program, jumlah responden yang memiliki pendapatan tinggi meningkat menjadi 120 responden (60 %), sedangkan sisanya 80 responden (40 %) tidak mengalami peningkatan. Dari

120 responden dengan pendapatan keluarga tinggi setelah program, 70 orang tetap memiliki pendapatan tinggi dan 50 responden mengalami perubahan tingkat pendapatan rendah menjadi tinggi. Sementara itu dari 80 responden yang pendapatannya tergolong rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan/tetap. Dan tidak ada responden yang mengalami penurunan tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa keberadaan program PKP2D memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan terbangunnya prasarana transportasi, maupun prasarana produksi. Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan tingkat pendapatan masyarakat tersebut disusun ke dalam ke tabel ABCD yang dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Perubahan tingkat pendapatan masyarakat per bulan setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Tingkat Pendapatan Keluarga sebelum Program	Tingkat Pendapatan Keluarga setelah Program	
	Tinggi	Rendah
Rendah 130	50	80
Tinggi 70	70	0
Jumlah	120	80

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat :

$$X^2 = \frac{(50 - 0)^2}{50 \cdot 0}$$

$$= 48,020$$

X^2 hitung diperoleh = 48,02, selanjutnya dicari harga Chi kuadrat tabel pada $dk = 1$ dan taraf kesalahan 5 % dan diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian

adalah: bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan yang signifikan. Dari hasil perhitungan di atas ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada Chi Kuadrat tabel ($48,020 > 3,841$). Hal ini menunjukkan terdapat perubahan tingkat pendapatan keluarga yang signifikan setelah program, dimana setelah program pendapatan keluarga mengalami peningkatan.

4. Analisis dampak program terhadap kondisi rumah tinggal

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping kebutuhan pangan dan papan lainnya. Semakin meningkat jumlah penduduk suatu wilayah tentu kebutuhan rumah juga akan semakin meningkat. Kemampuan penduduk untuk memiliki rumah yang layak juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga, budaya dan keadaan alam. Berkaitan dengan analisis ini, kondisi rumah tinggal dilihat dari keadaan fisik rumah yaitu kondisi rumah digolongkan baik apabila bangunan rumah permanen atau semi permanen dengan memiliki kamar tidur, WC/ jamban keluarga dan air bersih sedangkan digolongkan buruk bila merupakan bangunan darurat, tidak memiliki kamar, WC dan air bersih.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program responden yang memiliki rumah tinggal dengan kondisi baik sebanyak 116 orang (58 %) sedangkan sisanya 84 orang (42 %) memiliki rumah tinggal dengan kondisi buruk. Setelah program, responden yang memiliki rumah tinggal dengan kondisi baik meningkat menjadi 173 responden (86,5 %) dan sisanya 27 responden (13,59%) kondisi rumah tinggalnya buruk. Dari 116

responden dengan kondisi rumah tinggal baik setelah program; 115 responden (57%) kondisi rumahnya tetap baik dan 58 responden (29%) mengalami perubahan dari kondisi buruk menjadi baik. Sedangkan dari 27 responden dengan kondisi rumah buruk; 26 responden tetap menempati rumah tinggal dengan kondisi buruk, sedang 1 responden yang keadaan rumahnya bertambah buruk, hal ini dapat dimaklumi sebab sebelumnya mereka tinggal bersama orang tua, kemudian mereka pindah menempati rumah sendiri yang masih darurat. Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan kondisi rumah tinggal tersebut disusun ke tabel ABCD yang dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Perubahan kondisi rumah tinggal masyarakat setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Kondisi Rumah Tinggal sebelum Program	Kondisi rumah tinggal setelah Program	
	Baik	Buruk
Buruk 84	58	26
Baik 116	115	1
Jumlah	173	27

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|58 - 1| - 1)^2}{58 + 1}$$

$$= 53,153$$

X^2 hitung diperoleh = 53,153. Selanjutnya dicari harga Chi kuadrat tabel pada $dk = 1$ dan taraf kesalahan 5 % dan diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian

adalah: bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan yang signifikan. Dari hasil perhitungan di atas ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari pada Chi Kuadrat tabel ($53,153 > 3,841$). Ini berarti terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi rumah tinggal masyarakat setelah ada program. Kondisi ini seiring dengan peningkatan usaha dan pendapatan serta alih pengetahuan, kesadaran masyarakat dari proses pendampingan yang dilakukan oleh aparat dan fasilitator melalui program PKP2D.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa responden yang memiliki rumah tinggal dengan kondisi bangunan yang lebih baik menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan volume usaha menyebabkan peningkatan pendapatan keluarga sehingga kebutuhan pokok bisa terpenuhi dan selebihnya mereka gunakan untuk memperbaiki rumah mengingat kondisi rumah bagi masyarakat merupakan prestise tersendiri bagi peningkatan status sosialnya.

5. Analisis dampak program terhadap pendidikan anak .

Pendidikan merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi penerus memasuki kompetisi global yang lebih ketat dimasa yang akan datang. Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat yang menciptakan arus globalisasi, maka diperlukan pendidikan yang cukup untuk memasuki dunia persaingan yang semakin ketat, hal ini diperlukan agar apa yang dicapai sekarang ini dapat lebih ditingkatkan paling tidak jika kondisinya sudah baik dapat mempertahankannya.

Dari data jawaban responden terhadap kuesioner diperoleh bahwa sebelum adanya program tingkat pendidikan responden menyatakan rendah sebanyak 140 responden (70 %) dan sisanya 40 responden (30 %) mampu membiayai anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (SMA/ Perguruan Tinggi) hal ini disebabkan kemampuan ekonomi orang tua yang masih rendah, disamping itu sebagian orang tua belum menyadari akan pentingnya pendidikan disebabkan karena masih rendahnya sumberdaya dari orang tua yang umumnya paling tertinggi berpendidikan SD bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sesudah program, sebanyak 126 responden (63 %) orang tua sudah mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sisanya sebanyak 74 responden (37%) tetap tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan keluarganya ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Dari 126 responden yang memiliki kemampuan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan tinggi 60 responden (30%) tetap memiliki kemampuan untuk membiayai anaknya ke jenjang sekolah yang tinggi, dan sebanyak 66 responden (33 %) mengalami peningkatan kemampuan dari tidak mampu menjadi mampu, sedangkan dari 74 responden (37%) yang tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi jumlahnya tetap, dan tidak ada responden yang tidak mampu bertambah ketidakmampuannya.

Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak/ keluarganya ke jenjang yang lebih tinggi tersebut disusun kembali ke dalam Tabel 29.

Tabel 29. Perubahan kemampuan peningkatan pendidikan anak setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Pendidikan sebelum Program	Pendidikan setelah program	
	Tinggi	Rendah
Rendah 140	66	74
Tinggi 60	60	0
Jumlah	126	74

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|66 - 0| - 1)^2}{66 + 0}$$

$$= 64,015$$

Diperoleh harga χ^2 hitung = 64,015, selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat tabel pada $dk = 1$ dan taraf kesalahan 5 % yang diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian adalah: Bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada tabel ($64,015 > 3,841$). Jadi terdapat perubahan yang signifikan pada kemampuan kepala keluarga untuk membiayai anaknya sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, disamping itu tumbuhnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya.

6. Analisis dampak program terhadap Akseibilitas masyarakat .

Akseibilitas suatu wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan suatu wilayah. Dengan lancarnya

akses maka akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan pembangunan prasarana transportasi oleh program PKP2D mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam aktivitas sosial ekonominya.

Dari data jawaban responden terhadap kuesioner diperoleh bahwa sebelum adanya program kondisi prasarana jalan dan jembatan menyatakan buruk sebanyak hanya 177 responden (88,50 %) dan sisanya 23 orang (11,50 %) menyatakan kondisi prasarana jalan baik. Sesudah program, sebanyak 116 responden (58 %) menyatakan mengalami peningkatan aksesibilitas dan sisanya 84 responden (42 %) menyatakan aksesibilitas masih buruk. Dari 116 responden (58%) setelah program yang menyatakan baik; 60 responden (30%) tetap menyatakan baik dan 66 responden (33%) menyatakan mengalami peningkatan dari kondisi buruk menjadi baik, sedangkan dari 84 responden yang menyatakan buruk sebanyak 74 responden tetap menyatakan aksesibilitas tetap buruk dan sisanya sebanyak 10 responden (5%) menyatakan makin buruk.

Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan aksesibilitas masyarakat tersebut disusun kembali ke dalam tabel 30 berikut :

Tabel 30. Perubahan aksebilitas masyarakat setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Aksebilitas sebelum Program	Aksebilitas setelah program	
	Ada	Tidak ada
Tidak ada 177	103	74
Ada 23	16	7
Jumlah	119	81

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|100 - 10| - 1)^2}{100 - 10}$$

$$= 84,346$$

Diperoleh harga χ^2 hitung = 84,346, selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat tabel pada dk = 1 dan taraf kesalahan 5 % yang diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian adalah: Bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada tabel (84,346 > 3,841). Jadi terdapat perubahan yang signifikan pada aksebilitas sebelum dan setelah program. Hal ini berarti pembangunan prasarana transportasi melalui program PKP2D mempunyai pengaruh yang nyata terhadap aksebilitas sehingga memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan sosial ekonomi meningkat dengan baik.

7. Analisis dampak program terhadap tingkat kesehatan

Kesehatan merupakan modal yang sangat penting bagi keluarga, dimana hanya orang yang memiliki kesehatan yang baik yang mampu melakukan kegiatan produktif, sebaliknya jika kesehatan buruk maka tidak ada sesuatu yang mampu kita lakukan. Menyadari tentang pentingnya kesehatan, maka setiap orang mestinya dapat menjaga kesehatannya melalui kebiasaan hidup yang baik dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penyakit. Untuk mengantisipasi agar kesehatan dapat diperahankan selain diperlukan perilaku yang sehat juga perlu tersedia sarana dan prasarana kesehatan untuk melayani jika suatu saat keluarga mengalami sakit.

Dari data jawaban responden terhadap kuesioner diperoleh bahwa sebelum adanya program 131 responden (65,5 %) yang memiliki tingkat kesehatan yang baik dan sisanya 69 orang (34 %) tergolong memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Sesudah program, kesehatan masyarakat meningkat menjadi 168 responden (84 %) dan sisanya 32 responden (16 %) kesehatannya tetap rendah. Setelah program dari 168 responden yang kesehatannya tergolong baik; 131 (65,5%) responden tetap memiliki kesehatan yang baik dan 37 responden (16%) mengalami perubahan dari kondisi buruk menjadi baik, sedangkan dari 32 responden (16%) tetap dengan tetap kondisi kesehatannya buruk dan tidak ada yang bertambah sakitnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat secara umum sudah cukup baik, maka dengan ketersediaan prasarana yang

mendukung peningkatan kesehatan seperti air bersih, menyebabkan kesehatan meningkat dan akibat bimbingan dan pendampingan program terhadap pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat akan merubah perilaku dari kurang sehat menjadi perilaku sehat sehingga tidak ada lagi responden yang sakit akibat pola hidup yang tidak sehat yang dapat menimbulkan penyakit menular seperti buang hajat di sembarang tempat, mengkonsumsi air kotor dan sebagainya.

Untuk keperluan pengujian, maka data perubahan tingkat kesehatan masyarakat tersebut disusun kembali ke dalam tabel 31 berikut :

Tabel 31. Perubahan tingkat kesehatan masyarakat setelah program (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

Tingkat Kesehatan sebelum Program	Tingkat Kesehatan setelah program	
	Sehat	Tidak sehat
Tidak sehat 69	37	32
Sehat 131	131	0
Jumlah	168	32

Dengan demikian dapat dihitung nilai Chi kuadrat:

$$X^2 = \frac{(|37 - 0| - 1)^2}{37 + 0}$$

$$= 35,027$$

Diperoleh harga A^2 hitung = 35,027, selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat tabel pada $dk = 1$ dan taraf kesalahan 5 % yang diperoleh = 3,841. Ketentuan pengujian adalah: Bila Chi Kuadrat hitung lebih kecil sama dengan (\leq) Chi Kuadrat tabel, maka tidak terdapat perubahan/perbedaan

yang signifikan. Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari pada tabel (35,027 > 3,841). Jadi terdapat perubahan yang signifikan tingkat kesehatan masyarakat setelah program. Hal ini berarti pembangunan prasarana penunjang kesehatan seperti air bersih dan akses jalan yang lancar ke pusat pelayanan kesehatan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya hasil analisis dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dengan tes Mc Nemar secara keseluruhan seperti terlihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Hasil analisis dampak program terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan Sinjai Tengah kabupaten Sinjai (Hasil Olahan Data Primer, 2008)

No	Variabel Sosek	X ² hit	X ² tab	Status H ₀	Kesimpulan
1.	Perkembangan Usaha	58,017	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
2.	Kesempatan Kerja	130,008	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
3.	Pendapatan	48,020	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
4.	Perumahan	53,153	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
5.	Pendidikan	64,015	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
6.	Akseibilitas	84,346	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan
7	Kesehatan	35,027	3,841	Ditolak	Terjadi perubahan yang signifikan

Dari tabel tersebut diatas Berdasarkan perhtiungan uji statistik Mc Nemart dari data lapangan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat

(perumahan, pendidikan, aksesibilitas, kesehatan, perkembangan usaha, kesempatan kerja dan pendapatan) menunjukkan X^2 hitung $>$ X^2 tabel, hal ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengaruh program terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sinjai Tengah .

Dari nilai yang diperoleh menunjukkan kesempatan kerja memiliki nilai tertinggi sebesar 130,008 dan terendah adalah kesehatan sebesar 35, 027. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja tidak hanya diperoleh setelah prasarana itu dimanfaatkan tetapi dimulai sejak pelaksanaan pembangunan prasarana itu dilakukan. Berbeda dengan yang lain dimana manfaat yang dirasakan masyarakat setelah prasarana tersebut dimanfaatkan, dan rata-rata setiap lokasi penelitian minimal terdapat dua paket pekerjaan dan dominan dilakukan oleh OMS sehingga banyak menyerap tenaga kerja .

Sedangkan kondisi kesehatan memiliki nilai yang paling kecil diantara yang lain karena pengaruh terhadap kesehatan umumnya hanya merupakan manfaat tidak langsung yaitu akses ke pusat pelayanan kesehatan lebih mudah, dan hanya di desa Bonto yang terbangun sarana air bersih yang terkait dengan kesehatan, dan tidak ada prasarana kesehatan lainnya yang terbangun, sementara kondisi sosial ekonomi lainnya bermanfaat langsung dengan prasarana yang terbangun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis tentang pelaksanaan program terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dari sisi perencanaan program, data menunjukkan bahwa masyarakat menyatakan sangat baik karena perencanaan dilakukan dua arah, yakni ditingkat desa dilakukan dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui penjaringan aspirasi yang dilakukan dengan analisis swot, sedang di kecamatan dan kabupaten perencanaan dilakukan untuk mendukung optimalisasi kegiatan usaha sosial ekonomi masyarakat di desa dan dilakukan secara terintegrasi dengan program yang ada pada orde di atasnya yakni Kabupaten, propinsi, pusat serta swasta. Misalnya usaha pengembangan perkebunan kakao oleh masyarakat ditunjang pembangunan infrastruktur berupa jalan produksi dan pemasaran oleh Dinas prasarana daerah, regulasi ketersediaan pupuk oleh dinas koperasi, pembinaan kelompok tani dan penyuluhan kepada petani oleh dinas perkebunan dalam hal pemberantasan hama dan penanganan

pasca panen, menjadi mitra petani bagi perusda dalam mendapatkan konsumen yang lebih baik dan sebagainya. Demikian pula kecamatan Sinjai Tengah dalam skala kabupaten berperan dalam pengembangan kawasan perkebunan dan peternakan searah dengan program Propinsi , dimana Kab. Sinjai masuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai kawasan pengembangan agro industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, pertambangan, pertambangan, pemukiman, industri rumah tangga dan perdagangan.

- b. Dari sisi pelaksanaan, walaupun secara umum masyarakat menyatakan baik, yaitu pembangunan prasarana fisik yang dilakukan secara KSO (Kerjasama operasional antara pengusaha dan masyarakat) dan Penunjukan langsung kepada OMS (dibawah 50 juta), namun dari sisi pemberdayaan pelaksanaan dengan sistem KSO masih dirasakan banyak kelemahan, diantaranya kontraktor cenderung berorientasi profit dan kurang memperhatikan kualitas sementara masyarakat sebagai penerima manfaat bersikap sebaliknya sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Disamping itu pihak kontraktor sangat membatasi pemakaian tenaga kerja dan hanya mempekerjakan orang yang mau mengikuti keinginan mereka, sehingga sedikit kontradiktif dari salah satu tujuan program yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan.
- c. Sedang dari sisi pemeliharaan, masyarakat menilai kurang, karena saat ini ada prasarana yang telah terbangun melalui program PKP2D kondisinya kurang terpelihara sehingga pemanfaatannya menjadi

tidak optimal lagi, padahal pihak program sudah memprakarsainya dengan membentuk Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) disetiap lokasi prasarana termasuk teknik operasionalnya dan hal itu sudah bekerja pada awal selesainya program, namun seiring dengan perkembangan jaman dimana nilai kegotong royongan masyarakat menjadi luntur sehingga beberapa prasarana yang telah dibangun melalui program PKP2D sudah kurang diperhatikan bahkan tidak terpelihara.

2. Program PKP2D di Kecamatan Sinjai Tengah berpengaruh positif dan memiliki hubungan signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (perkembangan usaha, kesempatan kerja, pendapatan, perumahan, pendidikan, aksesibilitas dan kesehatan) yang didukung hasil uji data secara statistik (*Mc Nemar Test*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan kedepan maka
 - a. Sistem perencanaan yang sudah baik dalam program PKP2D bisa dijadikan acuan dan membenahi kekurangan yang belum optimal pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat lainnya .
 - b. sementara dari sisi pelaksanaan sebaiknya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat secara padat karya melalui lembaga yang pengurus dan anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat dengan

kriteria yang dirumuskan dan disepakati berdasarkan norma yang berlaku secara universal di masyarakat dan norma khusus yang berlaku yang merupakan kearifan lokal di daerah itu. Selain itu agar nilai yang ditangani bisa diatas 50 juta sebagaimana proyek pemberdayaan yang berjalan belakangan ini .

c. Sedang dari sisi pemeliharaan sebaiknya tanggung jawab itu diberikan kepada pemerintah desa bersama KPP, karena mereka dipilih langsung oleh seluruh warga sehingga dengan pemberian tanggung jawab itu mereka bisa melakukannya bersama warganya melalui kerja bakti dan sebagainya.

2. Dalam rangka mengoptimalkan usaha pemberdayaan sosial masyarakat di kecamatan Sinjai Tengah, maka pemerintah perlu meningkatkan keterampilan/ sumber daya petani dan usaha lainnya melalui bimbingan dan pelatihan yang lebih intensif terkait bidang usahanya dan didukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta pemberian bantuan modal . Selain itu perlu fasilitasi pemerintah yang sungguh-sungguh dalam membantu petani mengatasi kendala hama dan pengendalian mutu agar hasil produksi masyarakat tetap mendapat kepercayaan yang baik bagi pihak konsumen sehingga akan dihargai tinggi, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R, 2007. Indikator Perkembangan Wilayah (Konsep dan Aplikasinya). Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adisasmita R, 1994. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Beberapa Dimensi Ekonomi Regional. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adisasmita R, 2007. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adiwoso Suprpto R, 1994. Makalah ilmiah, Analisa Dampak Sosial : Memperkirakan dan Mencegah Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Sosial, Himpunan Indonesi untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS)
- Amin.M 1996. Penetapan Ruang untuk Pembangunan Wilayah (Pendekatan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Berdimensi Ruang). Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Lemlit-Unhas, Makassar
- Anonim, 2002. Manual Teknis Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana Perdesaan (PKP2D), Tim Penyusun PKP2D Jakarta
- Arikunto S. 1997. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Rineka Cipta Jakarta.
- Avrom Bendavid-Val Peter P. Waller, 1975. Action-Oriented Approaches to Regional Development Planning, Praeger Publishers, U.S.A.
- Studi Sistem Transportasi Regional Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung, 1996..
- Dermawan Rizky 2005. Model kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Strategis. Alfabeta, Bandung.
- Emil Salim, 1980. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Friedmann John and Weaver Clide,.Territory and Function, The Evolution of Regional Planning;

- Glasson John, diterjemahkan Sihotang Paul, 1990. Pengantar Perencanaan Regional, Pengembangan Wilayah dan otonomi Daerah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- J. Blakely Edward, K.Bradshaw Ted, 2002. Planning Local Economic Development, Theory and Parctice; 3rd Edition; Sage Publications
- J. Moleong Lexy, 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif
- Johnson, B.F. 1985. Program Pembangunan Pedesaan . Tinjauan Kritis Pengalaman Masa Lalu. Dalam Kusyno, peserta Dinamika Pembangunan Pedesaan LP3ES, Jakarta .
- Kamaxluddin Rustian, 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kuncoro Mudrajad, 2008. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga Jakarta.
- Mubyarto, 2001, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisi Ekonomi, BPFE Jogyakarta.
- M.Z. Lawang. R, 2008. Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar, Fisip UI Press,
- Kajian Konsep dan pengembangan, Pusat Pengkajian Teknologi Pengembangan Wilayah Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengajian dan Penerapan Teknonogi (BPPT), 2002.
- Rangkuti Freddy, 2000. Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Riduwan, 2002. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Riyadi, Bratakusumah Deddy Supriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Sastraatmadja Entang, 2008. Dampak Sosial Pembangunan, Angkasa, Bandung
- Sitanggang, 1997. Perencanaan Pembangunan, Suatu Teori dan Praktek, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1999

- Soekartiwi, 2005. Agroindustri dalam Prespektif Sosial Ekonomi, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sugiono, 2003. Statistika untuk Penelitian Alfabeta , Bandung
- Sugiono, 2003. Metode Penelitian Administrasi Alfabeta , Bandung
- Sukirno Sadono, 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Lembaga Penertbit Universitas Indonesia
- Sutami, Ilmu Wilayah dalam Hubungannya dengan Pembangunan Negara.
- Tarigan Robinson, 2005. Edisi revisi. Ekonomi Regiaonal, Teori dan Aplikasi, edisi revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjokrowinoto. Moelyarto, 2008. Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yokyakarta
- Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Tukiati . 2002. Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah, dalam Umbardi U.M dan Prihawantoro. S. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah : Kajian Konsep dan Pengembangan. Deputi Pengkajian Pengembangan BPPT, Jakarta.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA
JL. PERINTIS KEMEDAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP (0411) 585034, 585036, FAX. (0411) 585868**

KUISISIONER PENELITIAN

**Topik : Evaluasi Program Penguatan Kapasitas Pengembangan Prasarana
Perdesaan (PKP2D) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai**

*Bapak/Ibu/Sdr/(i) yang terhormat, kami mohon kesediaan waktunya untuk menjawab/
mengisi beberapa pertanyaan di bawah ini dengan kondisi yang sebenarnya, kami
menjamin kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/(i). Kuisisioner/ angket ini dimaksudkan
hanya untuk menyusun tesis, sebagai syarat dalam penyelesaian studi di program
Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sd/(i), saya ucapkan terima kasih, semoga sukses selalu
dihari-hari mendatang.*

Peneliti

Petunjuk pengisian :

1. Isilah jawaban Bapak/Ibu/Sdr/(i), pada tempat yang telah disediakan.
2. Pilih salah satu jawaban diantara a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap sesuai.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nomor/ Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
4. Pendidikan formal :
 - a. Tidak sekolah/ tidak tamat SD.
 - b. SD/ sederajat.
 - c. SLTP/ sederajat
 - d. SLTA/sederajat
 - e. Perguruan tinggi, sebutkan
5. Status kawin : a. Kawin b. Belum kawin c. Duda d. Janda
6. Status dalam keluarga : a. Kepala Keluarga (KK) b. Bukan KK
7. Jenis pekerjaan pokok sekarang
8. Lama bekerja pada pekerjaan pokok sekarang
9. Pekerjaan sampingan
10. Jumlah anggota keluarga/tanggungun keluarga : (org)

I. PERSEPSI MASYARAKAT

1. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah program PKP2D sudah pernah disosialisasikan ke masyarakat ?
 - a. Pernahb. Tidak pernah

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

2. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah masyarakat turut dilibatkan dalam program PKP2D ?.
 - a. Dilibatkan
 - b. Kurang dilibatkan
 - c. Tidak dilibatkan
3. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah selama pelaksanaan program PKP2D pemerintah setempat terlibat didalamnya ?.
 - a. Terlibat
 - b. Kurang terlibat
 - c. Tidak terlibat
4. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah pelaksanaan program PKP2D dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat ?.
 - a. Diterima
 - b. Kurang diterima
 - c. Tidak diterima
5. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah Sinjai Tengah sebagai wilayah kawasan pengembangan perkebunan, peternakan dan pertanian sesuai potensi dan bidang usaha social ekonomi masyarakat dan sudah disosialisasikan ?.
 - a. Sesuai dan tahu
 - b. Kurang sesuai dan tidak tahu
 - c. Tidak tahu
6. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah pelaksanaan usulan kegiatan dalam program PKP2D telah melibatkan keterwakilan masyarakat sampai tingkat RT?.
 - a. Dilibatkan
 - b. Kurang dilibatkan
 - c. Tidak dilibatkan
7. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah usulan kegiatan dalam program PKP2D sudah mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu?.
 - a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
8. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah pelaksanaan usulan kegiatan dalam program PKP2D sudah dilakukan melalui identifikasi permasalahan oleh kelompok bidang usaha masyarakat (mis : KT Cengkeh, KT Coklat, Pedagangan dsb ?).
 - a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
9. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah usulan kegiatan yang ada dalam program PKP2D sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pengembangan wilayah?.
 - a. Sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Tidak sesuai
10. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah system pelaksanaan program PKP2D selain melibatkan **masyarakat dan aparat kecamatan dan desa, dan di kabupaten** yang melibatkan seluruh stake holder (pemerintah, Dinas Sektoral, Pengusaha, Unsur Perguruan Tinggi, LSM, Pers, DPRD, dll) secara terpadu sebagai bentuk dukungan program pemberdayaan masyarakat, memberi keyakinan pelaksanaan pembangunan akan lebih baik ?.
 - a. Yakin
 - b. Kurang yakin
 - c. Tidak yakin

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

11. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah system perencanaan program PKP2D seperti pertanyaan pont 10 diatas dianggap baik, sehingga masyarakat berharap agar system pelaksanaan pembangunan dilakukan seperti itu lagi ?.
 - a. Ya
 - b. Kurang, perbaikan pada
 - c. Tidak
12. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah usulan prioritas yang dihasilkan pada Program Investasi Kecamatan (PIK) sudah mencerminkan kebutuhan mendesak dan memberi manfaat yang luas kepada ?.
 - a. Ya
 - b. Kurang, perbaikan pada
 - c. Tidak

Pelaksanaan

13. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah pemerintah cukup konsisten mendukung realisasi usulan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ?.
 - a. Mendukung
 - b. Kurang mendukung
 - c. Tidak mendukung
14. Menurut bapak/ibu/sdr (i), seberapa besar pembangunan prasarana yang telah dilaksanakan oleh program PKP2D yang merupakan kebutuhan prioritas dari aspirasi masyarakat ?.
 - a. Seluruhnya
 - b. Sebagian saja
 - c. Tidak ada
15. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah sistem pelaksanaan fisik program PKP2D dengan menggunakan OMS dan Kontraktor diatas dianggap baik,?.
 - a. Ya
 - b. Kurang baik, perlu penyempurnaan pada bagian
 - c. Tidak
16. Menurut bapak/ibu/sdr (i), yang manakah lebih baik kualitas pekerjaan antara OMS dan Kontraktor ?.
 - a. OMS
 - b. Kontraktor
 - c. Sama saja
17. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah sistem pelaksanaan fisik program PKP2D baik dilaksanakan OMS maupun Kontraktor melibatkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat kurang mampu ?.
 - a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Tidak
18. Menurut bapak/ibu/sdr (i), adakah kendala/masalah yang dirasakan dalam pelaksanaan fisik program PKP2D baik oleh OMS maupun kontraktor misalnya dalam pembayaran upah ?.
 - a. Lancar dan sesuai oleh
 - b. Sering terlambat oleh
 - c. Tidak dibayar sebagian atau seluruhnya oleh
19. Setelah selesainya program PKP2D, apakah kendaraan roda dua dan roda empat sudah lancar di daerah bapak/ibu/sdr (i),?.
 - a. Lancar ≥ 2 x sehari
 - b. Kurang lancar 1 x sehari
 - c. Tidak lancar < 1 x sehari

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

Pemeliharaan

20. Menurut bapak/ibu/sdr (i), pernahkah dibentuk kelompok pemanfaat dan pemelihara prasarana ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak tahu
 - c. Tidak pernah
21. Menurut bapak/ibu/sdr (i), apakah hasil pelaksanaan PKP2D baik fisik maupun non fisik bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk menjaga kelestariannya ? ?.
 - a. Memelihara
 - b. Kurang memelihara
 - c. Tidak memelihara
22. Menurut bapak/ibu/sdr (i), bagaimana sistem pemeliharaan yang dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan pemanfaatan prasarana yang telah dilaksanakan oleh program PKP2D ?
 - a. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)
 - b. Aparat bersama masyarakat
 - c. Tidak dipelihara
23. Menurut bapak/ibu/sdr (i), Bagaimana mendapatkan dana jika dalam pelaksanaan pemeliharaan diperlukan dana ?.
 - a. Dari jas KPP
 - b. Iuran secara insidental ke masyarakat
 - c. Tidak dilaksanakan

II . KONDISI EKONOMI

A. Perkembangan usaha

1. Apakah pekerjaan utama bapak/ibu/sdr(i), sebelum program PKP2D

Sekarang	Sebelum proyek
a. Pegawai (PNS/TNI/POLRI)	a. Pegawai (PNS/TNI/POLRI)
b. Pedagang	b. Pedagang
c. Petani	c. Petani
d. Lainnya	d. Lainnya

2. Usaha/pekerjaan pokok apa yang bapak/ibu/sdr(i) kerjakan ?

Usaha/pekerjaan pokok	Sekarang	Sebelum proyek
a. Pertanian/perkebunan sawah/ladang/kebun
b. Perternakan, sebutkan
c. Pegawai, sebutkan
d. Ekonomi, produktif lainnya sebutkan

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

3. Berapa luas lahan pertanian (ha) : sawah/ladang/kebun bapak/ibu ?

Jenis lahan	Luas sekarang(ha)	Luas Sebelum proyek (ha)
a. Sawah
b. Kebun
c. Lainnya
Nilai Total asset (Rp)

4. Apa jenis tanaman perkebunan bapak/ibu dan berapa luasnya ?

Jenis lahan	Luas sekarang(ha)	Luas Sebelum proyek (ha)
a.		
b.		
c.		
Nilai Total asset (Rp)		

5. Apakah Bapak/ibu memelihara ternak besar (sapi atau kuda/kerbau) ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Tidak	a. Tidak
b. Ya, sebutkan ekor	b. Ya, sebutkan ekor
Taksiran nilai (Rp)	Taksiran nilai (Rp)

6. Apakah Bapak/ibu memelihara ternak kecil (kambing, unggas) ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Tidak	a. Tidak
b. Ya, Kambing ekor Ayam ekor Lainnya, sebutkan..... ekor	b. Ya, Kambing ekor Ayam ekor Lainnya, sebutkan..... ekor
Nilai total (Rp)	Nilai total (Rp)

7. Berapa jumlah modal usaha pokok Bapak/ibu (terkait pertanyaan no. 6)

Sekarang	Sebelum proyek
a. Modal uang : Rp	a. Modal uang : Rp
b. Peralatan : sebutkanunit	b. Peralatan : sebutkanunit
Nilai Aset (Rp)	Nilai Aset (Rp)

8. Berapa aset volume usaha sampingan Bapak/Ibu ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Modal uang : Rp	a. Modal uang : Rp
b. Peralatan : sebutkanunit	b. Peralatan : sebutkanunit
Nilai Aset (Rp)	Nilai Aset (Rp)

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

Kesempatan Kerja

9. Apakah ada bidang usaha baru selain usaha pokok (termasuk anggota keluarga) ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Ya	a. Ya
b. Tidak	b. Tidak

10. Jika ya, kegiatan/pekerjaan apa saja (baik tetap maupun sementara) ?

Sekarang	Sebelum proyek
a.	a.
b.	b.

11. Apakah bapak/ibu ikut menjadi tenaga kerja pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana pada program PKP2D ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Ya	a. Ya
b. Tidak	b. Tidak

Pendapatan

12. Selain bapak/ibu, adakah anggota keluarga lainnya (suami/istri/anak/anggota keluarga) ikut membantu mencari nafkah ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Istri/Suami	a. Istri/Suami
b. Anak (belum berkeluarga)	b. Anak (belum berkeluarga)
c. Anggota keluarga yang lain, sebutkan	c. Anggota keluarga yang lain, sebutkan

13. Jenis kegiatan apa saja yang dilakukan?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Istri/Suami	a. Istri/Suami
b. Anak (belum berkeluarga)	b. Anak (belum berkeluarga)
c. Anggota keluarga yang lain, sebutkan	c. Anggota keluarga yang lain, sebutkan

14. Berapa total pendapatan bersih keluarga bapak/ibu ?

Sekarang	Sebelum proyek
Rp.	Rp.

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

15. Apakah pendapatan bapak/ibu mencukupi kebutuhan pokok keluarga ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Istri/Suami	a. Istri/Suami
b. Anak (belum berkeluarga)	b. Anak (belum berkeluarga)

16. Jika tidak, kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi ?

Sekarang	Sebelum proyek
a.	a.
b.	b.

17. Selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apakah masih ada sisa dari pendapatan keluarga bapak/ibu ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Ya	a. Ya
b. Tidak	b. Tidak

Perumahan

18. Berapa luas bangunan rumah yang bapak/ibu tempati ?

Sekarang	Sebelum proyek
..... m ² m ²

19. Berapa nilai jual rumah yang bapak/ibu tempati ?

Sekarang	Sebelum proyek
..... m ² m ²

20. Bagaimana kondisi fisik rumah bapak/ibu tempati?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Permanen	a. Permanen
b. Semi Permanen	b. Semi Permanen
c. Non Permanen/darurat	c. Non Permanen/darurat

21. Bagaimana status rumah yang ditempati?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Milik sendiri	a. Milik sendiri
b. Milik orang tua/keluarga	b. Milik orang tua/keluarga
c. Lainnya	c. Lainnya

22. Fasilitas apa yang ada di rumah bapak/ibu ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Tidak ada	a. Tidak ada
b. Ada, yaitu : - Kamar tidur min 1 buah - KM/WC Closed - KM/WC bukan Cloded - Lainnya	b. Ada, yaitu : - Kamar tidur min 1 buah - KM/WC Closed - KM/WC bukan Cloded - Lainnya

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

23. Sarana air bersih apa yang bapak/ibu gunakan di rumah ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Air ledeng dari PDAM sejenisnya	a. Air ledeng dari PDAM sejenisnya
b. Sumur pompa/sumur gali	b. Sumur pompa/sumur gali
c. Lainnya.....	c. Lainnya.....

24. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah yang bapak/ibu tempati ?

Sekarang	Sebelum proyek
..... orang orang

Pendidikan

25. Adakah anak dari bapak/ibu/sdr(i) sekolah di

Sekarang	Sebelum proyek
a. TK	a. TK
b. SD	b. SD
c. SLTP	c. SLTP
d. SLTA	d. SLTA
e. Perguruan Tinggi	e. Perguruan Tinggi

26. Adakah anak atau anggota keluarga lainnya di rumah bapak/ibu/sdr(i) putus sekolah

Sekarang	Sebelum proyek

27. Menurut penilaian bapak/ibu/sdr(i) sekolah terbaik saat ini untuk anak?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Sekolah Kejuruan	a. Sekolah Kejuruan
b. Sekolah Umum	b. Sekolah Umum
c. Sekolah Agama	c. Sekolah Agama

Akseibilitas

28. Bagaimana kondisi jalan di lingkungan/desa bapak/ibu ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Baik kendaraan roda 2 & 4 lancar walaupun musim hujan	a. Baik kendaraan roda 2 & 4 lancar walaupun musim hujan
b. Sedang (hanya kendaraan roda 2 bisa lewat pada musim hujan)	b. Sedang (hanya kendaraan roda 2 bisa lewat pada musim hujan)
c. Buruk (tidak bisa lewati kendaraan)	c. Buruk (tidak bisa lewati kendaraan)

29. Apakah di lingkungan/desa bapak/ibu pernah dilaksanakan pembangunan/peningkatan jalan oleh program PKP2D ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Pernah	a. Pernah
b. Tidak pernah	b. Tidak pernah

Lampiran 1. Daftar Kuisisioner Penelitian

30. Bagaimana kondisi kualitas jalan setelah dilakukannya pembangunan/ peningkatan oleh program PKP2D ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Baik	a. Baik
b. Sama saja	b. Sama saja
c. Buruk	c. Buruk

31. Berapa waktu tempuh yang diperlukan ke lokasi tempat kerja bapak/ibu/sdr(i)?

Sekarang	Sebelum proyek

32. Bagaimana volume barang yang dapat dibawa atas tersedianya prasarana jalan/jembatan dalam kegiatan aktivitas sosial ekonomi ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Meningkatkan	a. Meningkatkan
b. Sama saja	b. Sama saja
c. Menurun	c. Menurun

33. Sarana apa yang digunakan jika bapak/ibu bepergian atau melakukan aktivitas sosial ekonomi ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Jalan kaki/pakai kuda	a. Jalan kaki/pakai kuda
b. Sepeda motor	b. Sepeda motor
c. Mobil Angkutan umum/pribadi	c. Mobil Angkutan umum/pribadi

34. Setelah jalur transportasi lancar, apakah bapak/ibu/sdr (i), sering keluar daerah ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Sering ≥ 2 x sebulan	a. Sering ≥ 2 x sebulan
b. Jarang ≤ 1 x seulan	b. Jarang ≤ 1 x seulan
c. Tidak pernah	c. Tidak pernah

Kesehatan

35. Adakah anggota keluarga bapak/ibu yang sakit ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Ada	a. Ada
b. Tidak ada	b. Tidak ada

36. Berapa kali bapak/ibu atau anggota keluarga lainnya mengalami sakit dalam setahun ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Tidak pernah	a. Tidak pernah
b. 1 – 3 kali	b. 1 – 3 kali
c. Sering	c. Sering

37. Jika ada anggota keluarga yang mengalami sakit, kemana mereka di bawa berobat ?

Sekarang	Sebelum proyek
a. Dukun	a. Dukun
b. Puskesmas	b. Puskesmas
c. Dokter praktek	c. Dokter praktek

Lampiran 2 Daftar nama dan Identitas responden di Kec. Sinjai Tengah (Sumber : Data primer2008)

No	Nama Reponden	Umur	Jenis Kelamin	Status Kawin/KK	Pendi dikan	Pek Pokok	Pek.Samp ingan	jml tanggung	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Abd. Rahman	48	L	K/KK	Sarjana	Peg	Tani	3	Mattunreng
2	Fitriadi.M	32	L	K/KK	Sarjana	Tani	Guru	4	Tellue
3	Bakri	48	L	K/KK	SD	Tani	-	3	↑
4	Supriadi	36	L	K/KK	SLTP	Tani	Ojek	4	↑
5	Baco	58	L	K/KK	-	Tani	-	3	↑
6	Saleng	62	L	K/KK	-	Tani	-	3	↑
7	Hasbi	45	L	K/KK	SD	Tani	-	4	↑
8	Baharuddin	39	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3	↑
9	Appe	53	L	K/KK	SD	Tani	-	2	↑
10	Murih	53	L	K/KK	-	Tani	-	3	↑
11	Hemma	63	L	K/KK	SD	Tani	-	2	↑
12	Mallo	59	L	K/KK	-	Tani	-	3	↑
13	Muh. Amir	62	L	K/KK	-	Tani	-	3	sda
14	Nganro	60	L	Duda/KK	SD	Tani	-	4	↑
15	Sulle	46	L	K/KK	SD	Tani	-	4	↑
16	Ismail	56	L	K/KK	-	Tani	-	5	↑
17	A.M.Jufri	39	L	K/KK	Sarjana	Peg	Tani	3	↑
18	M.Ilyas.S.Sos	31	L	K/KK	Sarjana	Tani	Guru	4	↑
19	Agus	40	L	K/KK	Sarjana	Peg	tani	2	↑
20	Drs.Sultan.B	36	L	K/KK	Sarjana	Peg	-	1	↑
21	Abd.Hakim	42	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3	↑
22	Ambo Dalle	46	L	K/KK	SLTA	Peg	tani	5	↑
23	A.Madein.A	52	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3	↑
24	M.Darwis	46	L	K/KK	SLTA	Tani	-	2	↑
25	Marsuki.B	60	L	K/KK	SLTP	Tani	Swasta	3	↑
26	Sumarto	32	L	K/KK	SLTA	Peg	-	5	↑
27	Isah	53	P	Janda/KK	-	Tani	-	2	↑
28	Mummu	58	P	Janda/KK	-	Tani	-	3	↑
29	Kabang	48	L	K/KK	SD	Tani	-	4	↑
30	Nursiah	47	P	K/BKK	D2	Peg	-	3	↑
31	Suriana	24	P	B/BKK	Sarjana	Peg	-	4	↑
32	Kamu	47	L	K/KK	SD	Tani	-	3	Mattunreng
33	Sule	51	L	K/KK	-	Tani	-	4	3e
34	Muh. Hatta	44	L	K/KK	SLTA	Tani	Guru	6	Saotanre
35	Nursiah.A.Ma	44	P	K/BKK	D2	Guru	tani	4	↑
36	Syappe. A. Ma	44	L	K/BKK	D2	Guru	tani	6	↑
37	Sakinah.A. Ma	55	P	K/BKK	Sarjana	Guru	tani	2	↑
38	Zainal Abidin	35	L	K/KK	SLTA	Peg	tani	7	↑
39	Pt. Mile	56	L	K/KK	SD	Tani	-	4	↑
40	M. Alwi	36	L	K/KK	SLTA	Dagang	tani	5	↑
41	Abd. Muin	41	L	K/KK	SLTA	Ojek	tani	2	↑
42	Husen	27	L	B/BKK	SLTP	Ojek	tani	4	↑
43	Amrin	25	L	K/BKK	SLTA	Tani	Ojek	4	↑
44	Bagu	50	L	K/KK	SD	Tani	-	5	↑
45	Asdar	35	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3	↑
46	Bahar	32	L	K/BKK	SLTP	Sopir	-	3	sda
47	Bandung	35	L	K/KK	SLTP	Dagang	-	4	↑
48	M. Tahir	41	L	K/KK	SLTA	Dagang	-	3	↑
49	Muse	43	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6	↑
50	Talibe	50	L	K/KK	-	Tani	-	5	↑
51	Bolle	46	L	K/KK	SD	Tani	-	5	↑
52	Pt..Uddin	50	L	K/KK	-	Tani	-	2	↑
53	Cape	55	L	K/KK	-	Tani	-	6	↑
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54	Nawing	42	L	K/KK	SD	Tani	-	3	
----	--------	----	---	------	----	------	---	---	--



55	udding	50	L	K/KK	SLTP	Tani	-	5	
56	Musnianti	28	L	K/KK	Sarjana	PEG	-	4	
57	H. Halwiah	54	P	K/BKK	SLTA	Guru	-	7	
58	Saenuddin	40	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	
59	Ismail	52	L	K/KK	-	Tani	Kades	4	
60	Ahmad	30	L	K/KK	PT	Guru	tani	2	
61	Jamsin	37	L	K/KK	SLTA	Dagang	-	6	
62	Hamu	43	L	K/KK	SD	Tani	-	5	
63	M. Arif	37	L	K/KK	SLTA	Dagang	-	7	↓
64	Bahtiar	33	P	K/BKK	SLTA	Tani	-	2	
65	Sanu	55	L	K/KK	-	Tani	tani	3	Saotanre
66	Anwar	33	L	K/KK	SLTA	Tani	-	4	
67	Mashab	38	L	K/KK	SLTA	Tani	Dagang	4	Saotengnga
68	Bahtiar	30	L	K/KK	SD	Tani	ojek	3	
69	M.Jamil	35	L	K/KK	SD	Tani	-	1	↑
70	Laba	45	L	K/KK	SD	Tani	-	9	
71	Agussalim.P	35	L	K/KK	SLTA	Tani	Dagang	5	
72	Syamsul B	31	L	K/KK	SLTP	Tukang	Dagang	3	
73	Sudding	64	L	K/KK	-	Tani	dagang	4	
74	Sudirman	32	L	K/KK	SLTA	Tani	Tukang	2	
75	A.Anizar	42	L	K/KK	Sarjana	Tani	-	6	
76	Ahmad.R	45	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	4	
77	Mustaring A	51	L	K/KK	SD	Tani	Tukang	7	
78	Salama	39	L	K/KK	-	Tani	-	3	
79	A.Suharto	41	L	K/KK	SLTA	Tani	Ternak	5	sda
80	A.Ottong	72	L	K/KK	SLTA	Pensiun	Tani	9	
81	Bahrin	48	L	K/KK	-	Tani	Sinso	7	
82	Tapping	35	L	K/KK	SLTP	Tani	Tukang	3	
83	Bora	56	L	K/KK	SD	Tani	Tukang	7	
84	Bakri	50	L	K/KK	SD	Tani	-	10	
85	A.Ihsan	41	L	K/KK	Sarjana	Dagang	Tani	4	
86	Jufri	52	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	6	
87	A. Basma	55	L	K/KK	SLTA	Tani	Ternak	10	
88	Aring	46	L	K/KK	SLTP	Peg	Tani	3	
89	A. Ahdjar	45	L	K/KK	D1	Peg	-	3	
90	Muh. Hasbi	40	L	K/KK	SLTP	Tani	Buruh	3	
91	Muh. Anwar	53	L	K/KK	SLTA	Tani	Ternak	11	
92	Agus Salim	24	L	B/BKK	SLTA	Dagang	Tani	5	
93	Milwan	37	L	K/KK	SLTA	Tani	-	1	
94	Dudding	42	L	K/KK	-	Tani	-	6	
95	Syukri Ardi	30	L	K/BKK	SLTA	Peg	-	1	
96	Ramli	45	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
97	Titu	78	L	K/KK	-	-	-	2	
98	A.Massessuni	66	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
99	Abd. Rahim.B	71	L	K/KK	SLTA	Pensiun	Tani	3	
100	Suardi	57	L	K/KK	SLTA	Pensiun	Tani	6	↓
101	Ammase	44	L	K/KK	SD	Tani	-	4	Saotengnga
102	Anwar	33	L	K/KK	SLTA	Dagang	tani	4	Bonto
103	Attung	47	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3	↑
104	Sinar	30	P	K/BKK	SLTP	Tani	-	3	
105	Maing	35	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
106	Hasan	40	L	K/KK	SD	Tani	-	3	
107	Hasruddin	45	L	K/KK	SD	Dagang	tani	5	
108	Taking	45	L	K/KK	SD	Tani	ojek	4	
109	Jarre	50	P	K/BKK	SLTP	-	-	5	
110	Surung	37	L	K/KK	SLTP	Dagang	tani	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Nompo	55	L	K/KK	-	Tani	-	5	
112	Amir.B	38	L	K/KK	SLTA	Tani	-	3	

113	Asis	30	L	K/KK	SLTP	Tani	-	2	
-----	------	----	---	------	------	------	---	---	--

114	Kaharuddin	35	L	K/KK	SLTA	Peg	tani	2	sda
115	Mustaring	40	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	
116	Mina	50	P	K/BKK	-	Tani	-	-	
117	Becce	42	P	K/BKK	SD	Tani	-	-	
118	Mappi	40	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6	
119	Ambo. E	27	L	K/KK	SD	Tani	-	2	
120	Sakka	49	L	K/KK	SLTP	Tani	-	5	
121	Subu	47	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6	
122	Isya	55	P	K/KK	-	Tani	-	2	
123	Marwiah	37	P	K/BKK	SLTP	Tani	-	3	
124	Bunga	27	P	K/BKK	SLTP	Tani	-	-	
125	Muna	43	P	K/BKK	SD	Tani	-	-	
126	Nenang	40	P	K/BKK	SD	Tani	-	-	
127	Ramlah	25	P	B/BKK	SLTP	Tani	-	-	
128	Taco	46	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
129	Ariani	22	P	B/BKK	-	Tani	-	-	
130	Nurhayati	35	P	K/BKK	SLTP	Tani	-	-	
131	Hafi	45	L	K/KK	SD	Tani	Dagang	5	↓
132	Amiruddin	37	L	K/KK	SLTA	Dagang	tani	4	
133	Tahir	40	L	K/KK	SLTA	Tani	-	1	
134	Basir	30	L	K/KK	SLTP	Tani	ojek	5	Bonto
135	Muhiddin. Tj	53	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	6	Pattongko
136	Yusuf.B	54	L	K/KK	SLTA	Tani	-	2	↑
137	Rosmani.M	52	P	K/BKK	SLTA	IRT	-	4	
138	A.Sukirah	60	P	K/KK	SD	Tani	-	3	
139	Jumatang	42	P	K/BKK	SD	IRT	-	-	
140	Cangceng	60	P	K/KK	-	Tani	-	1	
141	St. Ello	70	P	K/KK	-	Tani	-	1	
142	Salma	34	P	K/BKK	SLTA	Dagang	-	2	
143	Ruslan Syam	35	L	K/KK	SLTA	bengkel	Tani	4	
144	Abdullah	54	L	K/KK	D1	Guru	Tani	5	
145	Nurfaidah	18	P	B/BKK	SLTA	Peg	-	4	
146	Aminulah	34	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	3	
147	Rosmawati	40	P	K/BKK	SLTA	Dagang	Tani	6	sda
148	Maudu	52	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	
149	Ali Boddling	55	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
150	Bakka.P	55	L	K/KK	SD	Tani	-	6	
151	H.Abd.Jabar	62	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	
152	Mading	60	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
153	Safareng	35	L	K/KK	SD	Tani	-	4	
154	Hasmiati	29	P	K/BKK	SLTP	IRT	Dagang	3	
155	Irawati, S.Pd	27	P	K/BKK	SLTA	Honoror	KPMD	3	
156	Ambo Tuwo	29	L	K/KK	SLTA	Dagang	-	3	
157	Rahman	34	L	K/KK	SLTA	Dagang	Tani	3	
158	Juharni	32	P	B/BKK	SLTA	Guru	KPMD	3	
159	Masriana	36	P	B/BKK	D3	Guru	Dagang	4	
160	Nurlaela	31	P	B/BKK	SLTA	KPMD	-	6	
161	H.Senabe	53	P	K/BKK	SLTP	Dagang	-	2	
162	Mamma	30	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	
163	Sudding	53	L	K/KK	SD	Tani	-	2	
164	Sabaceng	47	L	K/KK	SD	Tani	-	7	↓
165	Salang	50	L	K/KK	SD	Tani	-	2	
166	Hamdan	32	L	K/KK	SLTA	Tani	-	4	
167	Rostati	38	P	K/BKK	D2	Guru	-	5	Pattongko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
168	A.Arifuddin	51	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	4	Samaenre
169	Sulle	43	L	K/KK	SLTA	Tani	-	4	↑
170	Budiman.S.Pd	39	P	B/KK	Sarjana	Guru	-	5	↑
171	Syahrir	30	L	K/KK	SLTP	Tani	Tukang	6	

172	Akbar	33	L	K/KK	SLTA	Tani	Ternak	3		
-----	-------	----	---	------	------	------	--------	---	--	--

173	Usman. A. Ma	22	L	B/BKK	D3	Guru	Tani	4		
174	Sofyan	57	L	K/KK	SLTP	Tani	Ternak	5		
175	Baso Gaffar	25	L	B/BKK	D3	Tani	Dagang	4		
176	Baba	40	L	K/KK	SD	Tani	-	2		
177	Syahrir	38	L	K/KK	SLTP	Tani	Ojek	2		
178	Syamsuddin	42	L	K/KK	SLTP	Tani	-	5		
179	Sarinah	30	P	K/BKK	SLTA	Peg	-	3		
180	Nurbaya	38	P	K/BKK	SLTP	IRT	-	4	sda	
181	M.Yusuf	50	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6		
182	Sirman	28	L	K/KK	SLTA	Tani	-	2		
183	Sain	45	L	K/KK	SLTA	Tukang	-	5		
184	Sulle	40	L	K/KK	SLTA	Tani	Tukang	3		
185	Mustaring	45	L	K/KK	SLTA	Peg	Tani	2		
186	Amang	40	L	K/KK	SLTA	Tani	-	4		
187	Samad	43	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6		
188	Kunnu	53	L	K/KK	SD	Tani	-	2		
189	Nurdin	37	L	K/KK	SLTA	Tani	-	4		
190	Lesang	44	L	K/KK	SD	Tani	-	5		
191	Karim	40	L	K/KK	SLTP	Tani	-	6		
192	Marsuki	46	L	K/KK	SLTP	Tani	-	2		
193	Lampe	48	L	K/KK	SD	Tani	-	6		
194	Turun	34	L	K/KK	SLTP	Tani	-	3		
195	Nasir	35	L	K/KK	SLTA	Sopir	-	5		
196	M.Arif	43	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4		
197	Abd. Gaffar	39	L	K/KK	SLTA	Dagang	-	3		↓ ↓
198	Hamka	33	L	K/KK	SLTP	Tani	-	4	Samaenre	
199	Abd. Jabbar	58	L	K/KK	SLTA	Tani	Ternak	4		
200	Sappe	38	L	K/KK	SLTP	Tani	Tukang	3		

Lampiran 5. Foto Pelaksanaan Penelitian



Wawancara dengan salah satu responden/tokoh wanita di desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah

Lampiran 6.
FOTO PELAKSANAAN PRASARANA PROGRAM PKP2D KEC. SINJAI TENGAH



Prasarana Jalan di Talise Desa Saotengga pelaksanaan TA. 2003



Prasarana Jalan di Talise Desa Saotengga pelaksanaan TA. 2003



Prasarana Air Bersih Desa Bonto Pelaksanaan TA. 2003



Prasarana Irigasi Desa Bonto Pelaksanaan TA. 2004

FOTO PELAKSANAAN PRASARANA PROGRAM PKP2D KEC. SINJAI TENGAH



Prasarana jembatan di Sungai Tadi Desa Saotanre pelaksanaan Ta.2003



Prasarana jalan di Lappaarenne Desa Saotanre pelaksanaan Ta.2004

FOTO PELAKSANAAN PRASARANA PROGRAM PKP2D KEC. SINJAI TENGAH



Prasarana jalan di Talise Desa Saotengga pelaksanaan Ta.2003



Prasarana jalan di Tanete Desa Saotengga pelaksanaan Ta.2003

